



JALAN MENDAKI MENUJU REFORMASI:  
GERAKAN MAHASISWA DI SEMARANG TAHUN 1990-1998

Skripsi  
Diajukan untuk menempuh ujian Sarjana  
Program Strata 1 dalam Ilmu Sejarah

Disusun oleh:

Aryono  
NIM A2C001098

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

2009

## INTISARI

Pada penelitian ini, penulis mencoba membahas tentang gerakan mahasiswa di Semarang yang terjadi selama kurun waktu 1990-1998. Penulis mengambil judul “*Jalan Mendaki Menuju Reformasi: Gerakan Mahasiswa di Semarang tahun 1990-1998*” karena Gerakan Mahasiswa ini berpuncak pada peristiwa reformasi 1998 yang berlangsung di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Semarang.

Penelitian mengenai gerakan mahasiswa ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah. Teori yang digunakan adalah perilaku bersama (Collective Behavior) dari Neil J Smelser untuk memahami Gerakan Mahasiswa yang terjadi di Semarang pada kurun waktu 1990-1998. Penelitian ini mengungkap latar belakang gerakan, bentuk gerakan mahasiswa, corak dan karakteristik gerakan mahasiswa di Semarang tahun 1990-1998.

Penelitian ini menemukan bahwa Gerakan Mahasiswa di Semarang pada tahun 1990-1998 dilatar belakangi oleh situasi nasional Indonesia yang menunjukkan gejala instabilitas. Instabilitas di bidang politik, ekonomi dan sosial yang terjadi di Indonesia mendapat respon oleh mahasiswa Semarang. Respon mahasiswa atas situasi nasional ini merupakan konsekuensi logis dari munculnya sikap kritis mahasiswa. Pada saat menjelang Pemilu 1992, mahasiswa di Semarang (khususnya dari Fakultas sastra Undip) menggelar perhelatan kesenian bertajuk Apel Siaga Kebangkitan Nasional. Kegiatan ini memandangi pelaksanaan Pemilu secara satir. Tindakan berani yang ditunjukkan mahasiswa Semarang ini merupakan konsekuensi logis dari kemunculan sikap kritis mahasiswa dalam menyikapi situasi nasional saat itu. Aparat pemerintah melakukan tindak represif dari kegiatan kesenian yang menyebabkan dua mahasiswa terkena pasal subversif. Tindakan represif ini tidak menyurutkan langkah mahasiswa Semarang dalam bersikap kritis. Pergulatan ide dan aksi membuah strategi baru yaitu mulai berkembang jaringan gerakan antar kota. Di Semarang sendiri mulai muncul jaringan organisasi mahasiswa antarkota seperti SMID, FORMASAL dan KAMMI. Selain organ baru ini, keberadaan BEM dan Senat yang ada di beberapa perguruan tinggi di Semarang memberikan warna tersendiri dalam gerakan mahasiswa.

Gerakan mahasiswa menemukan momentum penting pada saat terjadi krisis ekonomi (pertengahan 1997-1998). Aksi demonstrasi mahasiswa di Semarang mulai muncul pada bulan Februari 1998 hingga jatuhnya Soeharto bulan Mei 1998. Wacana utama yang diangkat pada aksi-aksi mahasiswa ini adalah pemulihan ekonomi dan mundurnya Soeharto. Sikap cerdas mahasiswa Semarang ditunjukkan dengan tidak terjebak pada isu nasional yang berkembang. Mahasiswa Semarang menolak pula pencalonan kembali Soewardi sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kekhasan yang dimiliki gerakan mahasiswa di Semarang antara lain wacana krisis dan suksesi nasional, tidak ada PT dominan, pemanfaatan simbol kenegaraan dalam setiap aksi, dukungan penuh dari segenap elemen masyarakat, dan metode bentrok sebagai sebuah pilihan akhir dalam setiap aksi.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

*"Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti"*

(kekuasaan yang sewenang-wenang akan kalah dan lebur dengan sembah sejati)

(Sesanti Jawa)

Dipersembahkan kepada:

*Kang Lawu Warta, Kang Wiji Thukul,*

*Yu Sipon, Wani dan Fajar*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Jalan Mendaki Menuju Reformasi: Gerakan Mahasiswa di Semarang tahun 1990-1998”**.

Penulisan skripsi tidak akan terwujud apabila tidak ada bantuan, baik moral maupun materil yang diberikan oleh berbagai pihak baik secara pribadi maupun institusi. Penulis mengucapkan terimakasih kepada : Prof. Dr. Nurdien H. K, M. A selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Dr. Dewi Yuliati, M. A selaku Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNDIP, Alamsyah SS. M.Hum selaku dosen pembimbing yang demokratis dan mengarahkan penulis, Dr. Endang Susilowati M.A selaku dosen wali yang dengan keras memberi semangat dan bimbingan kepada penulis.

Dosen-dosen Jurusan Sejarah yang telah memberikan “ilmu” selama penulis duduk di bangku kuliah, kepada Prof. Dr. Sutejo Kuwat Widodo, M. Si yang berkenan meluangkan waktunya untuk berdiskusi serta memberikan wawasan budaya kepada penulis. Tidak lupa kepada Staff TU, mbak Putu dan Mbak Tanti yang membantu kelancaran urusan akademik, Staff Perpustakaan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNDIP yang membantu kelancaran studi pustaka, Ibu Uut, Ibu Ning dan Pak Romli.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kang Johan Susilo selaku pemantik ide penelitian ini, mas Seno (Widya Mitra) yang berkenan memberikan *entry point*,

mas Basa Basuki dan mas Tri Budiyanto yang mau bercerita mengenai Apel Golput '92, kang Roekardi yang sedikit berkisah seputar aksi mahasiswa '98 di Semarang, mas Lukas Luwarso yang berkenan diwawancarai meskipun lewat email, kang Radjimo yang berkisah mengenai SMID, mas Ellen yang mau berkisah mengenai Formasal, kang Gunawan Budi Susanto yang memberikan wacana seputar gerakan mahasiswa pra '90an, kang Lawu Warta (Gong Bojawi) yang yang memberi wejangan sehat, kang Slamet dan Aan Rusdianto yang mau bercerita seputar PRD.

Ucapan terimakasih yang tak terkira untuk Bapak (alm.) Soeparno Hadipriyanto dan Ibu Soendaripah. Segala maaf dan sujud, penulis berikan untuk menghapus segala khilaf serta salah. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kakak tercinta Mbak Lies dan Mas Eddie atas segala bantuan yang diberikan. Keponakanku Lia, Thia, Zhita dan Widya yang memberikan *guyonan*-nya ketika penulis gamang,.

Untuk Komunitas Gong Bojawi terimakasih atas diskusi-diskusi Budaya Jawa-nya, kawan-kawan Forum Komunikasi Sejarah Undip (FOKUS) yang telah menjalin *network* dengan kawan-kawan diluar kota, Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah (Mesiass) yang telah memberikan pinjaman buku, pengelola Kampung Seni Lerep yang telah memberi tempat untuk berproses kreatif.

Kepada kawan-kawan seperjuangan angkatan'01, (alm) Fachruddin Syam, Topik, Titik, Sri Rochannah, Jihan, Avni, Ananti, Ardian, Yudi, Ato', Damar, Purwo, Karel, untuk selalu menjalin komunikasi. Terimakasih kepada Uung atas tumpangannya ketika terdampar di Jakarta, kepada kang Tri Subekso, kawan-kawan

di FOKUS, Risdha, Adi, Bowo, Depi, Kustam, Dhani, terutama saat jadi *volunter* di Klaten, Dian Indra Prashinta atas canda tawanya dan senyum termanis yang diberikan kepada penulis setengah tahun ini, kawan-kawan dari angkatan '02, '03, '04, '05, '06, '07, '08 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dan berbagai pihak yang luput dari perhatian penulis namun telah memberikan bantuan.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Tiada yang penulis harapkan selain kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan penulisan skripsi ini pada kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat membuka wacana perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat.

Semarang, September 2008

Penulis

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,

Alamsyah S.S, M.Hum.  
NIP 132205423

Diterima dan disahkan oleh  
Panitia Ujian Skripsi Program Strata 1  
Jurusan Sejarah Fakultas Sastra  
Universitas Diponegoro  
Pada hari : Jum'at Pahing  
Tanggal : 24 April 2009

Ketua,

Anggota I,

Dr. Dewi Yulianti, MA.

Dr. Agustinus Supriyono, MA.

NIP. 131629778

NIP. 131672470

Anggota II,

Anggota III,

Drs. Sugiyarto  
NIP. 131844803

Drs. Eko Punto Hendro, MA.  
NIP. 131602712

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR ISTILAH.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
INTISARI.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang dan Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup.....	11
C. Tinjauan Pustaka.....	12
D. Kerangka Teoritis.....	16
E. Metode Penelitian dan Penggunaan Sumber.....	20
F. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II. INDONESIA: SEWINDU AKHIR MASA ORDE BARU (1990-1998).....	25
A. Kondisi Politik.....	25
1. Isu Suksesi Nasional.....	25
2. Hegemoni Militer dan Birokrasi.....	28
3. Redemokratisasi kampus.....	30
B. Kondisi Ekonomi.....	33
1. Strategi Pembangunan Ekonomi Orde Baru.....	33
2. Dinasti Ekonomi Keluarga Cendana.....	36
3. Krisis Ekonomi 1997.....	39

C. Kondisi Sosial.....	41
1. Penggusuran demi Pembangunan.....	41
2. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.....	43
3. Kerusuhan 27 Juli 1996.....	45
<b>BAB III. MULAI BERGERAK: PERSEMAIAN IDE DAN PEMBENTUKAN JARINGAN ANTAR ELEMEN MAHASISWA (1990-1997).....</b>	<b>49</b>
A. Persemaian Ide Melawan Orde Baru (1990-1993).....	50
1. Isu suksesi menjelang Pemilihan Umum 1992.....	50
2. Aksi Kampanye Golongan Putih di Semarang.....	52
B. Pembentukan jaringan antar elemen mahasiswa di Semarang (1994-1997).....	61
1. Organisasi Mahasiswa Ekstra Universitas Pro Demokrasi di Semarang.....	62
a) Pembentukan SMID di Semarang.....	63
b) FPPI-Formasal.....	65
c) KAMMI di Semarang.....	67
2. Pers Mahasiswa di Semarang.....	68
3. Organisasi intra dan ekstra universitas di Semarang.....	70
<b>BAB IV. MENUMBANGKAN TIRANI: AKSI-AKSI REFORMASI OLEH MAHASISWA TAHUN 1998 DI SEMARANG.....</b>	<b>73</b>
A. Kristalisasi gerakan reformasi oleh mahasiswa di Semarang.....	74
B. “Satu Komando, Satu Perlawanan”: Mobilisasi massa oleh mahasiswa, dukungan dari masyarakat dan kontrol aparat.....	78
1. Mobilisasi dan aksi massa oleh mahasiswa di Semarang.....	79
2. Dukungan rakyat Semarang.....	104
3. Kontrol aparat keamanan.....	106
C. Corak khas Gerakan Mahasiswa di Semarang 1990-1998.....	110
1. Corak khas Gerakan mahasiswa di Semarang 1990 sampai menjelang Reformasi 1998.....	111
2. Corak khas Gerakan Mahasiswa di Semarang masa Reformasi 1998.....	113
a. Tanpa kerusuhan ditengah aksi mahasiswa.....	113
b. Krisis moneter sebagai penyatu gerakan.....	114
c. Tidak ada perguruan tinggi yang dominan.....	114
d. Kesamaan isu.....	115
e. Pemanfaatan simbol-simbol kenegaraan.....	115

f. Dukungan penuh dari segenap elemen masyarakat.....	115
g. Bentrok sebagai sebuah pilihan.....	116
BAB V. SIMPULAN.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	121
DAFTAR INFORMAN.....	128
LAMPIRAN.....	131

**DAFTAR SINGKATAN**

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BEM	: Badan Eksekutif Mahasiswa
UUD	: Undang-Undang Dasar
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Golkar	: Golongan Karya
Golput	: Golongan Putih
HAM	: Hak Asasi Manusia
HMI-MPO	: Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
Kudatuli	: Kerusuhan Dua Tujuh Juli
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Malari	: Malapetaka Lima belas Januari
Munas	: Musyawarah Nasional
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NKK/BKK	: Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
Pemilu	: Pemilihan Umum
PKI	: Partai Komunis Indonesia

PRD : Partai Rakyat Demokratik  
PP : Peraturan Pemerintah  
SARA : Suku Agama Ras dan Antar Golongan  
SMPT : Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi  
SK : Surat Keputusan

## DAFTAR ISTILAH

Animo	: Hasrat dan keinginan yang kuat untuk berbuat, melakukan, atau mengikuti sesuatu
Blokade	: Penutupan suatu wilayah sehingga segala sesuatu (orang dan barang) tidak dapat keluar maupun masuk
<i>Civil society</i>	: Konsep yang melibatkan warga negara yang aktif secara politik dimana orang-orang yang terlibat didalamnya adalah bagian dari masyarakat beradab yang mendasarkan hubungan pada sistem hukum
Civitas akademika	: Para mahaguru, lektor, mahasiswa dan yang lain yang terkait pada universitas
<i>Crony capitalism</i>	: Sistem perkenomian yang individualistik, segala usaha dilakukan oleh kerabat keluarga atau hubungan pertemanan dimana tujuan utamanya adalah mencari untung setinggi-tingginya
<i>Destabilizing factors</i>	: Faktor-faktor yang menyebabkan keadaan menjadi tidak stabil
<i>Grusa-grusu</i>	: Konsep dalam masyarakat Jawa mengenai tindakan yang terburu-buru dan tanpa rencana yang matang
Hegemoni	: Pengaruh kepemimpinan, dominasi, kelebihan kekuatan ekonomi, politik dan militer suatu negara terhadap negara lain dalam kawasan tertentu
<i>Invisible hands</i>	: Konsep ekonomi yang dipakai pada aliran neo klasik atau neo liberal dimana mekanisme pasar pada dasarnya dipandang cukup untuk menggerakkan roda perekonomian
Kolusi	: Kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji

Korupsi	: Praktek dimana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan jabatan mereka sehingga memungkinkan terjadi suap, pemalsuan dan ketidakberesan semua demi keuntungan pribadi
<i>Long march</i>	: Perjalanan yang dilakukan secara bersama-sama serta menempuh jarak yang panjang
<i>Make-up</i>	: Riasan wajah yang digunakan untuk menutupi wajah asli atau mempercantik diri
Masif	: Kukuh; kuat; utuh; padat; murni
Nepotisme	: Kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri terutama dalam hal jabatan pemerintahan atau perusahaan
Radikal	: Mendasar sampai ke akar-akarnya; amat keras menuntut perubahan yang menyangkut undang-undang
Represif	: Bersifat mengekang, menekan, menahan ataupun menindas
<i>Reshuffle</i>	: Pergantian personil dalam jajaran kementerian atau badan-badan negara lainnya
<i>Sharing</i>	: Memberikan bagian baik berupa informasi maupun hal lain
<i>Statement</i>	: Pengumuman atau pernyataan resmi
Status quo	: Kemapanan; keadaan yang menghendaki situasi berjalan seperti semula
Subversif	: Tindakan yang dilakukan secara perseorangan maupun kelompok dalam usaha melawan negara atau membahayakan negara
Split	: Pecahan; biasanya ditujukan pada sebuah organisasi yang dalam situasi konflik internal

Suksesi	:	Pergantian kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau negara
<i>Vis a vis</i>	:	Usaha saling berhadap-hadapan yang didasari perbedaan prinsipil antara kedua belah pihak

### DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
1. Salah satu prosesi pengibaran bendera putih.....	55
2. Salah satu prosesi pembacaan doa putih.....	56
3. Aksi Solidaritas dari mahasiswa Semarang.....	60
4. Aksi Keprihatinan di Fakultas Sastra Undip.....	81
5. Aksi Keprihatinan di Universitas Diponegoro.....	82
6. Aksi demo oleh mahasiswa dari IAIN Walisongo.....	89
7. Aksi demo mahasiswa di Patung Diponegoro.....	90
8. Aksi mahasiswa menduduki Wisma Perdamaian.....	95
9. Aksi mahasiswa menduduki Stasiun RRI.....	98
10. Solidaritas Perempuan Semarang untuk Reformasi.....	101
11. Aksi mahasiswa menduduki Gedung Berlian.....	102
12. Mahasiswa di Patung Diponegoro sujud atas <i>lengser</i> -nya Soeharto.....	103

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang dan Permasalahan

Indonesia seharusnya berterima kasih kepada para mahasiswa dimasa lalu dan dimasa kini. Pada saat kondisi dan situasi masyarakat mengalami keresahan sosial (*social unrest*) yang memuncak itulah, golongan mahasiswa yang sebelumnya “disia-siakan” turun ke jalan untuk menuntut perubahan pada penguasa. Hal itu menciptakan premis mayor bahwa kemunculan gerakan mahasiswa ditandai dengan peristiwa sejarah tertentu, yang merupakan muara dari berbagai macam permasalahan. Kemunculan pemuda angkatan 1908, 1928, 1945, 1966, 1974, 1978, 1990 dan 1998 mengiringi kelahiran sebuah konstruk peristiwa historis tertentu yang menentukan perjalanan sejarah Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kategori angkatan 1908 diberikan kepada generasi muda yang turut mendirikan Boedi Oetomo, 1928 bagi penyelenggara Sumpah Pemuda, 1945 bagi mereka yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, 1966 ialah angkatan yang berhasil menjatuhkan Soekarno, 1974 terkait dengan peristiwa 15 Januari 1974, angkatan 1978 ditujukan kepada mereka yang menentang pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden dan angkatan 1998 diberikan kepada generasi pemuda yang berhasil me-*lengser*-kan Soeharto. Disarikan dari beberapa buku antara lain: Abdurahman Suryomihardjo, *Budi Utomo Cabang Betawi*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980); Ben Anderson, *Revoloesi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944 – 1946*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988); Yozar Anwar, *Angkatan 66: Sebuah Catatan Harian Mahasiswa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980); Francois Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974* (Jakarta: LP3ES, 1985); Muridan S. Widjojo et al, *Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999).

Gerakan mahasiswa merupakan sebuah fenomena sosial yang tidak hanya terjadi di Indonesia namun sudah menjadi menjadi fenomena sosial yang universal. Gerakan ini telah berakar jauh sejak abad XII khususnya di negara-negara Eropa yang telah berkembang model pendidikan tinggi. Gerakan mahasiswa internasional memainkan peranan dalam sejarah sosial Eropa sejak berdirinya universitas di Bologna, Paris dan Oxford pada abad ke-12 dan abad ke-13.<sup>2</sup>

Para mahasiswa melancarkan suatu gerakan yang tertuju pada masyarakat dan banyak membawa perubahan pada perkembangan sejarah. Peranan mahasiswa semakin menonjol dan lebih bermakna dengan perkembangan dinamika masyarakat, hal itu mencerminkan semangat mahasiswa yang penuh idealisme merupakan pancaran dari usia muda. Mereka amat peka melihat penderitaan masyarakat serta akan memperlihatkan sikap memberontak terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan berdasarkan identitas mereka sendiri. Semua itu terpancar pada lingkungan sosial mereka dan terwujud pada suatu bentuk peranan unik, sentimen dan kritik dalam perspektif lampau, kini dan yang akan datang.<sup>3</sup>

Gerakan mahasiswa di Indonesia telah dimulai pada awal abad XX. Perubahan di Indonesia pada awal abad tersebut sangat kompleks ditandai dengan masuknya ide-ide baru, pendidikan, industrialisasi, disintegrasi masyarakat kuno dan

---

<sup>2</sup>Semboyan para mahasiswa pada saat itu adalah *Gaudeamus Igitur, Juvenes Dum Sumus*. Artinya, *Kita Bergembira, Selagi Kita Muda*. Yozar Anwar, *Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 19.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 230

teknologi.<sup>4</sup> Mahasiswa di Indonesia merespon perubahan ini dalam suatu bentuk pergerakan melalui suatu organisasi yang modern. Hal ini nampak pada gerakan yang dilakukan mahasiswa STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*) di Jakarta. Para mahasiswa ini bersepakat untuk berkumpul pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908 untuk mendirikan organisasi bernama Boedi Oetomo (BO).<sup>5</sup> Pasca kemunculan BO, kemudian bermunculan organisasi-organisasi pergerakan lain yang kemudian menyatukan pandangan dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928.<sup>6</sup>

Menjelang kemerdekaan politis yang diraih Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, gerakan mahasiswa yang semula mengandalkan kemampuan intelektual harus berbaur dengan pemuda non cendekiawan yang mengandalkan kemampuan fisik. Hal ini dilakukan karena kebutuhan merebut kemerdekaan harus segera diraih dari tangan Jepang. Revolusi fisik ini membutuhkan tenaga-tenaga revolusioner dari kalangan pemuda yang lebih luas, tidak hanya dari kategori cendekiawan.<sup>7</sup>

Gerakan mahasiswa pada kurun waktu pasca kemerdekaan politis 1945 hingga 1966 cenderung berada dibawah bayang-bayang aksi politis dari partai-partai politik pada masa Demokrasi Liberal dan masa Demokrasi Terpimpin. Onghokham memberi

---

<sup>4</sup>Onghokham, *Rakyat dan Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm. 134.

<sup>5</sup>Roeslan Abdulgani, *Dr. Soetomo Yang Saya Kenal*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1976), hlm. 21.

<sup>6</sup>A.K Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Rakjat, 1964), hlm. 97.

<sup>7</sup>Ben Anderson, *Revoloesi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944 – 1946*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988).

catatan tersendiri pada gerakan mahasiswa periode ini yaitu pada periode Demokrasi Terpimpin sekitar pergolakan Konsepsi Presiden dan kembali ke UUD '45.<sup>8</sup>

Memasuki tahun 1965, konflik politik semakin meruncing. Polarisasi kekuatan politik saat itu terbagi atas dua arus besar, yakni PKI dan Angkatan Darat. Pada tataran real politik, konflik tersebut lebih tampak sebagai sebuah pertikaian ideologis antara kelompok komunis di satu sisi, dengan kelompok antikomunis di sisi yang lain. Peningkatan kampanye PKI untuk melawan para penentangannya yang berlangsung dalam tahun 1965 melibatkan organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengannya, dalam hal ini Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dan Pemuda Rakyat. Demonstrasi-demonstrasi dilancarkan oleh mereka untuk menuntut pembubaran organisasi mahasiswa muslim, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).<sup>9</sup>

Pada 27 Oktober 1965, organisasi-organisasi mahasiswa dan kepemudaan kontra komunis muncul ke permukaan mengikatkan diri dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan berkoalisi dengan militer menuntut diturunkannya harga-harga, pembubaran PKI, dan *reshuffle* kabinet (tiga tuntutan ini dikenal sebagai Tritura: Tiga Tuntutan Rakyat).<sup>10</sup> Gelombang demonstrasi mahasiswa itu tampak

---

<sup>8</sup>Pra-sejarah gerakan mahasiswa pada saat itu adalah pada Pemilihan Umum 1955 terjadi perluasan organisasi mahasiswa seperti HMI, GMNI, CGMI. Pelembagaan dalam partai-partai sangat berpengaruh pada arah dan tujuan ormas-ormas mahasiswa itu. Onghokham, *op.cit.*, hlm 140

<sup>9</sup>Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 69.

<sup>10</sup>Ahmaddani G Martha dkk, *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Bahagia, 1989), hlm. 299.

tertata rapi, memakai sistem komunikasi yang berdaya guna untuk mengkoordinasi aksi-aksi mereka dan untuk persiapan-persiapan logistik makanan bagi pesertanya. Mereka bergerak seizin Angkatan Darat, dan sesungguhnya terdapat petunjuk yang jelas tentang dukungan tentara dalam penyediaan kendaraan-kendaraan untuk pengangkutan massa demonstran.<sup>11</sup>

Demonstrasi mahasiswa yang semakin menjadi-jadi, instabilitas politik, dan pembasmian anggota dan simpatisan PKI di berbagai daerah, dijadikan dasar bagi Soeharto untuk meminta kepada Soekarno sebuah wewenang yang lebih tinggi dari sebelumnya. Akhirnya pada 11 Maret 1966, Soekarno memberikan surat mandat kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban serta menjaga wibawa Presiden Soekarno. Keesokan harinya, tanpa menunggu lebih lama lagi, Soeharto pun mempergunakan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) untuk memenuhi tuntutan mahasiswa, membubarkan PKI.

Dalam peristiwa itu, gerakan politik mahasiswa '66 tidak terlihat sebagai faktor utama atas kejatuhan Soekarno. Sebaliknya, gerakan mahasiswa menjadi bagian integral dari strategi Angkatan Darat untuk mengambilalih kepemimpinan nasional dari tangan Soekarno. Bantuan-bantuan Angkatan Darat kepada gerakan mahasiswa ketika melakukan demonstrasi, dan dijadikannya gerakan mahasiswa sebagai alasan bagi Soeharto untuk mengatakan kepada Soekarno bahwa keadaan

---

<sup>11</sup>John D. Legge, *Sukarno, Biografi Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 460-461.

semakin tak terkendali, menunjukkan sikap yang jelas dari Angkatan Darat bahwa mahasiswa hanya digunakan sebagai alat peraih kekuasaan.<sup>12</sup>

Peranan Angkatan 66 sekitar peristiwa 1966 hanyalah sampai pada taraf spontan, insidental, dan bahkan emosional belaka. Strategi dan aksi mereka tidak sampai pada penciptaan *paradigma* kehidupan politik nasional yang baru. Pada saat itu Angkatan Darat memiliki apa yang tidak dipunyai oleh mahasiswa. Mereka memiliki konsep-konsep yang jelas mengenai apa yang seharusnya menjadi *paradigma ideal* bagi Indonesia pasca keruntuhan kekuasaan Soekarno.<sup>13</sup> Kendati pada perkembangan selanjutnya kondisi politik yang dibangun mereka di masa Orde Baru tidak lebih baik daripada era sebelumnya, bahkan lebih represif.

Pemerintahan baru dibawah payung Orde Baru sejak awal 1967 dan kembalinya fokus kegiatan mahasiswa perkuliahan pada tahun yang sama menghadapkan mahasiswa pada pilihan politik atau belajar. Pilihan yang semakin memenuhi wacana mahasiswa dan masyarakat waktu itu semakin diperumit oleh proses pembangunan yang semakin menampakkan hasil dan akibatnya (antara lain menjamnya korupsi dan kolusi). Secara struktural, kontroversi sikap pragmatisme versus idealisme mahasiswa itu tercermin dalam konflik di antara pemerintah Orde baru yang bertekad menegakkan stabilitas nasional dengan mengontrol politik

---

<sup>12</sup>Bonnie Triyana, Gerakan Pemuda dan Pembaharuan di Indonesia. Makalah dalam *International Workshop on Youth in the Age of Development* yang diselenggarakan pada 20 – 22 Juni 2004 oleh Centro de Estudos Afro-Orientalis Federal University of Bahia, Brazil. Tidak dipublikasikan. hlm 26.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm 28.

mahasiswa yang terikat akan misinya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Konflik itu kemudian memuncak pada peristiwa 15 Januari 1974.<sup>14</sup>

Trauma yang diakibatkan peristiwa Malari pada 1974 masih berbekas di kalangan aktivis mahasiswa. Untuk kurun waktu dua tahun ke depan, aktivitas mahasiswa lebih banyak dipusatkan di dalam kampus, dan kegiatannya pun lebih tercurahkan pada bidang kesenian, kebudayaan, dan sosial. Dalam masa itu, praktis mahasiswa teralienasi dari dunia politik. Surat Keputusan Menteri Pendidikan No. 028 tahun 1974 tentang pelarangan keras terhadap protes yang dilakukan oleh mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus, menjadi senjata ampuh bagi pemerintah untuk menghentikan aksi-aksi mahasiswa yang bermuatan politik. Namun itu tidak bertahan lama. Benih-benih dinamika aksi politik mahasiswa kembali muncul pada 1976. Aksi tersebut ditujukan untuk mencabut SK Menteri Pendidikan No. 028 yang dinilai merugikan kegiatan intelektual mahasiswa. Berbeda dengan aksi sebelumnya, protes mahasiswa kali ini tidak dibarengi dengan demonstrasi besar-besaran. Aksi mereka hanya dimanifestasikan melalui penyelenggaraan diskusi-diskusi saja.<sup>15</sup>

Menjelang pemilihan umum pada 1977, praktek-praktek represif dan pemaksaan dilakukan dengan gencar. Pada tahun 1977-1978 gerakan mahasiswa tersebar secara merata di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Satu ciri khas dari

---

<sup>14</sup> Hamish McDonald, *Suharto's Indonesia*, (Australia: Fortune Books, 1980), hlm. 134-141.

<sup>15</sup> Bonnie Triyana, *op.cit.*, hlm 33.

gerakan ini, adalah aksi-aksi politik yang dilakukan secara intensif dan terpolara rapih. Suhu politik yang semakin memanas mendorong pemerintah mengambil tindakan keras terhadap aktivis mahasiswa. Tindakan itu pertama-tama ditujukan dengan memberangus semua penerbitan media massa umum dan mahasiswa pada tanggal 20 Januari 1978.<sup>16</sup> Dan memang, selama kurun waktu 1977-1978 media massa umum dan kampus menjadi wahana mahasiswa untuk menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah.

Setelah pemberangusan media massa sebagai corong kampanye mahasiswa dilakukan, pemerintah Orde Baru langsung mengarahkan target operasinya pada pemimpin gerakan mahasiswa. Aksi penangkapan untuk kali pertama dilancarkan di Jakarta pada 20 Januari 1978. Kesuksesan militer menangkap para pemimpin aktivis mahasiswa dilanjutkan dengan pembekuan seluruh kegiatan Dewan Mahasiswa se-Indonesia. Peraturan itu tertera dalam SKEP-02/KOPKAM/I/1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Staff Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kaskopkamtib). Pada 14 dan 15 April 1978, dalam acara rapat kerja rektor se-Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef menyosialisasikan gagasan normalisasi kehidupan kampus.<sup>17</sup> Kemudian gagasan Daoed Joesoef itu dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.

---

<sup>16</sup>Harian umum yang dibredel adalah *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Merdeka*, *Pelita*, *The Indonesian Times*, dan *Sinar Pagi*. Sedangkan media kampus yang turut diberangus adalah *Salemba* (UI Jakarta), *Tridharma* (IKIP Jakarta), *Kampus*, *Berita ITB* (ITB Bandung), *Integritas*, *Muhibah* (UII Yogyakarta) dan *Aspirasi*. Kurniawan Junaedie, *Ensiklopedi Pers Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1991).

<sup>17</sup>Bonnie Triyana, *op.cit.*, hlm 37

0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), yang pelaksanaannya dijabarkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. D.A. Tisna Amidjaja melalui Instruksi No. 001/DJ/Inst/1978 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Penataan Kembali Lembaga-lembaga Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Melalui keputusan inilah gerakan mahasiswa disentralisasikan dalam lembaga mahasiswa yang mandul secara politik. Hal tersebut sekaligus menandakan – secara formal – kematian gerakan mahasiswa pada zaman rezim Orde Baru.<sup>18</sup>

Gerakan mahasiswa mulai menggeliat kembali pada kurun waktu 1990 dan memuncak pada peristiwa Reformasi 1998. Bibit-bibit kerusakan Orde Baru dipandang semakin parah oleh kalangan mahasiswa, hal ini mendorong munculnya kembali isu suksesi kepresidenan menjelang pemilu 1992.<sup>19</sup> Gerakan mahasiswa menentang Orde Baru pada kurun waktu 1990-1998 bergerak secara diaspora di berbagai kota di Indonesia tak terkecuali di Semarang. Misalnya saja aksi mahasiswa Semarang pada saat menjelang Pemilu 1992 berupa orasi dan *happening art* pada acara “Apel Siaga Kebangkitan Nasional”, 20 Mei 1992, di halaman Fakultas Sastra Undip.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Didik Supriyanto, *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK-BKK*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998).

<sup>19</sup>Edward Aspinal (eds), *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 5.

<sup>20</sup>wawancara dengan Bustanul Arifin (eks aktivis Kampanye Golput 1992) pada 25 Februari 2007

Gerakan mahasiswa di Semarang memberikan warna tersendiri pada gerakan mahasiswa nasional, beberapa aktivis mahasiswa dari Semarang mampu membawa nama Semarang pada pergerakan mahasiswa tingkat nasional.<sup>21</sup> Gerakan mahasiswa di Semarang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi, atas dasar itu maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul *JALAN MENDAKI MENUJU REFORMASI: GERAKAN MAHASISWA DI SEMARANG TAHUN 1990-1998*.

Gerakan mahasiswa di Semarang merupakan peristiwa yang khas dan terjadi di tingkat lokal. Menurut penulis peristiwa ini menarik untuk dikaji karena dengan mengungkap peristiwa lokal pada masa lampau dapat memperluas perspektif historis dari perkembangan sejarah lokal itu sendiri. Pengungkapan secara khusus dan menunjukkan sifat ke-lokal-an bisa menunjukkan motif-motif yang tersembunyi. Dengan demikian gerakan mahasiswa di Semarang memiliki arti penting untuk memperkaya khazanah historiografi Indonesia. Permasalahan yang akan dikupas pada skripsi ini adalah:

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya Gerakan Mahasiswa tahun 1990-1998
2. Bagaimana bentuk Gerakan Mahasiswa di Semarang kurun waktu 1990-1998
3. Bagaimana corak dan karakteristik Gerakan Mahasiswa di Semarang tahun 1990-1998

---

<sup>21</sup>wawancara dengan Ferry (aktivis Partai Rakyat Demokratik) pada 15 Januari 2007.

## **B. Ruang Lingkup**

Sebuah penelitian perlu dibatasi melalui penentuan luasnya ruang lingkup masalah sehingga akan didapatkan batasan yang jelas, hal ini sangat diperlukan dalam langkah-langkah penelitian agar memiliki arah yang jelas.<sup>22</sup> Perangkat pembatas spasial dan temporal adalah mutlak bagi penelitian sejarah, karena dengan batasan tersebut maka sejarawan akan terhindar dari perihal yang tidak ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

Skop temporal pada skripsi ini adalah kurun waktu tahun 1990 sampai 1998. tahun 1990 dipilih sebagai pijakan awal karena pada tahun ini sikap pemerintah pusat agak melunak terhadap gerakan mahasiswa, selain itu juga keterbukaan pers dalam memuat kritik oleh beberapa kalangan terhadap pemerintah pusat. Di Semarang sendiri, aktivis-aktivis pergerakan mahasiswa mulai merespon keadaan riil sosial politik masyarakat dengan melakukan diskusi serta membentuk kelompok diskusi dan membangun jaringan antar aktivis dengan kota lain. Sedangkan tahun 1998 dipilih sebagai batasan tahun terakhir dalam skripsi ini karena klimak dari perjuangan gerakan mahasiswa terjadi di tahun tersebut ditandai dengan peristiwa Reformasi 1998. Aksi-aksi demonstrasi terjadi hampir di seluruh kota di Indonesia tak terkecuali di Semarang.

---

<sup>22</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 19.

<sup>23</sup>Taufik Abdullah, Abdurahman Surjomihardjo (eds), *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. Xii.

Skop spasial skripsi ini adalah kota Semarang, meskipun gerakan mahasiswa di Semarang tidak sebesar di Jakarta, Yogyakarta namun sebenarnya gerakan mahasiswa di Semarang mempunyai hubungan luas dengan kerangka perkembangan sejarah pergerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa di Semarang tahun 1990-1998 merupakan fenomena historis di tingkat lokal yang merupakan satu dimensi dari sejarah nasional.<sup>24</sup>

Skop keilmuan pada skripsi ini adalah sejarah sosial politik karena bagian dari skripsi ini adalah gerakan mahasiswa melawan kekuasaan Orde Baru. Hal ini terkait pula dengan ideologi-ideologi yang mengiringi perjalanan gerakan mahasiswa.

### **C. Tinjauan Pustaka**

Kajian mengenai gerakan mahasiswa di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti baik dari dalam maupun dari luar negeri. Namun dapat dipastikan dari semua hasil penelitian itu berskala nasional, jarang sekali terdapat hasil penelitian yang menjelaskan mengenai gerakan mahasiswa di Indonesia dalam skala lokal. Beberapa buku yang akan penulis kupas dan memiliki korelasi dengan skripsi ini juga jarang menyinggung mengenai gerakan mahasiswa tingkat lokal seperti di Semarang.

---

<sup>24</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 35.

Buku pertama adalah karya dari Arbi Sanit yang berjudul *Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*.<sup>25</sup> Arbi Sanit lewat buku ini mencoba memberi latar belakang sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia. Dalam pembahasannya, Arbi juga menyinggung mengenai ideologi yang mendasari gerakan-gerakan mahasiswa ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa terjadi perbedaan, sampai saat ini, tentang apakah gerakan mahasiswa sebaiknya hanya menjadi gerakan moral saja atau gerakan politik. Arbi Sanit menguraikan mengenai konsep “gerakan moral” ini, menurutnya menjadi aktivis pergerakan apalagi murni untuk terjun dalam dunia politik adalah bukan pilihan namun karena keterbatasan-keterbatasan yang ada pada diri mahasiswa. Bagaimanapun juga tugas mahasiswa adalah belajar dan menyelesaikan studinya, mereka tidak bisa menjadi politisi profesional secara terus-menerus karena butuh tekad kuat untuk secara penuh berkiprah dalam bidang politik. Arbi pun memberi penilaian terhadap gerakan mahasiswa sebagai tempat pengkaderan pemimpin bangsa di masa. Secara implisit Arbi Sanit menekankan bahwa para mahasiswa harus berganti peran apabila menginginkan meneruskan perjalanan ke bidang politik, ia menginginkan gerakan mahasiswa tetap tinggal dalam kemurniannya sebagai pendobrak dan kekuatan moral.

Relevansi karya Arbi terhadap skripsi ini adalah memberikan gambaran awal mengenai kebangkitan pergerakan mahasiswa pada kisaran tahun 1990-an. Buku ini membantu penulis memahami isu-isu awal kebangkitan pergerakan mahasiswa (isu

---

<sup>25</sup>Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, (Yogyakarta: Insist Press, 1999).

lingkungan, HAM, suksesi nasional) pada era tahun tersebut. Kedekatan emosional antara Arbi Sanit dengan obyeknya (gerakan mahasiswa) semakin memberi bobot tersendiri dalam karya tersebut (juga kapasitas Arbi Sanit sebagai peneliti semakin menambah bobot ilmiah).

Buku kedua adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari LIPI yang dikoordinatori oleh Muridan Satrio Widjojo dan berhasil dibukukan dengan judul *Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*.<sup>26</sup> Buku setebal hampir 400 halaman ini berusaha mengupas gerakan mahasiswa sejak kurun waktu 1966 hingga 1998. Porsi penelitian lebih besar diarahkan pada gerakan mahasiswa di tahun 1998, dari delapan bab, empat diantaranya mengupas tentang gerakan mahasiswa '98. Buku ini secara detail mendeskripsikan gerakan mahasiswa berbagai kota di Indonesia diantaranya Yogyakarta, Semarang, Lampung, Malang, Surabaya, Jakarta dan Bandung. Termasuk aksi-aksi demo mahasiswa yang semakin marak pada Februari 1998. Pola-pola gerakan mahasiswa yang beraliran radikal dengan yang kompromistis digambarkan secara gamblang, misalnya dari simbol yang digunakan oleh kelompok radikal seperti PRD dan *onderbouw*-nya biasanya memakai warna bendera dominan merah atau hitam, mengepalkan tangan kiri keatas. Penelitian yang dilakukan oleh Muridan dilakukan dengan observasi langsung mengunjungi kantong-kantong aktivis pergerakan di berbagai kota sehingga tampak kedalaman analisa dan deskripsi yang ia lakukan.

---

<sup>26</sup>Muridan S. Widjojo et al, *Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999).

Buku ini membantu penulis dalam memetakan kekuatan kelompok pergerakan mahasiswa khususnya di Semarang. Walaupun deskripsi mengenai gerakan mahasiswa dalam buku ini belum menyeluruh namun sudah memberi gambaran kepada penulis bahwa gerakan mahasiswa di Semarang pun memiliki andil besar dalam gerakan mahasiswa secara nasional.

Buku ketiga adalah hasil editor dari Edward Aspinall dan Herbert Feith yang berjudul *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*.<sup>27</sup> Buku ini adalah hasil terjemahan dari edisi berbahasa Inggris yang berjudul *The Last Days of President Soeharto*. Karya dari Aspinall dan kawan-kawannya ini merupakan sebuah bunga rampai tulisan sehingga bisa dimulai membaca dari mana saja. Buku ini memberikan pemahaman bahwa dalam sejarahnya, Indonesia terlalu bergantung pada kejayaan ekonomi dan politik. Apabila kedua bidang kokoh maka akan kokoh pula Indonesia. Seperti yang telah banyak ditulis bahwa Orde Lama berdiri diatas legitimasi politik sedangkan Orde Baru berada diatas legitimasi ekonomi namun keduanya berakhir karena dasar dari masing-masing legitimasinya. Presiden Soeharto mungkin tidak akan *lengser* pada tanggal 21 Mei 1998 apabila kedua pondasi ekonomi dan politiknya tidak rapuh. Sebagaimana telah dikupas dalam beberapa literatur lain bahwa efek dari kebijakan ekonomi dan politik ini beraaaada pada pembentukan kebudayaan nasional yang *industrial oriented* dan militeristik.

---

<sup>27</sup>Aspinall, Edward (eds), *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*, (Yogyakarta: LKiS, 2000).

Relevansi buku ini terhadap skripsi adalah memberikan gambaran seputar kejatuhan atau hari-hari terakhir kekuasaan Soeharto serta faktor pencetus yang membuat demonstrasi mahasiswa semakin gencar.

Dari kajian-kajian pustaka diatas ternyata belum ada yang membahas mengenai gerakan mahasiswa di Semarang selama kurun waktu 1990-1998 secara khusus, sehingga hal ini memperkuat keaslian topik skripsi ini.<sup>28</sup>

#### **D. Kerangka Teoritis**

Penulisan sebuah skripsi memerlukan rangkaian fakta yang disusun secara kronologis dan analitis. Analisa sebuah peristiwa akan memerlukan teori yang relevan dengan masalah yang akan dikupas.

Gerakan mahasiswa di Semarang merupakan bentuk resistensi terhadap rezim yang sedang berkuasa di Indonesia yaitu Orde Baru, karena dilakukan oleh mahasiswa maka resistensi itu merupakan gerakan mahasiswa yang menunjukkan

---

<sup>28</sup> Mengenai kajian gerakan mahasiswa dalam bentuk skripsi di lingkungan Jurusan Sejarah Undip, penulis hanya menemukan satu bentuk skripsi yang mengkaji mengenai gerakan mahasiswa. Skripsi yang penulis temukan ini berjudul *Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Konsulat Semarang Dalam Memperjuangkan Tritura: Suatu Studi Tentang Gerakan Mahasiswa Pada Tahun 1965-1967*. Dilihat dari segi temporal dan objek kajian sudah jelas berbeda. Pada skripsi tersebut membahas mengenai peranan gerakan mahasiswa pada awal kebangkitan Orde Baru tahun 1965-1967 dengan skop spasial kota Semarang. Sedangkan saya (penulis) dalam skripsi ini justru membahas mengenai peranan gerakan mahasiswa dalam penumbangan rezim Orde Baru pada tahun 1990-1998. Jadi sudah jelas bahwa tidak terdapat unsur plagiat dalam skripsi yang penulis susun.

reaksi kolektif.<sup>29</sup> Sebagai reaksi kolektif maka perlawanan itu merupakan tindakan yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok-kelompok atau sekelompok orang yang setia kawan dan bersifat institusional atau ilegal.<sup>30</sup>

Sebuah perlawanan atau gerakan dipandang bersifat kolektif jika dilakukan beberapa pelaku, untuk memudahkan menganalisa evolusi gerakan mahasiswa di Semarang kurun waktu 1990-1998 maka penulis juga menggunakan teori Perilaku Bersama (*Collective Behavior*) dari Neil J Smelser sehingga diharapkan akan bisa memberi eksplanasi yang lebih jelas dan luas.<sup>31</sup> Menurut Smelser, determinan-determinan yang dapat menimbulkan tingkah laku kolektif (*collective behavior*) yang memunculkan perubahan adalah :

1. *Structural conduciveness*, yaitu suatu kondisi struktural yang mendukung atau mengakibatkan lahirnya gejolak sosial.

Keadaan Sosial, Ekonomi dan Politik di Indonesia selama kurun waktu tahun 1990-1998 menunjukkan sebuah instabilitas. Instabilitas di bidang politik misalnya isu suksesi nasional, hegemoni militer dan birokrasi, redemokratisasi kampus (paska NKK / BKK). Instabilitas dalam bidang ekonomi misalnya strategi pembangunan ekonomi Orde Baru yang mengandalkan bantuan dalam bentuk hutang dari luar negeri, dinasti ekonomi keluarga cendana, dan berpuncak pada krisis ekonomi 1997.

---

<sup>29</sup>Robert A. Goldberg, *Grassroots Resistance: Sosial Movement in Twentieth Century America*, (USA: Wadsworth Inc), hlm. 4-6.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm 7

<sup>31</sup>Neil J. Smelser, *Theory of Colective Behavior* (New York: A Free Press Paperback, 1971), hlm. 15-17.

Instabilitas dalam bidang sosial misalnya kasus penggusuran tanah demi pembangunan, perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme dan peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996. Segala instabilitas dalam bidang ekonomi, politik dan sosial disikapi mahasiswa dengan melakukan perlawanan secara *klandestein*.

2. *Structural strain* (ketegangan struktural), yaitu ketegangan struktural yang muncul dan mendorong munculnya suatu gerakan.

Ketegangan struktural merupakan hasil kristalisasi dari kondisi struktural. Ketegangan struktural yang dimaksud adalah tekanan-tekanan yang dilakukan negara terhadap rakyat dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Tekanan-tekanan ini berlangsung terus menerus selama era Orde Baru dibawah kendali presiden Soeharto.

3. *Growth and spread of generalized belief* (penyebaran keyakinan umum), yaitu sebelum suatu perilaku kolektif muncul, para pelaku perilaku kolektif harus mempunyai pandangan dan keyakinan umum yang sama mengenai sumber ancaman, jalan keluar, dan cara pencapaian jalan keluar tersebut.

Mahasiswa di Semarang mulai menyadari bahwa biang dari segala instabilitas adalah Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto maka dari itu Soeharto harus segera mundur baik secara konstitusional atau secara paksa. Mahasiswa Semarang pertama kali melakukan gerakan penyadaran adalah lewat Aksi Golput tahun 1992 lalu disusul dengan pembentukan jaringan elemen mahasiswa baik intern Semarang maupun dengan jaringan dengan kota lain. Gerakan perlawanan mahasiswa secara *klandestein* juga dilakukan oleh awak pers mahasiswa.

4. *The precipitating factor* (faktor pencetus), yaitu suatu peristiwa dramatis atau desas-desus yang mempercepat munculnya perilaku kolektif atau gejolak sosial.

Faktor pencetus ini adalah krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 serta yang terpenting adalah peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti pada bulan Mei 1998 di Jakarta. Sejak bulan Februari mahasiswa di Semarang telah sering melakukan demonstrasi-demonstrasi,

5. *Mobilization of participant for action*, yaitu mobilisasi untuk bertindak. Para pemimpin memulai, menyarankan, dan mengarahkan suatu kegiatan. Dalam setiap tindakan-tindakan yang dilakukan, fungsi dan peran seorang pemimpin sangat menentukan.

Represifitas Orde Baru dalam menindas gerakan mahasiswa yang berupaya menuntut reformasi telah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. pada kurun waktu bulan Mei (pasca Peristiwa Trisakti) di setiap kota, termasuk Semarang, aksi-aksi demonstrasi mulai marak dengan tuntutan Soeharto harus turun dari kursi kepresidenan.

6. *The operation of social control*, yaitu pelaksanaan kontrol sosial yang dilakukan oleh pemimpin gerakan, kekuatan aparat keamanan, perubahan kebijakan pemerintah hingga kontrol sosial lainnya.

Aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang marak berlangsung di Semarang tentu saja harus berhadapan dengan aparat keamanan yang notabene adalah alat pemerintah

dalam menjaga keamanan. Tak jarang metode bentrok antara mahasiswa *vis a vis* aparat keamanan sering terjadi.

Gerakan Mahasiswa di Semarang pada tahun 1990-1998 dapat dianalisis dengan teori Smelser tersebut, karena memuat kondisi-kondisi seperti tersebut di atas. Akhirnya kerapuhan pondasi ekonomi, instabilitas politik dan permasalahan sosial yang melanda Indonesia selama kurun waktu sewindu (1990-1998) telah mengeluarkan kekuatan mahasiswa di berbagai kota, termasuk Semarang, dalam menggulirkan reformasi.

#### **E. Metode Penelitian dan Penggunaan Sumber**

Penulisan sejarah juga memiliki metode seperti halnya pada ilmu alam dan ilmu sosial yang lain. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis merupakan suatu proses menganalisis dan menguji rekaman atau peninggalan masa lampau. Ada empat tahapan yang harus dilakukan dalam penulisan sejarah. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

Heuristik merupakan tahap pertama aktivitas pengumpulan sumber/data sejarah, baik sumber primer maupun sekunder.<sup>32</sup> Pengumpulan sumber ini sangat penting guna memperoleh data yang dibutuhkan baik secara tertulis maupun lisan. Sementara sumber-sumber sekunder berupa buku-buku dan artikel-artikel dalam

---

<sup>32</sup>Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Bahan Dokumenter*, dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, ( Jakarta: Gramedia, 1989), hlm 45; Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: BEntang, 1995), hlm. 94-97.

majalah yang diperoleh dari Perpustakaan wilayah Jawa Tengah, Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Diponegoro, Perpustakaan Universitas Diponegoro, Perpustakaan Mesiass (Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah). Sumber lisan juga digunakan untuk melengkapi sumber sekunder yang ada berupa wawancara dengan tokoh-tokoh gerakan mahasiswa tahun '90-98 dan masyarakat umum yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.<sup>33</sup>

Kritik Sumber adalah tahapan kedua dalam metode sejarah yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang otentik dan kredibel. Kritik sumber penting bagi peneliti untuk dapat menyaring informasi yang didapat selama proses pengumpulan data. Kritik sumber ekstern ialah kritik yang dilakukan untuk mengetahui otentisitas (keaslian) suatu dokumen.<sup>34</sup> Pada umumnya, arsip yang terdapat dalam lembaga resmi dapat segera diketahui otentisitasnya. Kritik yang kedua adalah kritik intern. Ini dilakukan untuk menguji kebenaran suatu dokumen,

---

<sup>33</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Waca, 1994), hlm. 23.

<sup>34</sup> Penulis mendapatkan dokumen mengenai pernyataan sikap PRD pasca Peristiwa Kudatuli 1996, pada dokumen tersebut disebutkan nama Mirah Mahardhika (ketua KPP PRD) yang tentu saja merupakan nama samaran atau *nickname* yang lazim digunakan dalam ranah pergerakan. Penulis kemudian men-*crosscheck* keaslian dan kebenaran dokumen tersebut kepada salah seorang mantan anggota KPP PRD (tidak mau disebutkan nama karena alasan keamanan). Dari pernyataan narasumber tersebut ternyata dokumen tersebut adalah benar adanya dan resmi dikeluarkan oleh KPP PRD. Sedangkan *nickname* Mirah Mahardhika dalam dokumen tersebut saat ini telah berprofesi sebagai salah seorang dosen muda di lingkungan Universitas Indonesia (penulis belum berani mengungkap siapa sebenarnya Mirah Mahardhika ini karena pertimbangan keamanan bagi pemilik *nickname* tersebut).

sehingga didapatkan data yang proporsional tentang informasi yang ingin disampaikan.<sup>35</sup>

Interpretasi merupakan tahap ketiga dari metode sejarah sebelum historiografi. Tahap ini bertujuan untuk membuat hubungan antara fakta yang sama dan sejenis. Tahap ini juga bertujuan untuk menafsirkan dan membandingkan fakta yang sudah terklarifikasi untuk diceritakan kembali. Dalam proses ini peran imajinasi sangat besar, karena imajinasi membantu sejarawan dalam merekat fakta yang telah disintesis dan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk kata dan kalimat, sehingga dapat dimengerti. Tahap ini menuntut daya imajinasi peneliti dalam menggambarkan suatu kejadian masa lalu, tentunya dengan tetap disiplin dengan jejak-jejak (*traces*) yang ada.

Tahap terakhir pada metode sejarah adalah historiografi yaitu tahap penulisan sejarah. Setelah sumber melewati tahap-tahap sebelumnya, maka siaplah mereka untuk dirangkai menjadi sebuah karya tulis yang ilmiah. Apabila semua tahap dilewati dengan benar maka akan menghasilkan karya sejarah yang diharapkan yaitu sebuah tulisan sejarah yang deskriptif-analitis dengan mengedepankan aspek keilmiahan yang tinggi serta aplikatif.

---

<sup>35</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992).

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini akan lebih mudah dipahami apabila disusun secara sistematis oleh karena itu penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I merupakan PENDAHULUAN yang berisi latar belakang permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan penggunaan sumber serta sistematika penulisan.

Bab II berjudul INDONESIA: SEWINDU AKHIR MASA ORDE BARU. Pada bab ini akan dibahas mengenai keadaan Sosial, Ekonomi dan Politik di Indonesia selama kurun waktu tahun 1990-1998. Keadaan Sosial, ekonomi dan politik ini penting karena bisa dikatakan merupakan bagian dari *structural conduciveness* (kondisi struktural yang mendukung lahirnya gejolak sosial) dan *structural strain* (ketegangan struktural yang muncul dan mendorong munculnya sebuah gerakan) menurut perilaku kolektif dari Neil J Smelser

Bab III berjudul MULAI BERGERAK: PERSEMAIAN IDE DAN PEMBENTUKAN JARINGAN (1990-1997). Pada bab ini akan dibagi menjadi dua periode yaitu tahun 1990-1992 (sebagai persemaian ide bagi gerakan mahasiswa di Semarang) dan periode 1993-1997 (sebagai kurun waktu pembentukan jaringan antar daerah dan penguatan wacana). Menurut teori dari Smelser, pada bagian ini bisa merupakan tahap *growth and spread of a generalized belief* (penyebaran keyakinan umum yang dianut para aktivis pergerakan mahasiswa)

Bab IV berjudul MENUMBANGKAN TIRANI: AKSI-AKSI REFORMASI DI SEMARANG TAHUN 1998. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai aksi-aksi Reformasi di Semarang selama kurun waktu bulan Februari hingga Mei 1998, dukungan masyarakat Semarang atas aksi mahasiswa, serta corak khas gerakan mahasiswa pada kurun 1990 hingga 1998 lalu bagaimana tindakan kontrol dari aparat keamanan. Menurut teori dari Smelser, tahap ini adalah *precipitating factor* (faktor pencetus yang dramatik yang memicu gejolak sosial) dan *mobilization for action* sekaligus *The operation of social control* (mobilisasi dari mahasiswa beserta komponen dari masyarakat untuk melakukan gerakan Reformasi serta bagaimana bentuk kontrol dari aparat keamanan)

Bab V merupakan SIMPULAN.

## BAB II

### INDONESIA: SEWINDU AKHIR MASA ORDE BARU (1990-1998)

Indonesia dalam sewindu akhir masa kekuasaan presiden Soeharto atau lebih dikenal dengan rezim Orde Baru menampilkan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang dinamis. Kondisi umum Indonesia pada kurun waktu tersebut tidak bisa begitu saja dilepaskan dari objek kajian skripsi ini. Gambaran politik, ekonomi dan sosial Indonesia sangat diperlukan untuk memahami Gerakan Mahasiswa yang semakin menguat pada periode 1992 sampai 1998.

#### A. Kondisi Politik Indonesia 1990-1998

##### 1. Isu Suksesi Nasional

Orde Baru selama kurun waktu hampir tiga puluh tahun telah berhasil mempertahankan stabilitas politik dan menjalankan program pembangunan ekonominya. Namun dibalik semua keberhasilan itu, Orde Baru juga tak dapat lepas dari beberapa kelemahan yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Kelemahan-kelemahan itu adalah pertama pada kesenjangan ideologis antara Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi murni. Kedua, ketegangan antara birokrat sipil-militer. Ketiga, pembelahan politik massa terutama kesenjangan antara Jawa dengan Non Jawa. Keempat, ketimpangan akibat kebijakan ekonomi yang ditempuh Orde Baru, dan yang kelima adalah masalah suksesi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>R. William Liddle, *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1992).

Transformasi dari rezim birokratik-otoriter ke bentuk rezim yang lain lebih didorong oleh adanya perpecahan dalam rezim itu sendiri. Pada kasus Orde Baru, permasalahan suksesi merupakan sumber dari munculnya perpecahan di kalangan elit. Permasalahan pada kasus Orde Baru ini menjadi menarik karena kekuasaan presiden sebagai puncak kekuasaan eksekutif sangat besar jika dibandingkan dengan rezim militer lainnya.<sup>37</sup> Kekuasaan yang dibangun oleh Soeharto pertama kali dibangun melalui sebuah kabinet kecil, kemudian dibentuk Staf Pribadi Presiden meskipun pada akhirnya dibubarkan karena Peristiwa Malari 1974. Upaya Soeharto untuk membangun kekuasaan masih berjalan dengan adanya lembaga Sekretariat Negara.<sup>38</sup> Soeharto berhasil menguasai Golkar sepenuhnya pada tahun 1983 yaitu pada Munas III. Pada Munas itu, Soeharto terpilih menjadi Ketua Dewan Pembina. Hal ini memberikan gambaran bahwa Soeharto berusaha mencari dukungan kekuatan dari kekuatan sipil.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Guillermo O'Donnel, dkk (eds). *Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Eropa Selatan* (Jakarta: LP3ES, 1992).

<sup>38</sup>lembaga ini menjadi birokrasi yang kuat dan sangat otonom bahkan dari militer sekalipun. Lembaga Sekretariat Negara ini dalam bukunya Mochtar Mas'ood disebutnya suprabirokrasi. Mochtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989).

<sup>39</sup>Kekuasaan presiden yang sedemikian besar ini mendorong munculnya persaingan di kalangan elit menjelang pemilihan wakil presiden pada Sidang Umum MPR bulan maret 1988. Posisi wakil presiden menjadi sangat strategis karena Soeharto mungkin tidak akan secara penuh menyelesaikan kewajibannya sebagai presiden secara penuh (1988-1993). Hal ini menimbulkan konflik diantara para elit (antara Soedharmono dan Moerdani). Didik Supriyanto, *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK* (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hlm.52.

Pembicaraan mengenai suksesi kepemimpinan nasional selalu ramai ketika setiap kali akan diadakan Pemilu dan Sidang Umum MPR. Pemilu 1992 yang diprediksi akan terjadi suksesi kepemimpinan nasional ternyata juga menyisakan kegagalan. Pada pemilu 1992 dan Sidang Umum 1993 ternyata hanya ada satu calon tunggal. Analisa dari beberapa pengamat politik mengenai Indonesia bahwa akan terjadi pergantian kepemimpinan pada Sidang Umum 1993 pun meleset.<sup>40</sup> Ada tiga kemungkinan untuk menjelaskan hal ini yaitu adanya *invisible hands* yang tidak menginginkan terjadi suksesi pada tahun 1993, budaya politik yang berintikan pada rasa *rikuh* dan *ewuh-pakewuh*,<sup>41</sup> dan kekuatan sosial politik saat itu masih diliputi keraguan dan spekulasi mengenai suksesi yang memiliki resiko tinggi maka tidak dilakukan perubahan terhadap *status quo*.

Kepemimpinan nasional yang telah berlangsung sejak 1967 hingga tahun 1998 berarti telah berjalan selama 31 tahun, kepemimpinan nasional atau elit yang telah berlangsung sedemikian lama ini akan melahirkan kultus individu. Pengkultusan

---

<sup>40</sup>Amien Rais, Suksesi Kepemimpinan Nasional, dalam Riza Noer Arfani (eds), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Raja Grafindo), hlm 242.

<sup>41</sup>Pada budaya Jawa dikenal konsep keselarasan, konsep ini dianggap mencegah konflik dan menjaga kerukunan semua unsur dan juga mencegah kosmos berantakan. Usaha menjaga keselarasan ini diwujudkan dalam sistem nilai yang memberi penekanan pada usaha menjauhi konflik. Eriyanto, *Kekuasaan Otoriter: Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni. Studi Atas Pidato-Pidato Politik Soeharto*. (Yogyakarta: Insist Press, 2000), hlm 45.

individu semacam itu akan mematikan demokrasi karena dalam demokrasi dikenal suksesi atau rotasi atau regenerasi elit dengan mekanisme yang telah diatur.<sup>42</sup>

## 2. Hegemoni Militer dan Birokrasi

Penguasaan militer terhadap seluruh lembaga kenegaraan dimulai sejak 1965 paska G30S, Soeharto mengembangkan apa yang saat ini dikenal sebagai komando teritorial. Disamping pengembangan kekuasaan teritorial juga dibangun jaringan intelijen secara ekstra yaitu melalui Kopkamtib dan BAKIN. Kekuasaan teritorial dan peranan dwifungsi ABRI membentang mulai dari pusat sampai ke desa.<sup>43</sup> Kekuasaan teritorial itu menandingi kekuasaan birokrasi sipil dan hal itu terjadi karena seluruh jajaran birokrasi sipil itu tak luput pula dikuasai oleh para perwira militer, baik yang aktif maupun purnawirawan. Akibatnya otonomi lembaga pemerintahan menjadi kerdil, termasuk Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.<sup>44</sup>

Peter Britton dalam bukunya *Profesionalisme Dan Ideologi Militer Indonesia* mengungkapkan;

“...bagian teritorial dari Angkatan Darat memastikan kehadirannya di setiap kota dan di sementara daerah, di setiap daerah, di setiap desa dengan tugas memelihara keamanan, mengawasi kegiatan-kegiatan aparat pemerintahan sipil dan bertindak sebagai pengawas-pengawas politik. Para perwira militer, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, semakin banyak yang beralih kepada kedudukan-kedudukan penting sebagai pejabat-pejabat

---

<sup>42</sup>Amien Rais, *Op.cit.*, hlm 248

<sup>43</sup>Daniel S. Lev, “ ABRI dan Politik: Politik dan ABRI,” dalam *Diponegoro 74*, Jurnal HAM dan Demokrasi, No.7/III/April 1999, YLBHI, hlm.10-11.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm 11.

pemerintah. Pemerintah daerah, pemerintah pusat dan industri, semuanya menjadi berada dibawah pengendalian AD”<sup>45</sup>

ABRI telah menjadikan perannya ber-dwifungsi itu sebagai senjata utama untuk mematikan segala bentuk kehidupan yang demokratis. Dalam posisi seperti itu, ABRI (terutama dari kalangan TNI AD) menjadi satu-satunya institusi politik yang berkuasa dan dapat mengatur sendiri seluruh kehidupan masyarakat. Dwifungsi ABRI bukan saja memonopoli politik dan makna politik tetapi juga menyumbang secara luar biasa bagi kerusakan kelembagaan kenegaraan, karena seluruh lembaga negara diposisikan berada dibawah kekuasaan institusi militer.<sup>46</sup>

Selain kekuasaan militer yang sedemikian meng-hegemoni di Indonesia, kekuasaan birokrasi pun tak kalah kuat. Selama pemerintahan presiden Soeharto, kekuasaan birokrasi menunjukkan seperti sebuah “piramida yang berujung lancip” dengan presiden Soeharto sendiri sebagai puncaknya. William Liddle memberikan satu pendekatan yang menekankan pada besarnya peranan individu pemimpin yang terlibat dalam kancah politik domestik, meskipun terdapat kelompok kepentingan lain dalam setiap pengambilan kebijakan di Indonesia.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Peter Britton, *Profesionalisme Dan Ideologi Militer Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm 126.

<sup>46</sup>KontraS, *Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia* (Jakarta: KontraS, 2005), hlm 8.

<sup>47</sup>William R Liddle, *Leadership and Culture in Indonesian Politic* (Allen and Unwin, 1996), hlm 40

Kekuasaan yang tersentralisasi pada diri presiden Soeharto tidak dapat secara serta merta membuat dirinya sebagai diktator karena ada kekuatan lain, sebagai imbalan, yaitu militer.<sup>48</sup> Pada kurun waktu 1990-an terjadi transformasi hubungan antara presiden Soeharto dan ABRI (militer). Perubahan ini terjadi berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada Sidang Umum tahun 1993. Soeharto mulai mendekati golongan Islam lewat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sehingga pada waktu itu muncul poros Soeharto-Habibie-ICMI. Kedekatan Soeharto terhadap golongan Islam ini mengingatkan pada era 60-an, pada saat itu ia merangkul golongan Islam untuk menghancurkan PKI. Pada konteks waktu 1990-an ini, kedekatan Soeharto terhadap golongan Islam digunakan untuk membendung kekuatan oposisi baru yang sedang berkembang di Indonesia.<sup>49</sup>

### **3. Redemokratisasi kampus**

Perjuangan demokratisasi kampus merupakan tugas fundamental yang harus dilakukan oleh organisasi mahasiswa, artinya bahwa setiap organisasi mahasiswa

---

<sup>48</sup> Mochtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES), hlm 18

<sup>49</sup> Keberadaan hubungan tidak disukai oleh petinggi ABRI khususnya dari kubu Moerdani, yang dahulu dikenal dengan poros Soeharto-Moerdani-CSIS. Jun Honna, *Military Ideology In Response to Democratic Pressure During The Late Sharto Era: Political and Institution* dalam *Indonesia* edisi April 1999.

baik intra kampus maupun ekstra kampus harus mampu menjalankan fungsinya sebagai pelayan massa mahasiswa untuk memenuhi hak-hak sosial ekonominya.<sup>50</sup>

Peran lembaga mahasiswa (BEM dan Senat Mahasiswa) sangatlah lemah dan memposisikan dirinya eksklusif dari kepentingan massa mahasiswa khususnya dalam menyalurkan aspirasi perjuangan mahasiswa, yang terjadi justru saling benturan antar-organisasi di kampus hanya karena orientasi politik. Mahasiswa yang sangat pragmatis yang mempunyai kecenderungan merapat dan tunduk dengan birokrasi kampus, elite politik lokal maupun elite politik tingkat nasional, sehingga mereka hanya dijadikan sebagai kaki tangan untuk melancarkan kepentingan-kepentingan elite.

Usaha menemukan kembali demokrasi di kampus pada masa Orde Baru memiliki sejarah yang panjang. Orde Baru pada awal pembentukannya merupakan aliansi segitiga antara militer, teknokrat dan mahasiswa. Namun aliansi ini tidak bertahan lama karena terdapat perpecahan sendiri pada kubu mahasiswa sedangkan militer dan teknokrat semakin kuat dalam membangun kekuasaan. Memasuki tahun 1970, mahasiswa memiliki peran sebagai kekuatan moral bukan lagi kelompok elit politik. Kritik mahasiswa terhadap keadaan sosial politik negara harus berhadapan dengan kekuatan rezim Orde Baru. Tindakan pemerintah dalam mengatasi kritik ini berwujud kekerasan seperti yang terjadi pada peristiwa Malari 1974.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Hayamwuruk*,. No. 2 Th. VII/1992, hlm 58

<sup>51</sup> Francois Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974* (Jakarta: LP3ES, 1985).

Gerakan mahasiswa kembali menyeruak pada tahun 1978 dengan menggunakan momentum pemilu 1977 sebagai tonggak gerakan. Pada Sidang Umum tahun 1978, pimpinan Dewan Mahasiswa (DEMA) dari universitas di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Palembang dan Medan mengeluarkan pernyataan bersama dan berdemonstrasi menentang pencalonan kembali Soeharto. Pemerintah melalui Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Soedomo segera melakukan tindakan penumpasan atas gerakan ini. Pangkopkamtib segera mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 21 Januari 1978 mengenai pembubaran Dewan Mahasiswa semua universitas. Upaya pemerintah ini diperkuat lagi dengan keluarnya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dari Menteri Pendidikan Daoed Joesoef pada tanggal 19 April 1978. Pada tanggal 24 februari 1979 dibentuk Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) di setiap perguruan tinggi.<sup>52</sup>

Depolitisasi kampus akibat adanya kebijakan NKK/BKK bertahan selama 12 tahun. Pada tahun 1990, pemerintah mengumumkan berlakunya organisasi mahasiswa Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi melalui PP no 30/1990 mengenai Sistem Pendidikan Tinggi yang diikuti terbitnya SK no. 0457/U/1990. Kebijakan ini selain berisi otonomi keilmuan dan pengelolaan keuangan juga mengisyaratkan berlakunya kembali wadah tunggal mahasiswa di tingkat universitas. Mahasiswa masih bersikap skeptis menerima kebijakan ini bahkan cenderung curiga atas semua

---

<sup>52</sup>Suharsih dan Ign Mahendra, *Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia* (Yogyakarta: Resist book, 2007), hlm. 85-87.

kebijakan dari pemerintah, namun tidak semua mahasiswa apriori terhadap kebijakan SMPT ini.<sup>53</sup>

Keberadaan kelompok-kelompok alternatif seperti pers mahasiswa, kelompok studi atau kelompok independen lainnya telah mampu memberikan pilihan alternatif bagi aktivitas mahasiswa. Pers mahasiswa dan kelompok mahasiswa lain yang tidak terikat dengan pihak fakultas dan universitas telah mendapatkan posisi strategis dalam memberikan arah baru pada kehidupan politik dan dinamika sosial dikampus.<sup>54</sup>

## **B. Kondisi Ekonomi Indonesia 1990-1998**

### **1. Strategi Pembangunan Ekonomi Orde Baru**

Berdasarkan pengalaman sejarah, sistem ekonomi pasar selalu mengalami pasang surut yang dapat digambarkan dalam sebuah kurva konjungtur ekonomi. Kurva tersebut terdiri dari beberapa bagian, antara lain: masa pertumbuhan, masa puncak kemakmuran (*peak of wealth*), masa kemunduran, masa keterpurukan (*peak of crises*). Setelah krisis dapat teratasi, maka disambung dengan masa pemulihan, dan pertumbuhan. Berdasarkan pengalaman sejarah Indonesia sejak era kemerdekaan sampai sekarang, panjang gelombang tersebut dapat dikategorikan dalam gelombang jangka pendek (tujuh tahunan) dan gelombang jangka panjang (35 tahunan).

---

<sup>53</sup>Irine H Gayatri, Arah baru Perlawanan Gerakan Mahasiswa 1989-1993, dalam Muridan S Widjojo et.al. *Penakluk Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

<sup>54</sup>*Hayamwuruk* No 2 Th VII/ 1992, hlm 35

Gelombang jangka pendek tujuh tahunan dapat diringkas sebagai berikut.

“..1945 - 1952 Ekonomi Perang  
 1952 - 1959 Pembangunan Ekonomi Nasional  
 1959 - 1966 Ekonomi Komando  
 1966 - 1973 Demokrasi Ekonomi  
 1973 - 1980 Ekonomi Minyak  
 1980 - 1987 Ekonomi Keprihatinan  
 1987 - 1994 Ekonomi Konglomerasi  
 1994 - 2001 Ekonomi Kerakyatan.”<sup>55</sup>

Masing-masing tahap dalam siklus tersebut telah ditandai dengan ciri-ciri khusus yang tidak terdapat pada periode sebelum dan sesudahnya. Misalnya, pada periode Ekonomi Konglomerasi, periode ini dipicu oleh liberalisasi sektor perbankan, yang disusul dengan tumbuhnya imperium usaha konglomerasi.

Konglomerasi non Pribumi muncul seiring dengan perkembangan perekonomian nasional, hal ini dipicu dengan adanya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan pemerintah pada awal tahun 80-an.<sup>56</sup> Pengusaha non pribumi di Indonesia memegang peranan dalam bidang ekonomi yang tidak kecil, dengan jumlah hanya 5% dari penduduk Indonesia namun dapat menguasai 70%

---

<sup>55</sup>Mubyarto, "Siklus Tujuh Tahunan Ekonomi Indonesia (1931-1966-2001-2036)", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16 No. 3, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 2000, hlm. 246.

<sup>56</sup>Berakhirnya era *boom* minyak pada pertengahan tahun 1970-an membuat pemerintah memutar haluan kebijakan ekonomi ke pendekatan liberal. Deregulasi yang dilakukan menyangkut sektor perbankan dan perdagangan. Reformasi kebijakan Orde Baru ini berlangsung selama kurun waktu 1986 hingga 1996. Zaim Saidi, *Soeharto Menjaring Matahari*. (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 96-98

perekonomian nasional. Penguasaan ini ditunjang dengan struktur modal yang kuat, kemampuan manajemen yang teratur, penyerapan teknologi dan penguasaan pasar.<sup>57</sup>

Pada masa Orde Baru ditandai dengan pembangunan ekonomi bersifat sentralistis, rezim penguasa yang otoriter, serta birokrasi yang korup. Pembangunan tersebut akhirnya mengantar Indonesia ke arah periode krisis yang menyakitkan. Perekonomian Indonesia selama tiga puluh tahun dibawah pemerintahan Presiden Soeharto, 1967 sampai 1997, semakin erat terkait dengan perekonomian global. Pembangunan ekonomi di Indonesia semakin mengandalkan modal asing baik dalam bentuk utang atau penanaman modal.<sup>58</sup>

Sementara itu di bidang industri juga semakin mengandalkan barang impor untuk kemudian diekspor kembali di mancanegara. Bahkan Indonesia sudah berani menyatakan diri bergabung dengan organisasi-organisasi ekonomi liberal baik di tingkat regional (AFTA) dan global (APEC dan WTO).<sup>59</sup> Rezim Orde baru yang

---

<sup>57</sup>Valina Singka Subekti, Konglomerasi Non-Pribumi dan Pengaruh Politiknnya, dalam Lab. Ilmu Politik FISIP UI, *Evaluasi Pemilu Orde Baru*. (Jakarta: Mizan, 1997), hlm. 46.

<sup>58</sup>Pinjaman lunak dan hibah ini diberikan melalui konsorsium IGGI (*Inter Government Group for Indonesia*) yang dipimpin belanda sejak 1967 namun pada tahun 1992 IGGI dibubarkan dan diganti dengan konsorsium baru bernama CGI (*Consultative Group for Indonesia*) dengan anggota minus Belanda. Pembubaran IGGI ini dipicu tindakan J.P Pronk, Menteri Pembangunan Belanda yang merangkap ketua IGGI, yang dinilai mengkritik kebijakan Orde Baru. Presiden Soeharto tidak menyukai hal ini sehingga memutuskan sementara hubungan bantuan dengan Belanda pada tahun 1992. Zaim Saidi, *op.cit.*, hlm 147-148.

<sup>59</sup>Alexander Irwan, *Jejak-Jejak Krisis di Asia* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 198-99.

berkuasa di Indonesia selama 32 tahun telah memperlihatkan watak *dirigist*<sup>60</sup> yang sangat kental serta bersifat patrimonialisme<sup>61</sup>.

## 2. Dinasti Ekonomi Keluarga Cendana

Bisnis kroni menurut Yoshihara Kunio adalah bisnis milik swasta yang memperoleh keuntungan besar dari kedekatannya dengan pejabat, dalam hal ini adalah kepala negara. Praktek kroni ini sudah mengakar jauh dalam setiap sendi kehidupan di Indonesia. Hampir semua pejabat dari tingkat pusat hingga daerah, dari pejabat militer maupun sipil, memberikan fasilitas khusus kepada kroni-kroninya dengan tujuan mendapat keuntungan maksimal dari hubungan ini.<sup>62</sup>

Keluarga Cendana merupakan pusat dari kekuasaan yang tidak tersentuh dan aktivitasnya cenderung tertutup. Praktek bisnis ekonomi Keluarga Cendana yang mereka bangun dinilai tidak wajar oleh sebagian kalangan masyarakat. Kekayaan

---

<sup>60</sup>Dirigisme adalah kecenderungan negara untuk melakukan intervensi pada pengelolaan kegiatan sosial kemasyarakatan maupun ekonomi.

<sup>61</sup>Patrimonialisme adalah sistem politik dimana penguasa mencari dukungan yang dibangun berdasarkan pertukaran kepentingan materi sebagai imbal jasa bagi penghormatan dan loyalitas bawahan kepada atasan.

<sup>62</sup>Soesilo, *Monopoli Bisnis Keluarga Cendana*. (Depok: Permata, 1998), hlm 100.

ekonomi dan jaringan bisnis Keluarga Cendana tidak dimulai dari tahap awal perintisan dan berangkat dari usaha kecil.<sup>63</sup>

Keluarga besar Cendana masing-masing anggota keluarganya memiliki sumber kekayaan dan jaringan bisnis sendiri-sendiri.<sup>64</sup> Jaringan bisnis mereka meliputi yayasan, perusahaan, dan persekutuan dagang yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>65</sup>

Jumlah yayasan yang terbit dari lingkungan istana kepresidenan, Sekretariat Negara dan Lingkungan Cendana sebanyak 40 buah, Presiden Soeharto sendiri mengetuai sekitar dua belas yayasan.<sup>66</sup> Sedangkan almarhum ibu Tien Soeharto

---

<sup>63</sup>Kesuksesan bisnis Keluarga Cendana ini sering disebut dengan bisnis maksa dan mengandalkan nama besar ayahnya, Presiden Soeharto. Wimanjaya K Liotohe, *Primadosa*. (Jakarta: Yayasan Eka Fakta Kata, tanpa tahun). Bagian lampiran.

<sup>64</sup>Anggota Keluarga Cendana adalah Soeharto, Siti Hartienah (bu Tien), Sigit Hardjojudanto (sigit), Siti Herdiyati Rukmana (tutut), Bambang Trihadmodjo (bambang), Siti Hedianti Heriyati Prabowo (titik), Hutomo Mandala Putra (tomi), Siti Hutami Endang Adiningsih (mamik).

<sup>65</sup>Yayasan-yayasan itu mendapatkan sumbangan dana dengan himbauan, permintaan, bahkan jika diperlukan diperkuat dengan keputusan menteri dan presiden. Sedangkan perusahaan bisnis yang dikembangkan putra-putri Soeharto biasanya menggunakan nama besar Soeharto untuk mendapatkan proyek. M.J Kasiyanto, *Mengapa Orde Baru Gagal ?* (Jakarta: Cakra Media. 1999), hlm 31.

<sup>66</sup>Yayasan Supersemar, Yayasan Dharmais, Yayasan DAKAB (Dana Abadi Karya Bakti), Yayasan ABMP (Amal Bakti Muslim Pancasila), Yayasan Serangan Umum 1 Maret, Yayasan Bantuan Beasiswa Yatim Piatu Trikora, Yayasan Dwikora, Yayasan Seroja, Yayasan Nusantara Indah, Yayasan Dharma Kusuma, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

mengetuai empat yayasan yaitu Yayasan Harapan Kita, Yayasan Kartika Chandra, Yayasan Kartika Djaja dan Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan.<sup>67</sup>

Putra tertua mereka yaitu Sigit Hardjojudanto adalah salah satu pemilik Humpuss Group Indonesia (memiliki saham 40 %) dan investor di berbagai perusahaan.<sup>68</sup> Putri kedua adalah Siti Herdiyati Rukmana atau lebih sering dipanggil Tutut, dia lebih dikenal dengan sebutan ratu jalan tol di Indonesia karena keterlibatannya dalam pembangunan jalan tol swasta pertama. Ketika jalan bebas hambatan ini pertama kali dibuka pada tahun 1989, yang muncul adalah keluhan mengenai tingginya tarif tol.<sup>69</sup> Bambang Trihadmodjo, putra ketiga, dan Siti Hediati Heriyati, putri keempat sekaligus istri Prabowo Subianto, juga melakoni hidup sebagai pebisnis.<sup>70</sup> Putra kelima adalah Hutomo Mandala Putra, dikenal sebagai putra Soeharto paling flamboyan dan pebisnis handal. Ia juga mengetuai BPPC (Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh) yang dinilai terlalu memonopoli perdagangan cengkeh. Putra kelima Soeharto ini juga pernah tersangkut mengenai proyek mobil nasional yang dinilai mendapat perlakuan khusus dalam hal pembayaran pajak barang

---

<sup>67</sup>Wimanjaya K Liotohe, *op. cit.*, hlm 33

<sup>68</sup>Wimandjaja, *op.cit.*, bagian lampiran

<sup>69</sup>*Ibid*

<sup>70</sup>Keterlibatan mereka dalam bisnis tentu saja memberi nilai tambah bagi kolega mereka, setidaknya dengan melibatkan anak-anak presiden tentu saja ada fasilitas kemudahan seperti perizinan. *Ibid*

mewah.<sup>71</sup> Putri paling bungsu yaitu Siti Hutami Endang Adiningsih (mamik) juga memiliki bisnis properti walaupun tidak sebesar kakak-kakaknya.

### 3. Krisis Ekonomi 1997

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 bermula dari jatuhnya nilai tukar mata uang Thailand (*baht*) dan kemudian meluas ke seluruh kawasan Asia tak terkecuali Indonesia. Penurunan nilai tukar mata uang Indonesia (rupiah) terhadap dollar Amerika memaksa pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto untuk menerima bantuan ekonomi bersyarat dari *International Monetary Fund* (IMF).<sup>72</sup>

Krisis ekonomi - yang dipicu oleh krisis moneter - telah memberikan indikasi yang kuat terhadap tiga hal. Pertama, kredibilitas pemerintah telah sampai pada titik nadir. Penyebab utamanya adalah karena langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam merespon krisis selama ini lebih bersifat "tambal-sulam".<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Zaim Saidi, *op.cit.*, hlm 117-123

<sup>72</sup>Sebelum bulan Juli 1997 nilai mata uang Dollar terhadap rupiah adalah Rp. 2.900 per 1\$, kemudian terus menurun hingga pada kisaran Rp. 14.000 per 1\$. Syarat-syarat yang diajukan oleh IMF dan harus diterima Indonesia adalah pencabutan semua bantuan subsidi terhadap semua barang kebutuhan pokok, listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Setelah semua syarat ini diterima pemerintah Soeharto, harga BBM rata-rata naik 47 persen dan harga listrik naik sebesar 60 persen. Secara tidak proporsional beban berat ini adalah diterima oleh lapisan terbawah dari masyarakat. Allan Wood dan Ted Grant, *Indonesia: Revolusi di AsiaTelahDimulai*.[http://www.geocities.com/frontnasiona/marxisme\\_dan\\_perjuangan\\_melawan.htm](http://www.geocities.com/frontnasiona/marxisme_dan_perjuangan_melawan.htm) (dikunjungi pada 7 Desember 2007).

<sup>73</sup>Kwik Kian Gie, *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*. (Jakarta: Gramedia., 1998).

Kedua, rezim Orde Baru yang selalu mengedepankan pertumbuhan (*growth*) ekonomi telah menghasilkan *crony capitalism* yang telah membuat struktur perekonomian menjadi sangat rapuh terhadap gejolak-gejolak eksternal.<sup>74</sup>

Ketiga, rezim yang sangat korup telah membuat sendi-sendi perekonomian mengalami kerapuhan. Secara umum, segala bentuk korupsi akan mengakibatkan arah alokasi sumber daya perekonomian menjurus pada kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan tidak memberikan hasil optimum. Dalam kondisi seperti ini pertumbuhan ekonomi memang dapat terus berlangsung, bahkan pada intensitas yang relatif tinggi. Namun demikian, sampai pada batas tertentu pasti akan mengakibatkan melemahnya basis pertumbuhan.

Perekonomian Indonesia adalah yang paling parah akibat krisis ekonomi ini, sementara pada bulan Maret 1998 perekonomian di Thailand dan Korea Selatan sudah mulai menunjukkan titik balik kearah pemulihan (*recovery*). Krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto ini disebabkan pembangunan ekonomi Indonesia yang terlalu bergantung pada luar negeri, kegiatan ekonomi didominasi oleh segelintir orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, kemudian kekuasaan Presiden Soeharto yang sedemikian lama

---

<sup>74</sup>Industri manufaktur yang sempat dibanggakan ternyata sangat bergantung pada bahan baku impor dan tak memiliki daya tahan. Sementara itu, sektor pertanian pun juga tak kunjung muncul sebagai penopang laju industrialisasi. Sistem politik yang dibangun Soeharto selama tiga puluh tahun ternyata telah merusak dan merapuhkan tatanan perekonomian. Memang disatu sisi pertumbuhan ekonomi yang telah dihasilkan cukup tinggi, namun mengakibatkan ekses yang akibatnya justru tidak mendukung bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Indra Ismawan, *Dimensi Krisis Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1998)

telah menciptakan sistem yang korup sehingga implikasi dari semua ini adalah sebuah sistem tanpa pengawasan.<sup>75</sup>

### **C. Kondisi Sosial Indonesia 1990-1998**

#### **1. Penggusuran demi Pembangunan**

Pemerintah Orde Baru menyusun suatu strategi pembangunan yang pada hakikatnya tidak menempatkan masalah “Reforma Agraria” sebagai dasar pembangunan. Alasan-alasan itu antara lain: (1) Demi kelangsungan suatu pemerintahan yang baru lahir, maka stabilitas merupakan prioritas utama dan secara politis masalah kecukupan pangan merupakan faktor strategis untuk menangkal keresahan. (2) Orde Baru pada saat yang kurang lebih bersamaan dengan mulainya Revolusi Hijau di Asia. Bisa dipahami bahwa jalan pragmatis menjadi pilihan. Peningkatan produksi pangan melalui Revolusi Hijau kemudian menjadi titik sentral pembangunan selama lima Pelita, dan selama itu pula masalah pertanahan seolah-olah menjadi hilang dari ingatan.<sup>76</sup>

Pemerintahan Orde Baru dalam hal kebijaksanaan agraria, mengambil jalan apa yang sekarang dikenal sebagai *by-pass approach*, atau pendekatan jalan pintas. *by-pass approach* itu diabdikan untuk menjalankan strategi pembangunan yang

---

<sup>75</sup>Alexander Irwan, *op.cit.*, hlm 200

<sup>76</sup>Tim Lapera, *Prinsip-prinsip Reforma Agraria* (Jogjakarta: Lapera Utama Pustaka, 2001).

ditandai oleh ciri pokok; mengandalkan bantuan asing, hutang dan investasi dari luar negeri, serta bertumpu pada yang kuat.<sup>77</sup>

Permasalahan penggusuran tanah pada awal tahun 1990 menjadi sebuah permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat. Paling tidak terdapat sembilan kasus penggusuran tanah besar-besaran yang terjadi di Jawa dan Sumatera.<sup>78</sup> Kemunculan kasus-kasus penggusuran tanah telah menstimulus mahasiswa untuk bergerak membela hak rakyat yang terampas serta mulai mengorganisir aksi bersama rakyat dengan mengungkap isu kasus-kasus penggusuran tanah.

Kasus pembangunan waduk Kedung Ombo merupakan salah satu kasus pertanahan yang cukup menyita perhatian publik pada awal dekade 90-an. Penggusuran yang dilakukan pemerintah, dengan bantuan dana dari Bank Dunia, atas lahan rakyat disekitar waduk Kedung Ombo mendapatkan perhatian dari kalangan mahasiswa dengan melakukan aksi-aksi pembelaan hak rakyat yang hilang akibat pembangunan waduk ini. Kelompok aksi mahasiswa yang intens melakukan pembelaan ini adalah Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Kedung Ombo (KSKPKO) yang merupakan sebuah jaringan koordinasi aktivis gerakan antar kota diantaranya dari Semarang, Salatiga, Solo, Yogyakarta, Bandung dan Jakarta. Aksi-

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm

<sup>78</sup>Dam Koto Panjang (Riau), perkebunan kopi Pulau Panggung (Lampung selatan), lapangan golf Cimacan, perkebunan teh Badega (Garut), pangkalan udara Jatiwangi (Majalengka), Dam Kedungombo (Jawa Tengah), pabrik Petrokimia (Jawa Tengah), pangkalan marinir Belanggu (Jatim) dan pembangunan kawasan Urip Sumohardjo (Jawa Timur). Anton Lucas, *Land Disputes in Indonesia*. dalam *Indonesia* edisi April no 23 tahun 1992, hlm 81.

aksi yang pernah dilakukan KSKPKO ini diantaranya dilakukan di Depdagri Jakarta dan Kodim Boyolali Jawa Tengah.<sup>79</sup>

## 2. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pembangunan ekonomi selama rejim Orde Baru secara fisik cukup berhasil, namun secara fundamental sangat rapuh. Orientasi pembangunan selama rejim Orde Baru secara konseptual juga meyakinkan. Namun, secara praktis dan operasional sangat buruk dan tidak efisien. Permasalahan mengenai Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) telah menyebar mulai dari aparat desa sampai aparat pemerintah pusat, baik eksekutif dan legislatif maupun lembaga-lembaga negara yang lain. Konglomerasi yang merugikan, serta praktek-praktek monopoli dan kartel yang menyengsarakan masyarakat umum telah terjadi di berbagai industri dan pasar komoditas.<sup>80</sup>

Sektor bisnis yang ada di Indonesia telah dimasuki oleh perusahaan milik Keluarga Cendana dan orang-orang terdekat mereka. Mulai dari jasa perbankan, konstruksi, perkebunan, otomotif, industri pangan, kehutanan. Tidak salah bila ada sebagian masyarakat yang menganggapnya sebagai suatu Kerajaan Bisnis.<sup>81</sup> Besarnya kerajaan bisnis tersebut dan faktanya dalam memasuki berbagai bidang bisnis

---

<sup>79</sup>Irine H Gayatri, *op.cit.*, hlm 89; diperkuat wawancara dengan Tri Budiyanto dan Basa Basuki pada tanggal 7 dan 12 Februari 2008.

<sup>80</sup>E. Gumbira-Sa'id dan A. Harizt Intan, Reorientasi Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era Reformasi : Peranan Sektor Agribisnis dan Agroindustri. *Usahawan*, No. 10 tahun XXVII Oktober 1998, hlm 18

<sup>81</sup>Monopoli impor baja dan timah oleh Bob Hasan; monopoli tepung terigu oleh Bogasari atau Salim Group. *Ibid.*, hlm 19

menimbulkan prasangka bahwa kerajaan bisnis tersebut dibesarkan dengan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, munculnya konglomerat-konglomerat besar dari warga negara keturunan yang disinyalir mendapatkan fasilitas kemudahan menyebabkan munculnya pretensi negatif bagi kestabilan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.<sup>82</sup>

Industri minyak dan gas di Indonesia selama rejim Orde Baru berkuasa telah banyak dieksploitasi. Namun, eksploitasi tersebut diduga tidak efisien dan diliputi oleh praktek-praktek KKN yang merugikan negara, sehingga hasilnya tidak dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara optimal. Eksploitasi di bidang pertambangan juga sangat memprihatinkan, eksploitasi maksimal oleh pihak asing hanya menyisakan residu limbah yang berlebihan.<sup>83</sup> Eksploitasi kekayaan hutan tropis juga cukup mengesankan dan berakibat banyak terjadi kebakaran lahan dan hutan yang luas, banjir dan erosi, tanah longsor, gangguan ekosistem, hilangnya mata pencaharian penduduk yang tinggal disekitar hutan, serta kerusakan alam yang lain, yang kesemuanya merupakan biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat akibat eksploitasi hutan tropis yang kurang terkendali.<sup>84</sup>

Indonesia memiliki reputasi yang buruk di mata internasional dalam hal korupsi, berperingkat mendekati paling bawah bersama dengan negara-negara paling

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, hlm 21

<sup>83</sup>Wimandjaya K Liothe, *op.cit.*, hlm 43

<sup>84</sup>Salah satu contoh adalah P.T Alas Hijau milik Sigit dan The Kin Siang atau Bob Hasan yang melakukan eksploitasi atas hutan di Aceh. *Ibid*

korup lainnya di dunia. Selama ini Indonesia juga dianggap lebih buruk dalam mengendalikan korupsi dan rakyat Indonesia tidak menyangkal fakta ini.<sup>85</sup> Korupsi juga turut menyebabkan hilangnya kepercayaan warga negara kepada pemerintah. Walaupun berasal dari zaman kolonial, korupsi melembaga di bawah rejim Orde Baru, sewaktu rejim tersebut secara sistematis memberikan berbagai manfaat kepada kroni-kroninya demi imbalan keuntungan finansial dan yang lainnya.<sup>86</sup>

### 3. Kerusuhan 27 Juli 1996

Peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (kudatuli), merupakan sebuah gejolak politik terbesar yang terjadi pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Presiden Soeharto. Kerusuhan ini merupakan sebuah skenario politik yang dijalankan rezim Orde Baru dibawah Presiden Soeharto untuk menghadang kekuatan oposisi yang sedang berkembang pada saat itu yaitu Megawati. Rezim Orde Baru menilai bahwa

---

<sup>85</sup>Mereka menyamakan korupsi dengan suatu “penyakit yang harus diperangi, dengan mencela setiap kasus yang diketahui”. Walaupun cara pandang ini mungkin telah dipengaruhi oleh keterbukaan baru Indonesia yang demokratis, namun korupsi masih tinggi, dan membebankan biaya sosial dan ekonomi yang besar. Gary Goodpaster, Refleksi Mengenai Korupsi di Indonesia, dalam Richard Holloway (ed.), *Mencuri dari Rakyat, 16 Pelajaran mengenai Korupsi di Indonesia* (Yayasan Aksara: Januari 2002), hlm. 8-18.

<sup>86</sup>Keserakahan akhirnya membuat konstruksi yang cermat ini menjadi tidak stabil dan negara ini telah membayar harga yang sangat mahal dari segi peningkatan utang negara yang tajam, rusaknya lingkungan hidup dan di atas segalanya, berbagai lembaga yang lemah dan korup.*Ibid.*, hlm 20-28

kedudukan Megawati sebagai oposan adalah berbahaya bagi kelangsungan sistem politik yang telah berjalan pada saat itu.<sup>87</sup>

Skenario politik yang dijalankan oleh Soeharto ini ternyata tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari para pendukungnya. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam tubuh rezim Orde Baru sendiri mulai muncul bibit-bibit perpecahan. Perpecahan ini terjadi karena perbedaan penilaian mereka terhadap sikap oposisi Megawati terhadap pemerintah. Kelompok pertama adalah mereka yang memandang kedudukan Megawati sebagai oposisi tidak membahayakan karena Megawati tidak memiliki kekuatan politik riil. Kelompok kedua adalah mereka yang melihat kedudukan Megawati sebagai oposisi justru membahayakan karena ia menjadi simbol dari semua kekawatan yang anti *status quo*.<sup>88</sup>

Skenario untuk menyingkirkan Megawati pada awalnya dilakukan tanpa melalui aksi kekerasan. rezim Orde Baru menggunakan metode *divide et impera*, yaitu dengan mengajukan seorang tokoh untuk menjadi pesaing bagi Megawati.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup>Darmanto Jatman (eds), *Menyingkap Misteri Sabtu Kelabu 27 Juli 1996* (Semarang: Lubuk Raya, 2001), hlm 37.

<sup>88</sup>Kelompok yang berbeda penilaian tentang kedudukan Megawati adalah: kelompok pertama, pada kelompok ini terdapat orang-orang seperti Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusuma Atmadja, Ginandjar Kartasasmita, Tri Sutrisno, Edi Sudrajat dan Wismoyo Arismunandar. Sedangkan kelompok kedua adalah orang-orang seperti B.J Habibie, Feisal Tanjung dan Syarwan Hamid. *Ibid.*, hlm 37-39.

<sup>89</sup>Cara pertama, rezim Orde Baru menciptakan “PDI tandingan” yaitu PDI Persatuan dan Kesatuan dibawah pimpinan Clara Sitompul namun gagal karena dia bukan politikus populer dikalangan massa PDI. Cara kedua dengan menjagokan Fatimah Achmad sebagai pesaing Megawati namun cara ini kandas juga karena Fatimah sendiri menolak. *Ibid.*, hlm 41-42.

Namun cara seperti ini ternyata tidak berhasil karena massa Megawati adalah massa ideologis yang kuat. Pada akhirnya pemerintah memilih Soerjadi sebagai pesaing Megawati dan pemerintah pun memutuskan untuk memakai segala cara dalam menumbangkan Megawati termasuk melalui cara kekerasan.

Kerusuhan ini dipicu oleh penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro Jakarta (saat itu dikuasai kader pro Megawati) oleh massa dari PDI pro Soerjadi. Perebutan kantor ini kemudian berubah menjadi kerusuhan disertai pengrusakan dan pembakaran. Aparat keamanan tidak mampu melokalisir wilayah kerusuhan agar tidak meluas lalu diinstruksikan perintah tembak ditempat untuk meredam kerusuhan.<sup>90</sup>

Skenario politik ini semula dirancang oleh pemerintah sebagai operasi kecil menyerupai aksi polisionil terhadap pendukung Megawati namun skenario politik ini tidak didukung dengan data intelijen yang memadai dan tidak ada koordinasi dari kalangan elit militer.<sup>91</sup>

Kegagalan skenario politik ini membuat pemerintah memutar otak untuk mencari pihak yang harus bertanggung jawab. Para elit militer mulai mengkalkulasi berbagai kemungkinan untuk mendiskreditkan gerakan-gerakan pro demokrasi sebagai biang kerusuhan. Akhirnya pemerintah menuduh Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan 27 Juli 1996.

---

<sup>90</sup>Donni Edwin, dkk. 1996-1997: Tahun Gejolak Politik, dalam *Seri Penerbitan Studi Politik*. (Jakarta: Fisip UI, 1997), hlm 118-120.

<sup>91</sup>Darmanto Jatman, *op.cit.*, hlm 56-57

Pertimbangan menjadikan PRD sebagai kambing hitam karena rentang gerakan-gerakan PRD paling luas, PRD memiliki struktur organisasi yang paling lengkap beserta *onderbouw*, dan PRD baru saja membuat Manifesto Politik yang dideklarasikan pada 22 Juli 1996.<sup>92</sup> Pemerintah kemudian melakukan tindakan penangkapan terhadap aktivis PRD yang mayoritas masih berstatus mahasiswa, penangkapan ini dilakukan di beberapa kota yang disinyalir menjadi basis PRD tak terkecuali di Semarang.

Di Semarang, Rektor Undip Prof.Dr. Muladi SH menegaskan bahwa pihak Undip belum bisa bertindak apa-apa jika ada mahasiswa dari Undip yang terlibat aktif dalam PRD, karena PRD belum dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Jika terdapat mahasiswa Undip yang terlibat aktif dalam PRD maka hal itu adalah tanggung jawab mahasiswa sendiri bukan pihak universitas, seperti yang dikatakan Prof. Muladi berikut ini,

“ kalau orang sudah berani bermain politik berarti harus berani menerima konsekuensi. Sekali lagi lagi saya tidak pernah mengakui keberadaan PRD di Undip”.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Siaran Pers atas Pengadilan Aktifis PRD

<sup>93</sup>*Suara Merdeka*, Kamis 1 Agustus 1996 hlm 15, “ Pemimpin PRD Mungkin Akan Dicekal”

**BAB III**  
**MULAI BERGERAK:**  
**PERSEMAIAN IDE DAN PEMBENTUKAN JARINGAN ANTAR ELEMEN**  
**MAHASISWA DI SEMARANG (1990-1997)**

Setiap bangsa yang sedang memasuki masa transisi akan menunjukkan pola perkembangan yang dipengaruhi situasi ekonomis, politis dan geografis. Indonesia yang sedang memasuki masa transisi juga menampakkan gejala perubahan yakni pergolakan dan perubahan struktur masyarakat serta perubahan golongan sosial yang memiliki peranan dan kekuasaan yang menentukan gerak dari perubahan tersebut.<sup>94</sup>

Perubahan tersebut menimbulkan pergeseran peranan serta fungsi dari lembaga lama ke lembaga baru, dalam situasi semacam ini disatu pihak terdapat elite yang mempertahankan *status quo* dan dipihak lain terdapat golongan yang menginginkan perubahan.<sup>95</sup> Perubahan situasi politik dalam skala nasional tersebut mendapat respon yang positif di daerah. tanpa kecuali, Semarang.

---

<sup>94</sup>Sartono Kartodirdjo (eds), *Elite dalam Perspektif Sejarah*. (Jakarta: LP3ES, 1983), Bagian Kata Pengantar hlm. i.

<sup>95</sup>*Ibid.*, hlm. ii.

## **A. Persemaian Ide Melawan Orde Baru (1990-1993)**

### **1. Isu suksesi menjelang Pemilihan Umum 1992**

Pemilu 1992 menjadi penting karena Indonesia telah memasuki tahun terakhir era 25 tahun Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I). Pada masa peralihan antara PJP I dan PJP II ini muncul banyak sekali wacana yang menyangkut kepentingan nasional misalnya era keterbukaan, regenerasi, kebangkitan nasional kedua.<sup>96</sup> Wacana mengenai pergantian kepemimpinan nasional pada pemilu 1992 memang sangat santer diberitakan.

Kekuasaan Orde baru dibawah presiden Soeharto sejak 1967 hingga 1992 telah berjalan selama 25 tahun dan belum sekalipun bangsa Indonesia merasakan sebuah pergantian kepemimpinan nasional dengan mekanisme demokrasi yang normal lewat pemilu. Soekarno dan Soeharto dipilih sebagai presiden karena adanya sebuah peristiwa sejarah yang besar, yang mendorong mereka menjadi presiden. Suksesi kepemimpinan nasional berarti penyegaran atau pergantian unsur-unsur kepemimpinan nasional yang menyangkut presiden, wakil presiden, para menteri kabinet, para anggota MPR dan DPR.<sup>97</sup>

Pemilu 1992 memiliki dua isu politik yang sensitif yaitu pencalonan kembali Jenderal Soeharto untuk memegang jabatan presiden RI periode 1993-1998 dan pembatasan jabatan presiden. Isu pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden

---

<sup>96</sup>R.Z Leirissa, *Sejarah Perekonomian Indonesia*. (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm 100.

<sup>97</sup>Amien Rais, *Suksesi Kepemimpinan Nasional*, dalam Riza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm 239-240.

dikemukakan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedangkan isu pembatasan masa jabatan presiden dikemukakan oleh ketua umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Drs. Soerjadi.<sup>98</sup>

Isu mengenai pembatasan masa jabatan presiden ini segera mendapat respon langsung dari Soeharto sendiri. Soeharto menegaskan jika ada pihak atau orang yang mengusulkan supaya masa jabatan presiden hanya dibatasi sampai dua kali saja maka ini dinilai sama dengan mengebiri UUD 1945 karena menurut UUD 1945 masa jabatan dibatasi selama lima tahun dan selanjutnya terserah kepada MPR.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>Soerjadi mengemukakan isu ini didepan massa PDI di Jakarta pada 12 Mei 1992. Kala itu, ia mengatakan bahwa pada Sidang Umum MPR 1993, PDI akan mengusulkan mengenai pembatasan jabatan presiden untuk dua periode saja. Soerjadi menyatakan menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, presiden dan wakil presiden dipilih lima tahun sekali. Itu berarti masa jabatan hanya berlangsung lima tahun saja, presiden yang dinilai baik akan dipilih lagi untuk masa pemilihan berikutnya. *Suara Merdeka*, 13 Mei 1992.

<sup>99</sup>Wacana mengenai pembatasan masa jabatan presiden untuk dua kali masa pemilihan ini bukanlah hal baru. Pada awal berkuasanya Orde Baru, isu pembatasan masa jabatan presiden ini pernah dilontarkan oleh Jendral (Purn) Nasution semasa ia masih menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Menurutnya pembatasan masa jabatan presiden ini berdasarkan tiga alasan. Pertama, kurun waktu sepuluh tahun sudah cukup untuk seorang presiden dalam memimpin negara atau dengan kata lain kelebihan dan kekurangan seorang presiden sudah kelihatan. Kedua, masa jabatan presiden yang tidak dibatasi akan menimbulkan kekuasaan yang monopolistik. Ketiga, apabila tidak dibatasi dalam dua periode saja akan pengkultusan individu yang merugikan. Y. Krisnawan, *Pers Memihak Golkar? Suara Merdeka Dalam Pemilu 1992*. (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1997), hlm. 108; *Suara Merdeka*, 19 Mei 1992.

## 2. Aksi Kampanye Golongan Putih di Semarang

Anders Uhlén menyatakan bahwa Indonesia sedang memasuki masa pra transisi, dimana rezim otoriter nampak mulai tidak stabil dan perjuangan demokrasi sedang memasuki tahap embrional. Pendapat Uhlén tersebut merujuk pada belum adanya perubahan mendasar dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum dan minimnya kebebasan berserikat dan berkumpul, masih tersisa di Indonesia. Sementara dilain pihak, tuntutan-tuntutan masyarakat mengenai demokrasi semakin meningkat.<sup>100</sup>

Realitas kehidupan sosial politik di Indonesia masih kerap muncul pelarangan, pembubaran, pencekalan, pembatasan dan praktek represif terhadap aktivitas yang terjadi di masyarakat baik itu berupa kegiatan kesenian, seminar, diskusi. Kebanyakan kegiatan yang mengalami represifitas ini adalah aktivitas yang cenderung memberi penilaian negatif terhadap pemerintah atau yang dianggap menimbulkan instabilitas. Represifitas yang terjadi bukan hanya berdasar pada suatu kekhawatiran mengenai instabilitas melainkan pada keinginan mempertahankan *status quo* kekuasaan.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup>Hairus Salim dan Angger Jati Wijaya (eds), *Demokrasi Dalam Pasungan*. (Yogyakarta: Forum LSM DIY, 1996), hlm. xii.

<sup>101</sup>Alasan mengenai represifitas dalam bentuk pencekalan atau pembubaran seringkali tidak jelas. Ada yang karena kegiatan tersebut tidak memiliki izin atau yang hadir pada kegiatan tersebut pihak yang tidak disukai oleh negara (*persona non grata*). Bahkan pembubaran atau pencekalan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat perintah atau hanya dalam perintah lisan. *Ibid.*

Pada tanggal 20 Mei 1992, pukul 10.00 WIB, di kampus Fakultas Sastra Undip berlangsung sebuah perhelatan kesenian dengan tajuk “Apel Siaga Kebangkitan Nasional”.<sup>102</sup> Kegiatan-kegiatan kesenian yang berlangsung di Fakultas Sastra ini merupakan agenda rutin dalam upaya mahasiswa memperingati sebuah peristiwa penting, dalam hal ini adalah Hari Kebangkitan Nasional.<sup>103</sup> Kegiatan kesenian ini diikuti sekitar 30 mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Semarang (FMS).<sup>104</sup> Kegiatan kesenian ini berbentuk upacara unik yang dikemas

---

<sup>102</sup>Berikut adalah petikan wawancara via email dengan Lukas Luwarso mengenai acara-acara dalam Apel Siaga Kebangkitan Nasional:

“Apel Siaga Kebangkitan Nasional diadakan untuk mengolok-olok (parodi) upacara yang resmi. Urut-urutan dan strukturnya sama seperti upacara resmi. Ada komandan Upacara, inspektur, peserta, pembacaan Pancasila, baca doa, Nyanyi, dsb, namun materinya semua dipelesetkan. Misalnya pembacaan Pancasila diganti Panca-Silap (lima kesalahan), Lagu Indonesia raya, diganti Mars Golput, pengibaran bendera putih (bukan merah putih), dst. Sambutan komandan upacara diganti dengan pembacaan Pernyataan FMS "Menolak Pemilu 1992" dan mengajak masyarakat memilih Golput. Setelah itu dilanjutkan dengan mimbar bebas, siapa saja boleh berpidato. Pelaku apel siaga yang di panggung sekitar 30, selebihnya peserta dari berbagai kampus (Unisula, IAIN, Unika, Untag, dll), umumnya anak Undip, dan penonton masyarakat sekitar..”

<sup>103</sup> Wawancara dengan Basa Basuki pada 12 Februari 2008.

<sup>104</sup>Berikut petikan wawancara via email dengan Lukas Luwarso mengenai pembentukan FMS:

“.. Forum Mahasiswa Semarang (FMS) muncul berbarengan dengan munculnya forum-forum mahasiswa serupa di berbagai kota (Yogya, Surabaya, Jakarta, Malang, dll) pada 1989. Seingat saya, nama FMS resmi digunakan saat saya memimpin aksi Pawai Alegoris Menolak SDSB, kalau tidak salah tahun 1990. Seingat saya FMS praktis tidak digunakan lagi setelah usai vonis sidang saya dan Poltak pada 1993 (entah, kalau generasi di bawah saya memakai FMS, karena setelah vonis dan lulus saya hijrah ke Jakarta).”

dalam sebuah teater komedi. Aksi kesenian dengan tema Golput ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional.<sup>105</sup>

Kegiatan kesenian yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh Forum Mahasiswa Semarang mampu mengundang animo penonton untuk menyaksikannya. Para penonton tidak hanya berada di dalam kawasan kampus Fakultas Sastra namun penonton di luar pun juga sangat banyak. Tidak hanya mahasiswa, masyarakat umum pun ikut menyaksikan kegiatan ini, diantara para penonton tampak pula aparat keamanan (polisi dan ABRI) yang berjaga-jaga di luar pagar kampus dan merekam aksi kegiatan ini.<sup>106</sup>

Pada aksi kesenian ini dibacakan “sajak lima” karya dari Basa Basuki, sajak tersebut berbunyi:

“Sajak lima  
 Kekuasaan Yang Maha Esa  
 Kemanusiaan yang ditindas dan ditumpas  
 Primordialisme Indonesia  
 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kemunafikan dalam pengharusan perseorangan  
 Penderitaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup>Majalah *Hayamwuruk*, Tergelincir Plesetan. No. 2 Th. VII/1992, hlm 41.

<sup>106</sup>*Ibid*

<sup>107</sup>Pledoi Lukas Luwarso berjudul Bangkitlah Imajinasimu Indonesiaku, pledoi ini dibacakan di hadapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Oktober 1993. Dimuat selengkapnya di Majalah *Hayamwuruk*, No 3 Th. VIII/1993, hlm 58.

**Gambar 1.** Salah satu prosesi pengibaran bendera putih



Sumber: Majalah *Hayamwuruk*, No.2 Th. VII/1992

Selain pembacaan “sajak lima” juga dinyanyikan Mars Golput yang berbunyi:

“Pemilihan umum telah menjegal kita  
 Seluruh pejabat menyambut gembira  
 Hak demokrasi dikebiri  
 Kita rakyat belum merdeka  
 Wakil-wakil rakyat tak dapat dipercaya  
 Karena mereka pilihan penguasa  
 Di bawah undang-undang dasar penguasa  
 Kita memboikot pemilihan umum”.<sup>108</sup>

Kemudian pembacaan statemen “Sikap Forum Mahasiswa Semarang terhadap fenomena Pemilu 1992” oleh Tri Budiyanto. Pada aksi kesenian ini, para pelaku kegiatan yang tergabung dalam FMS mengeluarkan kritikan yang tajam kepada pemerintah. Mereka menilai pemilu di Indonesia seharusnya menjadi wahana kontrol rakyat terhadap eksekutif namun pada prakteknya justru kontrol ini tidak berfungsi

---

<sup>108</sup>*Ibid*

sebagaimana mestinya. Mekanisme dalam Pemilu itu telah diselewengkan oleh pihak eksekutif sehingga kualitas Pemilu di Indonesia masih rendah.<sup>109</sup>

**Gambar 2.** Salah satu prosesi pembacaan doa putih



Sumber: Majalah *Hayamwuruk*, No.2 Th. VII/1992

Forum Mahasiswa Semarang pada aksi kesenian tersebut menilai bahwa kelompok eksekutif bersikap absolut sehingga dapat mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Mekanisme penelitian khusus (litsus) yang diterapkan kepada calon wakil-wakil rakyat telah memperlihatkan bahwa komposisi wakil-wakil rakyat itu adalah tangan panjang eksekutif.<sup>110</sup>

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran diatas maka FMS mengambil pernyataan sikap bahwa pertama, pemilu adalah sia-sia dan tidak menjalankan fungsi

---

<sup>109</sup>*Ibid*

<sup>110</sup>*Ibid*

sebagai kegiatan politik tetapi adalah sebuah pendiktean politik yang berarti pemborosan biaya dan energi ditengah pembangunan. Kedua, jika pemilu tetap dilaksanakan maka harus dicabut terlebih dahulu Undang-undang yang mengatur pengangkatan anggota MPR dan DPR. Ketiga, jadikan mahasiswa sebagai kelompok netral sesuai peraturan bahwa mahasiswa tidak boleh berpolitik praktis serta diberi wewenang untuk menjadi pengawas pemilu.<sup>111</sup>

Acara tersebut berlangsung dengan tertib hingga berakhir pada pukul 11.30. Pada saat acara kesenian berakhir, pihak keamanan yang semula mengikuti jalannya acara segera masuk kedalam kampus dan melakukan penangkapan terhadap empat mahasiswa yaitu Lukas Luwarso, Hari Sutanta, Dwi Sugiono (ketiganya dari Fakultas Sastra Undip) dan Poltak Ike Wibowo (dari Unissula). Keempat mahasiswa ini segera dibawa ke Mapoltabes (markas polisi kota besar) Semarang dan “diinapkan”, lalu baru keesokan harinya surat penangkapan dikeluarkan atas nama Lukas dan Poltak dengan tuduhan melakukan tindak pidana subversif.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup>*Ibid*

<sup>112</sup>Dua mahasiswa lainnya yaitu Hari Sutanta dan Dwi Sugiono dibebaskan dengan alasan salah tangkap namun masih dikenai wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis selama dua minggu. *Hayamwuruk, op.cit.*, hlm 42. Basa Basuki yang pada waktu kegiatan itu membacakan Doa Putih serta penulis Sajak Lima, tidak turut dalam penangkapan di kampus Sastra Undip itu karena ia telah lebih dulu keluar lewat pintu belakang fakultas meskipun kampus Undip secara khusus fakultas Sastra telah dikepung aparat keamanan. Pada penangkapan ini juga banyak yang salah tangkap karena pihak kepolisian secara membabi buta menangkap mahasiswa-mahasiswa yang berambut gondrong. Wawancara dengan Basa Basuki pada 12 Februari 2008.

Para pekerja seni menyadari dan memahami bahwa ada acuan dasar yang selalu digunakan sebagai parameter diperkenankan atau dilarangnya suatu kegiatan kesenian. Pertama, kegiatan yang bersifat publik tidak boleh melanggar SARA. Kedua, tidak menyinggung pribadi seseorang. Ketiga, tidak menyebarkan ideologi terlarang. Keempat, jika kegiatan kesenian melancarkan komentar sosial atau kritik harus konstruktif. Kelima, menjunjung falsafah Pancasila.<sup>113</sup>

Namun pada kenyataannya, sulit sekali menentukan yang mana dan bagaimana sebuah pementasan kesenian dengan kandungan komentar sosial dapat masuk kategori konstruktif dan destruktif serta bagaimana pula sebuah kegiatan kesenian digolongkan menimbulkan instabilitas. Terkadang dalam kenyataannya, pelarangan atau pencekalan sebuah pementasan kesenian tidak disertai alasan yang logis sehingga sering menimbulkan kebingungan banyak pihak.<sup>114</sup>

Penangkapan ini berujung pada persidangan atas kedua mahasiswa yaitu Lukas Luwarso dan Poltak Ike Wibowo.<sup>115</sup> Persidangan inipun diundur satu tahun

---

<sup>113</sup>Bakdi Soemanto, Perizinan dan Kesenian. dalam Hairus Salim dan Angger Jati Wijaya (eds), *Demokrasi Dalam Pasungan*. (Yogyakarta: Forum LSM DIY, 1996), hlm. 133.

<sup>114</sup>*Ibid.*, hlm. 134.

<sup>115</sup> Persidangan ini telah mendapatkan perhatian publik di tingkat nasional, sehingga beberapa pengacara kenamaan dari Jakarta pun ikut menjadi pembela selain pengacara dari LBH Semarang. Pengacara-pengacara tersebut antara lain: Soemedi Prawirodirdjo SH, Hindra Wijaya SH, Puspoadji SH, Widodo SH (keempatnya dari LBH Semarang), Adnan Buyung Nasution SH dan Luhut Pangaribuan SH (keduanya dari Jakarta). Wawancara dengan Tri Budiyanto pada 7 Februari 2008 dan dengan Basa Basuki pada 12 Februari 2008.

kemudian, tahun 1993, setelah Pemilu 1992 berlangsung dengan alasan tidak mengganggu prosesi Pemilu tahun 1992.<sup>116</sup> Dalam persidangan ini hanya Lukas dan Poltak yang dikenai pasal pidana karena mereka berdua telah lama menjadi target operasi pihak kepolisian, hal itu berdasarkan *track record* mereka dalam setiap aksi mahasiswa yang terjadi di Semarang. Kedua mahasiswa ini dikenai pasal subversif yaitu pasal 154 KUHP karena dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap pemerintahan Orde Baru.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup>Bagi masyarakat Jawa, tidak mudah menetapkan waktu sebuah hajat atau kegiatan. Mereka biasanya melakukannya berdasar pada primbon Jawa. Hari Pemilu 1992 jatuh pada 9 Juni 1992. hari tersebut tepat pada tanggal 8, bulan Besar, tahun Ehe 1924, wuku Gumbreg dan Windu Sancoyo. Berdasarkan perhitungan Jawa, *Windu Sancoyo* bermakna baik. Hanya perhitungan hari dan pasarannya yang mengandung makna kurang baik. Pemilu 1992 jatuh pada tanggal 9 Juni 1992 dan bertepatan dengan hari Selasa Wage. Hari pasaran Wage dalam bulan Besar merupakan pasaran Sangaring Sasi, sedangkan bulan Besar termasuk dalam kategori Larauganing Sasi dan Dina Naasing Sasi. Menurut perhitungan Jawa ini maka untuk melakukan kegiatan atau hajat pada hari dan pasaran ini sebaiknya dihindari. Burhan D. Magenda (eds), *Sikap Politik Tiga Kontestan*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hlm. 185-187.

<sup>117</sup>*Haatzai Artikelen* (Belanda, *haat* : benci, *zaaien*: menebar, menanam ) adalah pasal-pasal yang digunakan oleh Negara untuk menjerat para pengkritiknya. Yang termasuk dalam pasal-pasal *Haatzai Artikelen* adalah Pasal 154, 155, 156, 157 dan 171. Pada jaman kolonial, pasal-pasal ini dirancang dan diberlakukan untuk memnghadapai kaum pergerakan kebangsaan khususnya terhadap Indische Partij (IP). Isi ketentuan pasal-pasal ini pada pokoknya mengancam dengan hukuman terhadap penyiaran, pertunjukkan, penempelan tulisan atau gambar yang mengandung rasa permusuhan terhadap pemerintah. *Haatzai Artikelen* ini dikenal sebagai pasal-pasal karet karena tidak ada penegasan penafsiran tentang apa yang dimaksud “tidak benar” dan menimbulkan gangguan “keamanan dan ketertiban”, hanya pejabat pemerintah yang berhak menafsirkannya. Pada era Orde Baru beberapa media massa yang dikenai pasal ini antara lain *Expo* (1984), *Topik* (1984), *Jurnal Ekonomi* (1983), *Sinar Harapan* (1986), *Tempo* (1994), *Detik* (1994). Hersri Setiawan, *Kamus Gestok*, (Yogyakarta: Galang Press, 2003), hlm. 111.

Pada akhirnya memang dapat diketahui bahwa proses peradilan ini akan berujung pada penjatuhan vonis bersalah atas kedua mahasiswa tersebut. Pada tanggal 24 November 1993, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis bersalah atas kedua terdakwa. Usai pembacaan vonis ini, ratusan pengunjung yang sebagian mahasiswa segera bergerak turun ke jalan dengan kawalan aparat keamanan. Aksi ini merupakan aksi terbesar yang ada di Semarang pada waktu itu.<sup>118</sup>

**Gambar 3.** Aksi Solidaritas dari mahasiswa Semarang



Sumber: Majalah *Hayamwuruk*, No.2 Th. VII/1992

---

<sup>118</sup>Aksi solidaritas menentang vonis bersalah atas Lukas dan Poltak tidak hanya terjadi di Semarang namun juga terjadi di Kejaksaan Agung RI-Jakarta pada hari Kamis 18 Juni 1992. Aksi solidaritas dilakukan oleh aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa Merdeka (FORKOMM) yang berjumlah 50 orang yang merupakan perwakilan dari berbagai elemen mahasiswa seperti Forum Mahasiswa Jombang (FORMAJO), Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY), Forum Komunikasi Mahasiswa Malang (FKMM), Kesatuan Pergerakan Mahasiswa Bandung (KPMB) dan perwakilan dari Universitas Nasional Jakarta. *Hayamwuruk*, *op.cit.*, hlm. 80.

Bayang-bayang represif dari Negara atas aksi mahasiswa tidak menyurutkan langkah mereka untuk melakukan perubahan. Pasca kasus Apel Siaga Kebangkitan Nasional 1992, iklim pergerakan mahasiswa di Semarang masih menunjukkan geliat yang masif. Ini terbukti bahwa pada kurun waktu 1994 hingga 1997 terjadi koordinasi jejaring antar elemen mahasiswa di Semarang, baik itu dilakukan oleh elemen intra universitas maupun elemen ekstra universitas. Pembentukan jaringan ini melibatkan beberapa kota di Indonesia dan mulai tumbuh organisasi mahasiswa pro-demokrasi ekstra universitas.<sup>119</sup>

#### **B. Pembentukan jaringan antar elemen mahasiswa di Semarang (1994-1997)**

Gerakan mahasiswa di Semarang setelah persidangan kasus kampanye Golongan Putih (Golput) tahun 1993 tidak menunjukkan tanda-tanda akan surut bahkan semakin massif gerakannya. Mereka membuat format gerakan lain yaitu membentuk jaringan gerakan antar kota yang menjadi cikal-bakal organisasi mahasiswa ekstra universitas pro demokrasi di Indonesia.<sup>120</sup> Kerjasama dengan kelompok-kelompok mahasiswa lain yang berpotensi untuk membuat perubahan mulai berjalan intensif terutama dengan wadah-wadah komunikasi organ mahasiswa antar kota di Indonesia.

---

<sup>119</sup>Wawancara dengan dengan Tri Budiyanto pada 7 Februari 2008.

<sup>120</sup>Organisasi mahasiswa ekstra universitas yang berkembang selama kurun waktu 1993 hingga 1997 di Semarang antara lain Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI, organ anggotanya jika di Semarang adalah Formasal) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI yang baru berdiri pada bulan Maret 1998).

Jaringan kerja yang dibangun oleh aktivis gerakan mahasiswa pada periode ini, Meskipun terdapat perbedaan baik berupa pandangan, sikap dan ideologi diantara para aktivis gerakan mahasiswa, merupakan cermin pluralitas ideologi serta mencari dan menemukan format gerakan itu sendiri.<sup>121</sup> Pada subbab ini akan diuraikan peta perkembangan organisasi mahasiswa ekstra universitas pro demokrasi,<sup>122</sup> organ mahasiswa ekstra universitas yang telah ada sebelumnya yang ada di Semarang,<sup>123</sup> organisasi mahasiswa intern universitas dan perkembangan pers mahasiswa yang hidup dan tumbuh berkembang di Semarang.

#### 1. Organisasi Mahasiswa Ekstra Universitas Pro Demokrasi di Semarang

Penulis mengambil tiga organisasi mahasiswa yang baru muncul pada kisaran 1990 hingga awal reformasi 1998 yaitu Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (di Semarang diwakili oleh Formasal) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Ketiga organ mahasiswa ini merupakan bentukan baru diluar organisasi intra universitas Senat

---

<sup>121</sup>Irine H Gayatri, Arah baru Perlawanan Gerakan Mahasiswa 1989-1993, dalam Muridan S Widjojo et.al. *Penakluk Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 108.

<sup>122</sup>Organ mahasiswa ekstra universitas pro demokrasi seperti Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

<sup>123</sup>Organ mahasiswa ekstra universitas yang telah ada sebelumnya seperti Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) dan organ mahasiswa ekstra yang telah ada sebelumnya (kelompok Cipayung HMI, GMNI, PMKRI dll). Frasa “pro demokrasi” digunakan penulis karena ketiga organisasi ini lahir ketika geliat demokrasi mulai terasa di Indonesia khususnya Semarang pada tahun 1990-1998.

#### a) Pembentukan SMID di Semarang

Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) merupakan salah satu elemen mahasiswa yang memiliki sikap progresif dan cenderung radikal sehingga beberapa kalangan menyebut SMID sebagai bagian dari gerakan mahasiswa pro demokrasi yang cukup marak bermunculan paska berakhirnya NKK/BKK (1978-1990). Cikal bakal SMID berawal dari Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY) yang telah berdiri sejak 1980-an, paska pelaksanaan kongres FKMY yang kedua pada tahun 1990 FKMY mengalami konflik internal yang melahirkan faksi Dewan Mahasiswa dan Pemuda Yogyakarta (DMPY) dan faksi Solidaritas Mahasiswa Yogyakarta (SMY). Kedua faksi hasil perpecahan FKMY ini memiliki ciri khas yang bertolak belakang, DMPY memiliki karakter gaya parlemen jalanan sedangkan SMY memiliki gaya menonjolkan penguatan wacana teoritik dan ideologi.<sup>124</sup>

SMY mengalami perkembangan lebih luas dengan membangun aliansi jaringan antar kota antara lain dengan Ikatan Mahasiswa Solo (IMS), Solidaritas Mahasiswa Salatiga (SMSt), Solidaritas Mahasiswa Semarang (SMS) dan Solidaritas

---

<sup>124</sup>Muridan S. Widjojo dan Moch. Nurhasim, Organisasi Gerakan Mahasiswa 1998: Upaya Rekonstruksi, dalam Muridan S Widjojo et.al. *Penakluk Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 322.

Mahasiswa Jakarta (SMJ). Kelima organ inilah yang menjadi embrio dari kemunculan SMID. Terdapat dua alasan penting yang mendasari terbentuknya SMID yaitu pertama, para penandatangan menyepakati bahwa mereka memerlukan sebuah organisasi yang lebih tinggi untuk menjalankan program-program bersama dalam gerakan mahasiswa. Kedua, kelemahan mendasar dari gerakan politik Indonesia adalah gerakan tersebut tidak memiliki dukungan secara internasional.<sup>125</sup>

SMID memiliki beberapa tujuan antara lain: Pertama, menyatukan mahasiswa dan gerakan mahasiswa melawan rejim fasis Suharto; Kedua, mengkampanyekan dan memperjuangkan kemerdekaan sipil, kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan pers, kebebasan akademik, kebebasan berdemonstrasi, mogok, mengajukan petisi, mencabut UU subversif, mencabut UU ormas dan membubarkan Bakorstanas; Ketiga, bersama gerakan buruh dan tani mengkampanyekan dan memperjuangkan sistem multi partai di Indonesia; Keempat, memperjuangkan sistem pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, SPP yang murah dan pers mahasiswa yang bebas sensor; Kelima, menyokong solidaritas internasional menentang imperialisme.<sup>126</sup> Pada tanggal 1-2 Agustus 1994 di Cisarua berlangsung kongres dan SMID secara resmi dideklarasikan pada tanggal 3 Agustus 1994 di Jakarta, SMID berkembang dan membangun organ nasional gerakan mahasiswa yang menganut sentralisme demokratik.

---

<sup>125</sup>Irine H Gayatri, *op.cit.*, hlm. 93.

<sup>126</sup>Suharsih dan Ign. Mahendra, *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia dan Perubahan Sosial di Indonesia*. (Yogya: Resist book, 2007), hlm. 93-94.

Di Semarang, SMID mengalami perkembangan di fakultas Sastra Undip. Hal ini dimungkinkan karena aktivis-aktivis mahasiswa dari fakultas ini yang telah memiliki tradisi gerakan mahasiswa cukup kuat serta telah menjalin hubungan dengan jalinan gerakan mahasiswa di kota-kota lain.<sup>127</sup> SMID di Semarang mulai diformalkan pada tahun 1993 dan penambahan jumlah anggota secara signifikan baru terjadi pada tahun 1994. Pada tahun itu jumlah anggota berjumlah 50 orang kemudian mulai mengadakan perekrutan paling tidak 1 anggota lama mampu membawa 3 calon anggota baru.<sup>128</sup> Proses perekrutan ini diawali dengan diskusi-diskusi politik dengan tema anti orde baru dan ketidakadilan sejarah. Setelah melihat keaktifan calon anggota itu maka mereka diajak untuk mengikuti kursus-kursus politik secara bertahap dan kemudian anggota baru ini diajak terjun langsung melakukan advokasi di lingkungan buruh tani dan buruh pabrik bahkan melakukan demonstrasi.<sup>129</sup> Selain di Fakultas Sastra Undip, SMID juga memiliki basis massa di FISIP-Undip, lalu beberapa personal mahasiswa dari USM (Rivani Noor), Unissula (Poltak), IKIP-PGRI (Nurul Qomariyah), Unika Soegijapranata dan Untag.

---

<sup>127</sup>Jalinan kerjasama organ mahasiswa antar kota telah ada sejak era KSKPKO (lihat bab II dari skripsi ini dengan sub judul Penggusuran demi Pembangunan) dan Peristiwa Apel siaga Kebangkitan Nasional 1992 (lihat awal bab ini dengan sub judul Aksi Kampanye Golongan Putih di Semarang). Wawancara via email dengan Radjimo, pada 23 Oktober 2007.

<sup>128</sup> Wawancara via email dengan Radjimo pada 23 Oktober 2007. Lihat lampiran C.

<sup>129</sup> *Ibid.*

### **b) FPPI-Formasal**

Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) adalah aliansi dari beberapa organisasi dan komite aksi mahasiswa antar kota yang telah menjalin kontak hubungan sejak akhir dasawarsa 80-an. FPPI sebenarnya lahir pada akhir 1998 namun beberapa organ didalamnya telah muncul pada dekade awal 90-an. FPPI menjadi organisasi payung jaringan gerakan mahasiswa dalam lingkup nasional khususnya wilayah Jawa dan Bali.<sup>130</sup> Pada bagian ini dikemukakan profil dari salah satu organ FPPI yang tumbuh dan berkembang di Semarang yaitu Formasal.

Forum Mahasiswa Sadar Lingkungan (FORMASAL) ini berdiri pada tahun 1992 di Semarang tepatnya di kampus Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Di kampus ini merupakan basis intelektual Islam dari kalangan organisasi mahasiswa PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Pada awalnya Formasal hanya intens

---

<sup>130</sup>Muridan S. Widjojo dan Moch. Nurhasim, *op.cit.*, hlm. 307. Organ-organ mahasiswa yang tergabung dalam FPPI antara lain :

- a) Pusat Perjuangan Pemuda Yogyakarta (PPPY) Yogyakarta
- b) Forum Aksi Mahasiswa Purwokerto untuk Reformasi (FAMPR) Purwokerto
- c) Solidaritas Mahasiswa STAIN Salatiga (SEMESTA) Salatiga
- d) Forum Mahasiswa Sadar Lingkungan (FORMASAL) Semarang
- e) Front Jakarta
- f) Gerakan Mahasiswa Pancasila untuk Reformasi (GEMPUR) Jakarta
- g) Forum Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED) Jakarta
- h) Komite Pergerakan Mahasiswa Bandung (KPMB) Bandung
- i) Arek-arek Pro Reformasi (APR) Surabaya
- j) Ampera Wonosobo
- k) Forum Komunikasi Mahasiswa Malang (FKMM) Malang
- l) Forum Komunikasi Mahasiswa Jombang (FORMAJO) Jombang

bergerak dalam isu-isu lingkungan namun perkembangan politik Indonesia telah mendorong forum ini untuk melebarkan wacana kearah isu politik lokal dan nasional. Formasal melakukan advokasi-advokasi dikalangan rakyat, antara lain kasus Pasar Induk Wonosobo (bekerjasama dengan Ampera-Wonosobo); kasus tanah rakyat di Tambak yang diserobot oleh Penerbad (Penerbangan Angkatan Darat).<sup>131</sup>

### c) KAMMI di Semarang

Organisasi mahasiswa pro demokrasi dari kelompok Islam yang tumbuh dan berkembang di awal reformasi adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI). Kelompok organisasi mahasiswa ini adalah hasil dari Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) X di Universitas Muhammadiyah Malang pada 29 Maret 1998 dan dihadiri sekitar 200 pimpinan LDK dari seluruh Indonesia. Pada pertemuan di Malang ini, Forum Silaturahmi LDK menghasilkan “Deklarasi Malang”.<sup>132</sup>

Aktivis-aktivis yang tergabung dalam KAMMI kebanyakan merupakan aktivis dakwah di masjid-kampus sehingga dalam gerakannya, KAMMI lebih mengkonsentrasikan gerakannya pada gerakan dakwah Islamiyyah. Dalam KAMMI, para aktivisnya memiliki latar belakang dari organisasi mahasiswa dari kalangan Islam seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta dari lembaga intra perguruan tinggi seperti SMPT dan BEM.

---

<sup>131</sup>*Ibid.*, hlm. 313.

<sup>132</sup>Muridan S. Widjojo dan Moch. Nurhasim, *ibid.*, hlm. 365.

Keanggotaan KAMMI mayoritas adalah aktivitas LDK sehingga dalam melakukan aksipun tidak terlalu jauh dari nilai agama Islam seperti setiap aksi diawali dengan bacaan *Bismillah*, pekik *Takbir* dalam menyahut orasi, menggemakan *Shalawat Badar*. Format aksi yang mereka pilih adalah *non violence*, aksi damai serta mengusung tema keprihatinan.<sup>133</sup>

## 2. Pers Mahasiswa di Semarang

Pers kampus atau pers mahasiswa merupakan salah satu gerakan alternatif dalam gerakan mahasiswa selain munculnya organisasi-organisasi ekstra universitas, forum diskusi.<sup>134</sup> Keberadaan pers mahasiswa sebagai gerakan alternatif telah memberikan warna gerakan tersendiri, misalnya saja aktivis-aktivis gerakan yang muncul pada

---

<sup>133</sup>*Ibid.*, hlm. 366.

<sup>134</sup>Di Semarang sendiri juga terdapat forum-forum diskusi serupa, seperti terlihat dalam petikan wawancara *via* email dengan Lukas Luwarso:

“...Forum Demokrasi (Fordem) saya dirikan di PKM Undip pada tahun 1991, menyusul Fordem yang didirikan Gus Dur dkk pd tahun yang sama. Saya melihat Fordem adalah gerakan kultural untuk membangun demokrasi yang penting, dan tidak ada salahnya membuka "cabang" di Semarang. Saya sempat disidang oleh Senat Undip, Dipimpin Rektor dan seluruh PR diancam dipecat, karena dianggap menyalahgunakan kampus untuk "politik praktis". Rektor Undip (Saat itu Moeljono Trastotenodjo) khawatir dengan pendirian Fordem Semarang, karena saya mengajak sejumlah guru besar untuk bergabung, dan bersedia hadir saat deklarasi di PKM Undip. Fordem tidak banyak kiprahnya/kaitannya dalam kaitan dengan gerakan mahasiswa di Semarang. Saya gunakan bendera Fordem untuk kegiatan diskusi (bukan untuk aksi), NAMun, bisa juga dikaitkan, mungkin forum-forum diskusi yang kami gelar melalui Fordem memberikan inspirasi bagi mahasiswa untuk aksi..”

dekade 90-an adalah dari tri tradisi yaitu jurnalistik, diskusi dan aksi.<sup>135</sup> Berangkat dari ketiga proses tersebut maka muncul pemikiran kritis dari mahasiswa terhadap kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru, pada akhirnya sikap kritis ini tentu saja akan berhadapan dengan rejim ini. Kegiatan *share* informasi oleh kalangan pers mahasiswa secara efektif mampu mengadakan penggalangan terhadap mahasiswa yang sudah memiliki kesadaran kritis. Aktivitas pers mahasiswa tidak saja dalam kerangka kerja penerbitan majalah atau koran melainkan juga menyelenggarakan diskusi, seminar, kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi segenap awak pers mahasiswa.<sup>136</sup>

Selama masa awal 1990 hingga saat-saat terakhir kejatuhan Soeharto pers mahasiswa telah mendudukkan diri sebagai salah satu elemen perlawanan terhadap rejim Orde Baru. Persoalan-persoalan demokratisasi, hak asasi manusia, politik-ekonomi-sosial di Indonesia yang diangkat oleh pers mahasiswa dengan maksud memberi sumbangan kritis dilihat oleh rejim Orde Baru sebagai *destabilizing factors* maka hanya sikap represif yang digunakan untuk membungkam kekritisian pers mahasiswa. Contoh sikap represif yang ditunjukkan adalah pelarangan terbit pers mahasiswa *Arena* (IAIN Sunan Kalijaga), *Vokal* (IKIP PGRI Semarang), *Dialogue* (FISIP Unair), *Opini* (FISIP Undip). Atas perlakuan ini, para mahasiswa tidak tinggal

---

<sup>135</sup>Irine H Gayatri, *op.cit.*, Hlm 81; Wawancara *via* email kepada Lukas Luwarso pada 19 Februari 2008.

<sup>136</sup>Edisi khusus Majalah *Hayamwuruk*, No 2/Th VIII/1993; Didik Supriyanto, *Perlawanan Pers Mahasiswa Sepanjang NKK/BKK*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hlm. 58-59.

diam, pers mahasiswa *Manunggal* milik Undip melakukan aksi solidaritas, mereka menamakan diri Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Semarang (FKPMS). Aksi solidaritas FKPMS ini dilakukan pada 26 Juni 1993 bertempat di lapangan basket Undip, aksi ini mengambil tema “Aksi Keprihatinan Pembredelan Pers Mahasiswa” yang diikuti perwakilan lembaga permawa (pers mahasiswa) PTN/PTS se-kota Semarang. Pada aksi ini digelar berbagai spanduk bertuliskan, “Aksi Keprihatinan Atas Pemberedelan Pers Mahasiswa”; “Free The Student’s Press”; “Merdeka Indonesia...Merdeka Pers Mahasiswa”; “Jangan Isolir Kami dari Jerit Hati Nurani”; “Pers Kampus Yes..Penerbitan Kampus No”; “Pers Mahasiswa Jangan Dibredel lhah yaa”; “Arena, Vokal, Dialogue, Opini, siapa lagi?”.<sup>137</sup>

### **3. Organisasi Intra dan Ekstra Universitas di Semarang**

Jerat korporatisme Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) telah berakhir dengan berlakunya organisasi mahasiswa Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) yang dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 30/1990. Kalangan mahasiswa menganggap skeptis regulasi baru ini karena trauma atas kebijakan NKK/BKK yang mematikan kekritisian mahasiswa. Sikap mahasiswa ini kemudian menimbulkan kesenjangan antara organisasi mahasiswa dengan anggotanya, lembaga mahasiswa kurang mewakili aspirasi mereka dan mahasiswa sendiri tidak merasa terwakili oleh mereka

---

<sup>137</sup>Majalah *Balairung*, No.25/Th.XII/1997.

(ormawa).<sup>138</sup> Organisasi intra kampus terlalu lama dalam suasana apolitis NKK/BKK, sehingga ketika muncul era keterbukaan pada awal 1990-an tampak bahwa kalangan ini tampak gagap, kurang visi politik yang komprehensif, tidak berpengalaman dalam wacana politik lokal dan nasional, kurang dalam pengelolaan aksi dan penyikapan atas kekerasan militer.<sup>139</sup>

Peranan organisasi mahasiswa intra kampus baru nampak signifikan, secara kuantitas aksi demonstrasi, ketika memasuki awal tahun 1998. Di Semarang sendiri, aksi dari kalangan organ intra universitas pertama kali muncul ketika ada aksi keprihatinan di Gedung Berlian DPRD Tk I Jawa Tengah. Sekitar 150 mahasiswa dari Undip, IAIN Walisanga dan IKIP Semarang bergabung menyampaikan aspirasi mengenai krisis yang melanda Indonesia.<sup>140</sup>

Pengaruh organisasi mahasiswa ekstra universitas seperti GMNI, HMI, PMKRI, PMII cukup besar dalam organisasi intern mahasiswa di universitas-universitas besar seperti UI, UGM, UNDIP, UNS dan UNAIR. Dari beberapa organisasi ekstra yang ada tersebut, HMI memiliki pengaruh paling kuat. Persaingan antar organisasi ekstra ini tampak memanas ketika terjadi suksesi di organisasi intra universitas seperti Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Di Semarang, masing-masing organisasi ekstra ini memiliki basis massa di

---

<sup>138</sup>Majalah *Hayamwuruk*, No. 2 Th. VII/1992, hlm. 35.

<sup>139</sup>Muridan S. Widjojo dan Moch. Nurhasim, *op.cit.*, hlm. 348.

<sup>140</sup>Lihat Bab IV pada skripsi ini dengan judul sub-bab Aksi-Aksi Unjuk Rasa oleh Mahasiswa di Semarang sepanjang bulan Februari hingga Mei 1998.

beberapa perguruan tinggi yang ada. GMNI memiliki pengaruh kuat di kalangan mahasiswa Untag (Universitas Tujuh Belas Agustus), kalangan mahasiswa Undip (khususnya Fakultas Ekonomi dan FISIP). PMII memiliki basis massa di kalangan mahasiswa IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Walisanga. PMKRI memiliki basis massa di kalangan mahasiswa dari Unika (Universitas Katolik) Soegijapranata. HMI-DIPO memiliki mayoritas massa di kalangan mahasiswa Undip dan mampu menguasai kalangan pengurus Senat.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup>HMI-DIPO merupakan hasil *split* dari kemelut yang ada di tubuh HMI sendiri, perpecahan ini terjadi karena perbedaan interpretasi di kalangan aktivis HMI dalam menerima asas tunggal Pancasila pada tahun 1985. Lihat selengkapnya perpecahan dalam tubuh HMI dalam M. Rusli Karim, *HMI-MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1997).

**BAB IV**  
**MENUMBANGKAN TIRANI:**  
**AKSI-AKSI REFORMASI OLEH MAHASISWA TAHUN 1998**  
**DI SEMARANG**

Gerakan mahasiswa di Indonesia menemukan momentum pentingnya pada tahun 1998. Pada tahun ini, kekuasaan rezim Orde Baru dibawah Soeharto mengalami tekanan luar biasa dari kalangan masyarakat umum, cendekiawan, lawan-lawan politik serta mahasiswa. Tekanan kepada rezim Orde Baru ini terkait dengan situasi ekonomi Indonesia yang terkena imbas krisis ekonomi di Asia. Selain itu juga dipicu kekesalan rakyat mengenai tiadanya suksesi pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1998 serta dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atas pemerintahan Soeharto. Gerakan mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia semakin masif, dengan menerapkan strategi demonstrasi atau aksi jalanan, dengan intensitas yang meningkat luar biasa mulai bulan April hingga puncaknya bulan Mei 1998.

Aksi-aksi reformasi yang dilakukan mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia juga dilakukan oleh segenap mahasiswa di Semarang. Apalagi secara tradisi, gerakan mahasiswa Semarang telah memberi warna penting dalam kancah gerakan mahasiswa jauh sebelum era 1998. Gerakan mahasiswa di Semarang dalam bentuk demonstrasi jalanan ini tidak terjadi secara spontan melainkan ada faktor-

faktor yang melatarbelakangi gerakan ini. Gerakan mahasiswa yang mencuat ke permukaan pada awal tahun 1998 adalah hasil kristalisasi kondisi struktural serta ketegangan yang ditimbulkan. Itu semua merupakan kondisi laten yang siap meledak. Kondisi tersebut memberikan keyakinan pada diri mahasiswa bahwa aksi-aksi demonstrasi yang tengah mereka lakukan akan menuai hasil. Keyakinan mahasiswa itu semakin mengental ketika mengalir dukungan masyarakat luas kepada aksi mereka. Pada diri masyarakat sendiri memiliki keyakinan mengenai keberhasilan aksi-aksi reformasi yang tengah berlangsung diberbagai tempat di Indonesia.

#### **A. Kristalisasi Gerakan Reformasi oleh Mahasiswa di Semarang**

Gerakan mahasiswa di Semarang semakin mengkristal karena telah didahului faktor-faktor pencetus (*precipitating factors*). Faktor pencetus merupakan satu determinan penting dalam sebuah gerakan serta merupakan faktor yang dapat memicu gejolak sosial. Biasanya faktor pemicu ini bersifat dramatik. Faktor pencetus gerakan reformasi oleh mahasiswa di Semarang antara lain:

- a. Tertembaknya mahasiswa Trisakti dan UI.
- b. Kenaikan harga bahan pokok, bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik
- c. Terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR) serta susunan kabinet Pembangunan VII yang bernuansa nepotisme

Krisis ekonomi dan moneter sejak medio akhir 1997 telah membuat sebagian rakyat Indonesia jatuh dalam suasana keprihatinan. Jatuhnya nilai rupiah terhadap

dollar Amerika merupakan bukti kegagalan rezim Orde Baru. Akibat dari krisis ekonomi antara lain pengangguran melonjak, industri bangkrut dan perdagangan macet. Memasuki awal tahun 1998 krisis ekonomi tidak tampak akan mereda bahkan bertambah parah. Dampaknya memukul seluruh lapisan rumah tangga mulai dari kelas menengah yang relatif makmur hingga orang-orang miskin pedesaan.<sup>142</sup>

Kalangan mahasiswa Semarang pun tak lepas dari dampak krisis ini. Diantaranya yang dirasakan adalah lonjakan harga kertas hingga dua kali lipat. Kondisi ini membuat mahasiswa harus memutar otak untuk menyasati dengan beralih menggunakan kertas buram untuk kepentingan skripsi dan thesis. Bahkan mahasiswa pun juga menggunakan disket ketika melakukan konsultasi.<sup>143</sup> Prinsip kekeluargaan dan saling menolong dalam menghadapi krisis dilakukan antar sesama mahasiswa misalnya saja tampak dalam usaha Senat Mahasiswa Undip membentuk Komite Peduli Masyarakat (KPM) yang tujuannya memperkuat *civil society* disaat krisis. Usaha yang dilakukan oleh KPM dalam meringankan beban mahasiswa adalah meng-drop kertas sebanyak 600 rim ke seluruh fakultas di lingkungan Undip yang

---

<sup>142</sup>Ted Grant dan Alan Woods, *Indonesia: Revolusi Asia telah Dimulai*. [http://www.geocities.com/frontnasional/marxisme\\_dan\\_perjuangan\\_melawan.html](http://www.geocities.com/frontnasional/marxisme_dan_perjuangan_melawan.html). (dikunjungi pada 29 November 2007).

<sup>143</sup>*Suara Merdeka*, Kamis 5 Februari 1998 hlm. 2, “Mahasiswa Beralih ke Kertas Buram”.

tentunya akan dijual kepada mahasiswa dengan harga lebih rendah dari harga dipasaran pada umumnya.<sup>144</sup>

Usaha meringankan beban sesama anggota masyarakat memang sangat terasa jika telah masuk dalam masa-masa sulit seperti krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda Indonesia. Gelar pasar murah yang dilaksanakan oleh Panitia Pimnas XI (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional) Undip merupakan salah satu bentuk nyata usaha saling meringankan beban. Pada aksi pasar murah ini panitia menyediakan 2000 paket dengan tiap paket berisi 2 kilogram beras dan 1 kilogram gula pasir. Paket ini kemudian dibagikan ke 10 fakultas di lingkungan Undip. Namun di beberapa fakultas seperti Fakultas Sastra, MIPA dan Perikanan justru membagikan paket gratis ini kepada masyarakat yang tinggal di sekitar fakultas tersebut (sedianya paket ini untuk kalangan mahasiswa kos).<sup>145</sup>

Pada awal tahun 1998, yang juga masih dalam suasana krisis moneter, berlangsung perhelatan akbar lima tahunan yaitu Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR) guna memilih presiden dan wakilnya untuk masa bakti 1998-2003. Guna melancarkan SU MPR ini pemerintah melakukan tindakan preventif yaitu sterilisasi di kampus-kampus untuk mencegah gejolak politik semasa SU MPR. Usaha ini tampak sekali dalam keputusan menarik secara prematur 1.440 mahasiswa Undip yang sedang melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di 3

---

<sup>144</sup>*Suara Merdeka*, Sabtu 21 Februari 1998 hlm. 2, "Senat Undip Jual Kertas Murah".

<sup>145</sup>*Suara Merdeka*, Jumat 6 Maret 1998 hlm. 2, "Mahasiswa Kos Sasaran Pahe".

kabupaten yaitu Jepara, Batang dan Pekalongan. Ke-1.440 mahasiswa Undip ini sedianya melakukan bakti KKN di 3 kabupaten tersebut mulai 9 Februari hingga 9 April 1998 namun telah ditarik pada tanggal 26 Februari 1998. Penarikan ini dilakukan pihak Undip menyusul surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah ke pihak rektorat Undip pada 10 Februari 1998.<sup>146</sup>

Pasca SU MPR 1998, situasi politik domestik bertambah panas karena harapan masyarakat untuk terjadi suksesi di tingkat kepemimpinan nasional tidak terwujud. Gerakan reformasi yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk aksi unjuk rasa terus berlangsung dan telah berdiaspora ke berbagai tempat di Indonesia. Bahkan tidak jarang dalam setiap aksi unjuk rasa disertai dengan bentrok fisik antara demonstran *vis a vis* aparat keamanan. Di kota-kota yang telah men-tradisi gerakan mahasiswanya seperti Yogyakarta dan Jakarta, terjadi aksi unjuk rasa dengan melibatkan massa mahasiswa dalam jumlah banyak. Aksi cukup berani diperagakan para mahasiswa dari Yogya dengan membakar patung raksasa berwajah Suharto yang merupakan wujud penolakan atas pencalonan kembali Suharto sebagai presiden.<sup>147</sup> Aksi unjuk rasa oleh mahasiswa juga meletup di beberapa tempat lain seperti Solo, Semarang, Purwokerto, Kudus, Surabaya, Malang, Manado, Ujungpandang, Denpasar dan Padang.

---

<sup>146</sup>*Suara Merdeka*, Sabtu 14 Februari 1998 hlm 2, “Baru Mulai, 1.440 Mahasiswa Undip Segera Ditarik”.

<sup>147</sup>Suharsih dan Ign. Mahendra, *Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia* (Yogyakarta: Resist book, 2007), hlm. 104.

Berbagai aksi besar dengan dukungan masyarakat luas mulai banyak terjadi dan tentu ini mempercepat turunnya Suharto sebagai presiden.<sup>148</sup> Aksi-aksi unjuk rasa oleh mahasiswa yang marak terjadi di Semarang pada kisaran bulan Februari hingga Mei akan dijelaskan pada subbab berikut.

### **B. “Satu Komando, Satu Perlawanan”: Mobilisasi dan aksi massa oleh mahasiswa, dukungan dari masyarakat dan kontrol aparat**

Pada sub-bab ini akan penulis paparkan mengenai berbagai aksi unjuk rasa oleh mahasiswa di Semarang selama kisaran bulan Februari hingga Mei, lalu dukungan dari masyarakat luas (dari kalangan seniman, civitas akademika, organisasi profesi, rohaniwan) terhadap aksi mahasiswa kemudian kontrol dari aparat keamanan terhadap aksi mahasiswa di Semarang ini.

---

<sup>148</sup> Faktor pencetus utama dan paling dramatik dalam kebangkitan radikalisme mahasiswa dalam masa reformasi adalah terbakarnya 6 mahasiswa sewaktu terjadi aksi unjuk rasa di seputar kampus Trisakti yang kemudian terkenal dengan nama Tragedi Trisakti. Peristiwa penembakan ini kemudian menyulut solidaritas perlawanan oleh mahasiswa di berbagai daerah dan semakin radikal. mahasiswa yang gugur dalam Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 adalah:

- Elang Mulya Lesmana
- Hery Hartanto
- Hendriawan Sie
- Hafiddhin Rayyan

Salah satu film berdurasi 42 menit 33 detik yang menggambarkan situasi chaos pada peristiwa ini berjudul Gerakan Mahasiswa di Indonesia (12 Mei 1998 – 17 Desember 1998) karya Tino Saroenggalo bersama Jakarta Media Syndication, 1999.

## **1. Mobilisasi dan aksi massa oleh Mahasiswa di Semarang sepanjang bulan Februari hingga Mei 1998**

Pada peristilahan ilmu politik, unjuk rasa merupakan salah satu bentuk partisipasi politik non konvensional.<sup>149</sup> Aksi yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk unjuk rasa merupakan bentuk aktualisasi yang wajar dilakukan dalam praktek politik dimanapun. Namun di Indonesia, aktualisasi politik dalam bentuk unjuk rasa tidak dapat berjalan karena sikap represif rezim. Akibatnya, menipiskan keberanian masyarakat untuk bersikap kritis dan melakukan aksi-aksi politik yang melawan nilai dan kepentingan negara.

Aksi unjuk rasa oleh mahasiswa di Semarang pada medio awal bulan februari 1998 mengusung wacana keprihatinan atas krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Wacana keprihatinan ini menjadi isu utama aksi unjuk rasa mahasiswa karena imbas dari krisis ini sangat dirasakan masyarakat mulai dari kelas menengah hingga kelas bawah yang notabene adalah masyarakat miskin. Aksi unjuk rasa mahasiswa oleh sekitar 150 mahasiswa dari Undip, IAIN Walisongo dan IKIP Semarang dilakukan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah (lebih dikenal dengan nama gedung Berlian). Pada aksi ini 50 perwakilan mahasiswa pengunjuk rasa diterima anggota dewan di Ruang Serbaguna lantai I dan

---

<sup>149</sup>Gabriel A. Almond, Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik, dalam Mochtar Mas'ood dan Collin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*. (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1990). hlm. 46-47. Partisipasi politik yang konvensional misalnya pemberian hak suara dalam Pemilihan Umum, kampanye politik, diskusi politik.

berlangsung sejak pukul 10.00 hingga pukul 13.00.<sup>150</sup> Aksi mahasiswa di Semarang agak terasa terlambat dibanding kota-kota lain, seperti Yogyakarta dan Jakarta, yang lebih dulu melakukan aksi-aksi demonstrasi. Hal ini karena kalender akademik yang ada di kampus-kampus di Semarang bertepatan dengan liburan semester sehingga banyak mahasiswa yang menghabiskan liburan di tempat asalnya dan belum melakukan koordinasi untuk merespon krisis.

Memasuki bulan Maret 1998, geliat aksi unjuk rasa oleh mahasiswa sudah mulai terlihat dan diawali dengan aksi unjuk rasa dan aksi mogok makan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Isu yang diangkat masih seputar keprihatinan atas lonjakan harga-harga kebutuhan pokok sebagai akibat dari krisis moneter, diramaikan pula dengan memasang poster bertuliskan, “Jangan Gantung Nasib Rakyat Demi Ambisi dan Gengsi”.<sup>151</sup> Setelah aksi oleh mahasiswa dari IAIN, giliran mahasiswa dari Fakultas Sastra Undip menggelar aksi keprihatinan dan masih mengusung wacana kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.

---

<sup>150</sup>*Suara Merdeka*, Minggu 15 Februari 1998, hlm. 2, “Mahasiswa Menangis di Depan Dewan”.

<sup>151</sup>*Suara Merdeka*, Rabu 4 Maret 1998, hlm. 2, “Mahasiswa IAIN Gelar Aksi”.

**Gambar 4.** Aksi Keprihatinan di Fakultas Sastra Undip



Sumber: *Suara Merdeka*, Sabtu 7 Maret 1998

Tradisi perlawanan oleh mahasiswa dari fakultas ini memang telah mengakar kuat,<sup>152</sup> aksi ini dimulai sejak pukul 09.00 dipimpin oleh Radjimo (mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah angkatan '94) dan secara istimewa turut dihadiri Dekan Fakultas Sastra Drs. Anhari Basuki dan Pembantu Dekan III Fakultas Sastra Drs. Djuhar Noor, SU. Pada aksi ini juga diramaikan dengan pembacaan puisi oleh Basa Basuki serta pemasangan beberapa poster bertuliskan, “Turunkan Harga Sembako”; “Hapus KKK”; “Kutip Uang Sidang Umum MPR untuk Dibagikan Kepada Rakyat”. Pada aksi ini pula dilakukan pembagian paket beras dan gula dari mahasiswa kepada masyarakat di sekitar kampus fakultas Sastra.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup>Lihat bab III skripsi ini dengan judul Mulai Bergerak: Persemaian Ide Dan Pembentukan Jaringan Antar Elemen Mahasiswa (1990-1997).

<sup>153</sup>*Suara Merdeka*, Sabtu 7 Maret 1998, hlm. 2, “Mahasiswa dan Dosen Sastra Menggelar Aksi Keprihatinan”.

Aksi keprihatinan yang dilakukan mahasiswa dari lingkungan Undip yang cukup besar di bulan Maret digelar di depan Auditorium Imam Bardjo-Pleburan, pada aksi ini terpasang spanduk besar bertulis, “Mimbar Keprihatinan Mahasiswa Undip”. Aksi di Undip kali ini melibatkan massa mahasiswa yang besar, berasal dari beberapa fakultas serta dihadiri pula oleh beberapa Guru Besar seperti Prof. Satjipto Rahardjo, Prof Soehardjo dan Drs. Darmanto Jatman.<sup>154</sup>

**Gambar 5.** Aksi Keprihatinan di Universitas Diponegoro



Sumber: *Suara Merdeka*, Selasa 10 Maret 1998

Aksi serupa juga digelar di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang dihadiri pula oleh kalangan mahasiswa dan dosen yang dilaksanakan di areal parkir kampus mulai pukul 10.00 hingga berakhir pukul 12.00. Aksi ini dinaungi tenda dengan warna gelap yang sengaja dipasang untuk melambangkan rasa keprihatinan atas krisis ekonomi yang berlarut-larut. Aksi di Unissula ini dihadiri

---

<sup>154</sup>*Suara Merdeka*, Selasa 10 Maret 1998, hlm. 2, “Meski Terlambat Aksi di Undip Tidak Meniru”.

oleh Pembantu Rektor III Drs. A. Arif Cholil, SH; Dekan Fakultas Hukum Unissula Mahfud Ali, SH, M.Si; Dekan Fakultas Syariah Drs. A Qadim Soeseno.<sup>155</sup> Pada hari ketiga dalam aksi yang berlangsung di Unissula berlangsung lebih meriah karena disertai aksi teatrical berupa arak-arakan keranda (melambangkan kematian kedaulatan rakyat) dan beberapa mahasiswa yang berpakaian hitam dan berjalan gontai di sekeliling keranda (melambangkan arwah kedaulatan rakyat yang bergentayangan menuntut keadilan). Lalu beberapa mahasiswa yang lain mengucapkan kalimat tahlil sambil menyebar bunga tabur menuju ke mimbar bebas. Pada aksi mimbar bebas ini dibacakan pula sebuah puisi berjudul “Sultan Agung Gugat” yang intinya menggugat kenaikan harga kebutuhan pokok.<sup>156</sup>

Aksi keprihatinan yang digelar di beberapa kampus di Semarang tidak hanya berwujud demonstrasi maupun mimbar bebas melainkan juga dalam format aksi lain dalam bentuk pentas seni yang bertujuan pula mengurangi rasa jenuh mahasiswa dan menghibur mahasiswa yang sedang berunjuk rasa. Di Undip, puluhan mahasiswa yang menamakan diri Solidaritas Umum Mahasiswa Peduli Rakyat (SUMPR) menggelar pentas seni keprihatinan di depan Gedung Perpustakaan Lama kampus Pleburan. Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 ini diramaikan dengan bunyi-bunyian alat musik tradisional seperti *kendang*, *saron*, *seruling*, dan aksi teatrical dari beberapa mahasiswa dengan kostum hitam dan *make-up* wajah bercoreng hitam putih

---

<sup>155</sup>*Suara Merdeka*, Rabu 11 Maret 1998, hlm. 2, “Giliran Unissula Gelar Aksi Keprihatinan”.

<sup>156</sup>*Suara Merdeka*, Jumat 13 Maret 1998, hlm. 2, “Bakar Keranda Warnai Demo di Unissula”.

yang melambangkan keprihatinan atas suasana ekonomi yang tak menentu.<sup>157</sup> Selain itu juga terdapat gelar parade puisi yang bertujuan untuk mengkondisikan mahasiswa agar selalu kritis dalam menghadapi segala persoalan. Pada aksi ini mahasiswa juga menilai intervensi militer kedalam kampus secara berlebihan serta mengajukan tiga tuntutan yaitu merombak kepemimpinan nasional, penurunan harga dan reformasi politik-ekonomi Indonesia.

Mahasiswa-mahasiswa dari kampus Universitas Tujuh belas Agustus (Untag) Semarang juga tak ketinggalan melakukan aksi keprihatinan. Aksi ini dilaksanakan di kampus jalan Imam Bonjol. Para mahasiswa berkumpul di halaman kampus dan mengibarkan bendera merah putih setinggi setengah tiang. Aksi bertajuk Aksi Spontanitas Mahasiswa Untag Peduli Penderitaan Rakyat ini dimulai pukul 10.00 dipimpin oleh Gendon dari Fakultas Ilmu Politik (Fisip Untag) mengajukan tuntutan reformasi bidang politik, ekonomi dan hukum. Selain di Untag, aksi keprihatinan juga dilakukan mahasiswa-mahasiswa dari kampus Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang. Sebanyak 200 mahasiswa IKIP Semarang berkumpul sejak pukul 10.00 dan pemasangan poster bertuliskan, "*Dadi Pejabat Aja Nganti Mlarat, Dadi Rakyat Aja Nganti Sekarat*". Sedianya di IKIP Semarang juga akan melakukan pentas seni di kampus Sekaran dengan tema "Seni Peduli", yang didukung pekerja seni teater kampus "SS" serta akan menghadirkan para alumni

---

<sup>157</sup>*Suara Merdeka*, Rabu 18 Maret 1998, hlm. 2, "Pentas Seni dan "Gantung diri" Warnai Aksi".

seperti wartawan Triyanto Triwikromo dan Prof. Tjetjep Rohendi Rohidi, namun acara yang jauh-jauh hari sudah direncanakan ini batal.<sup>158</sup>

Gerakan mahasiswa yang terjadi di Semarang, begitu pula yang terjadi dengan kota-kota lain, semakin masif dan melebarkan isu wacana bukan saja mengenai penurunan harga tetapi telah merambah di bidang politik seperti reformasi kepemimpinan nasional. Minggu pertama bulan April 1998, dibawah guyuran hujan deras, mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata-Semarang berunjuk rasa keluar dari kampus sejak pukul 09.30. Sambil membawa spanduk bertuliskan, “Rapatkan Barisan, Hentikan Ketidakadilan”, para pengunjuk rasa ini berjalan keluar kampus namun dihadang aparat militer dibawah Dandim 0733/BS Semarang Letkol. Art. Supriyatno. Setelah melakukan negoisasi dengan aparat keamanan akhirnya dicapai kesepakatan bahwa batas berdemonstrasi tidak melampaui terowongan jalan tol.<sup>159</sup>

Para mahasiswa dari SMPT Undip kembali menggelar aksi keprihatinan di dalam kampus namun dalam aksi kali ini massa pengunjuk rasa terpecah menjadi dua kubu, kubu pertama dibawah pimpinan Lambertus dari Fakultas Ekonomi menghendaki supaya aksi dilakukan keluar kampus dan kubu kedua dibawah kendali Tafrikhan selaku Ketua SMPT Undip. Ketika psikolog Darmanto Jatman melakukan orasi, kubu pimpinan Lambertus bergerak meninggalkan kampus sambil membawa

---

<sup>158</sup>*Suara Merdeka*, 23 Maret 1998, hlm. 9, “Peduli Negeri di IKIP”.

<sup>159</sup>*Suara Merdeka*, Sabtu 4 April 1998, hlm. 2, “Aksi di UGM Berubah Menjadi Kerusuhan”.

bendera merah putih dan memaki-maki SMPT. Usaha mereka untuk keluar kampus gagal karena di luar gerbang telah siap petugas keamanan lengkap dengan pentungan dan gas air mata. Lalu mereka berusaha bernegosiasi dengan Kapoltabes Kolonel. Pol. Drs. Soenarko DA (selaku pimpinan para petugas keamanan) supaya diberi izin keluar dari gerbang Undip. Negoisasi ini tidak membuahkan hasil sehingga jadilah mereka menggelar aksi tandingan didekat gerbang. Selama satu setengah jam didalam kampus Undip terjadi dua aksi keprihatinan yang bersamaan, orasi dan puisi dari kubu SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) menghadirkan Drs. Novel Ali dan Prof. Soehardjo. Para mahasiswa dari kubu SMPT, dibawah pimpinan Tafrikhan, berjaket almamater berikat kepala kuning merah meneriakkan, “satu komando, satu tujuan!” ketika melihat perpecahan itu. Pada pukul 11.00, Mudrick Setiawan M. Sangidoe (ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Surakarta) datang ke Undip dan memberikan orasi. Jadilah dia berorasi di dua kubu tersebut guna menghindari perpecahan yang lebih parah. Pada pukul 12.25 mahasiswa bersikeras hendak keluar kampus menuju gedung DPRD namun tetap tidak diizinkan oleh aparat keamanan dan akhirnya keinginan ini memang dibatalkan ketika mendapat kabar bahwa para wakil rakyat sudah pulang.<sup>160</sup>

Sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Suara Mahasiswa Indonesia (SMI) yang beranggotakan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Semarang menggelar aksi unjuk rasa di bekas Gedung Perpustakaan Pusat Undip sejak pukul

---

<sup>160</sup>*Suara Merdeka*, Rabu 15 April 1998, hlm. 2, “Mahasiswa Terpecah Menjadi Dua, Mudrick Jadi Rebutan”.

11.00. Dari sini kelompok mahasiswa ini bergerak menuju Gedung DPRD Tk I di Jalan Pahlawan namun dihadang aparat keamanan di gerbang kampus. Akhirnya mereka hanya menggelar orasi dan membaca puisi di dekat gerbang kampus Undip.<sup>161</sup>

Wacana-wacana yang digulirkan oleh kalangan mahasiswa Semarang pada era reformasi tidak hanya mengemukakan hal-hal yang bersifat nasional seperti krisis ekonomi dan reformasi politik namun juga menyentuh isu lokal yang sedang berkembang di masyarakat yaitu pemilihan kepala daerah tingkat I atau pilkada Gubernur Jawa Tengah. Wacana lokal ini berkembang cukup dinamis di kalangan aktivis gerakan mahasiswa di Semarang karena *pertama*, secara geografis Semarang menjadi ibukota propinsi Jateng sehingga pengelolaan isu pilkada Gubernur akan lebih efektif; *kedua*, *sharing* informasi pilkada yang lebih lengkap; *ketiga*, ini merupakan kekayaan wacana, yang unik, yang dimiliki kalangan aktivis gerakan di Semarang karena mereka tidak terjebak dalam pengelolaan isu nasional.

Upaya pengelolaan isu pilkada Gubernur ini direspon positif dari kalangan mahasiswa Undip yang tergabung dalam organ mahasiswa SMPT. Mereka telah membuat jajak pendapat mengenai pencalonan Gubernur dengan hasil 93,6% responden mahasiswa menolak pencalonan kembali Gubernur saat itu yaitu Soewardi dan hanya 5,9% setuju dengan pencalonan Soewardi. Hasil jajak pendapat mengenai tokoh-tokoh yang diharapkan dapat berpotensi menduduki kursi Gubernur menurut

---

<sup>161</sup>*Suara Merdeka*, Kamis 16 April 1998, hlm. 12, “Hujan Batu Warnai Demo di UNS”.

jajak pendapat dari SMPT Undip ini adalah Soetrisno Soeharto sebesar 40,4%; Mardiyanto sebesar 24,6%; Muladi sebesar 7,7%; Mayjend Djoko Soebroto 6%. Hasil jajak pendapat ini akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Tk I yaitu Alip Pandoyo namun gagal ditemui.<sup>162</sup>

Aksi penentangan pencalonan Soewardi sebagai gubernur periode 1998-2003 dilakukan mahasiswa Undip yang tergabung dalam organ SMPT Undip dilakukan di halaman Joglo PKM (Pusat Kegiatan Mahasiswa). Aksi ini hanya diikuti puluhan mahasiswa tanpa memasang poster dan spanduk hanya memakai jaket almamater. Aksi ini dilakukan dengan berkeliling kampus Undip mulai dari fakultas Fisip, Hukum, Ekonomi dan Sastra dan sekembalinya di gerbang Undip mereka kembali dihadang aparat keamanan. Pada saat aksi ini berlangsung bertepatan dengan acara seminar mengenai otonomi daerah di Gedung Prof.Ir. Soemarman. Rencananya acara ini akan dihadiri Mendagri R. Hartono namun dia batal hadir. Pada acara seminar ini hadir pula Walikota Semarang Soetrisno Soeharto yang ikut menenangkan mahasiswa. Aksi penolakan pencalonan Soewardi sebagai Gubernur juga berlangsung di kampus III IAIN Walisongo dengan menggelar mimbar bebas<sup>163</sup>

Aksi unjuk rasa dengan melakukan pembakaran boneka terjadi di kampus III IAIN Walisongo. Aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh para mahasiswa IAIN yang tergabung dalam Masyarakat IAIN Untuk Perubahan (MIUP) dengan mengusung

---

<sup>162</sup>*Suara Merdeka*, Sabtu 18 April 1998, hlm. 1, “Mahasiswa Undip Gagal Temui Ketua DPRD”.

<sup>163</sup>*Suara Merdeka*, Jumat 24 April 1998, hlm. 12, “Mahasiswa Tuntut Sidang Istimewa”.

tema reformasi. Aksi yang dimulai sejak pukul 10.30 ini meramaikan kampus III dengan poemasangan spanduk bertuliskan, “Mengapa Membela Rakyat Dianggap Tindakan Subversif ?”; “Siapapun Berhak Bicara Politik dan Demokrasi”; “Tekad Kami Tuntutan Perubahan”.

**Gambar 6.** Aksi demo oleh mahasiswa dari IAIN Walisongo



Sumber: *Suara Merdeka*, Minggu 19 April 1998

Aksi ini ditutup dengan pembakaran boneka yang menyimbolkan pemerintah Orde Baru serta pembacaan *statement* MIUP yaitu menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan reformasi politik sebagai prasyarat reformasi total.<sup>164</sup>

Aksi-aksi mahasiswa memasuki bulan Mei 1998 tidak nampak akan mereda bahkan terlihat semakin radikal. Format aksi juga semakin demonstratif-atraktif. Kekayaan wacana bukan saja nasional namun juga wacana lokal. Wacana nasional yang diusung pun tidak hanya berkutat pada masalah ekonomi saja melainkan

<sup>164</sup>*Suara Merdeka*, Minggu 19 April 1998, hlm. 12, “Unjuk Rasa di IAIN Walisongo Diwarnai Pembakaran Boneka”.

reformasi total hingga penolakan terhadap Soeharto dan percepatan Sidang Istimewa. Memasuki bulan Mei 1998 demonstrasi di Semarang, diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi. Aksi ini bertempat di *boulevard* kampus Undip serta membuat mimbar bebas di sekitar Patung Pangeran Diponegoro. Beberapa diantara mereka menaiki patung tersebut dengan membawa bendera merah putih. Aksi ini dimulai pukul 10.00, sebelumnya mereka telah berkumpul di halaman Fisip Undip, pertigaan Kantor Pos Jl. Imam Bardjo dan didepan Gedung Bank Indonesia. Dari ketiga titik ini para pengunjung rasa tidak dapat bergerak karena dihadang aparat keamanan. Lalu muncul sekelompok demonstran lain dari arah barat (Jl. Pahlawan), para pengunjung rasa dari ketiga titik tadi bernegosiasi dengan aparat untuk menggabungkan diri bersama kawan-kawan mereka yang telah sampai di Bundaran Air Mancur Jl. Pahlawan namun ditolak aparat sehingga bentrokan tidak dapat dihindarkan.

**Gambar 7.** Aksi demo mahasiswa di Patung Diponegoro



Sumber: *Suara Merdeka*, Jumat 1 Mei 1998

Para mahasiswa akhirnya dapat menembus blokade aparat meskipun beberapa mahasiswa terkena pentungan aparat keamanan. Sekitar pukul 11.00 jumlah pengunjung rasa mencapai ribuan orang antara lain mahasiswa-mahasiswa dari Undip, IAIN Walisongo, Untag, Unissula, Unika Soegijapranata. Pada aksi ini mahasiswa menuntut reformasi total dan mengancam tidak adanya perlindungan hak asasi manusia kepada rakyat.<sup>165</sup>

Organisasi mahasiswa ekstra universitas yang ada di Semarang tidak mau ketinggalan untuk turut aktif terjun dalam kancah aksi reformasi, mereka dengan menamakan diri Forum Pemuda Kebangsaan Indonesia (FKPI) Semarang menyampaikan pernyataan sikap mengenai krisis yang melanda Indonesia.<sup>166</sup>

Unjuk rasa yang melibatkan ratusan massa kembali muncul, sekarang mereka menamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Indonesia (AMRI). Aksi ini terjadi ketika berlangsung seminar dengan tema “Mencari Format Reformasi Ekonomi, Politik dan Hukum” yang bertempat di Gedung Antonius kampus Unika Soegijapranata. Pembicara dalam seminar ini adalah Letjend. Bambang Triantoro ketua Yayasan Kerukunan dan Persaudaraan Kebangsaan (YKPK); Prof. Soehardjo, SH dan Dr. Mohammad Ali. Setelah seminar selesai, ketiga pembicara ini didaulat

---

<sup>165</sup>*Suara Merdeka*, Jumat 1 Mei 1998, hlm. 12, “Mahasiswa Duduki Patung Diponegoro”.

<sup>166</sup>FKPI terdiri dari lima organisasi mahasiswa yaitu Pimpinan Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), PC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), PC Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), PC Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan PC Pemuda Katholik Semarang. *Suara Merdeka*, Sabtu 2 Mei 1998, hlm. 12, “Ratusan Pekerja Bergabung di UNS”.

pengunjuk rasa untuk memberikan orasi singkat. Bambang mengemukakan bahwa YKPK telah meminta MPR untuk menggelar Sidang Istimewa, Prof Soehardjo mengemukakan bahwa mahasiswa tidak perlu *grusa-grusu* dan tidak menjadi penjilat dan Dr. Mohammad Ali berorasi meminta mahasiswa untuk terus melanjutkan perjuangan reformasi. Ditempat lain, aksi unjuk rasa juga terjadi di kampus III IAIN Walisongo di Jl. Ngaliyan-Boja. Mereka berusaha menerobos blokade aparat yang telah bersiaga dengan tameng dan pentungan maka tak pelak bentrokan pun terjadi, dengan ber-Shalawat Badar mahasiswa berhasil menerobos blokade itu.<sup>167</sup>

Proses unjuk rasa menarik dan unik kembali dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Indonesia (AMRI). Mereka memulai aksinya dari pos polisi lalu lintas di Jatingaleh. Aksi yang diikuti sekitar 120 orang ini mulai berkumpul di sekitar pos polisi pada pukul 07.00, aparat sendiri tidak mengira akan terjadi aksi sehingga terlambat membubarkannya. Setelah massa cukup banyak, spanduk AMRI segera dibentangkan dan melakukan mimbar bebas di tepi jalan raya lalu berjalan menuju kampus Unika Soegijapranata.

Di lain tempat, SMPT Undip melakukan aksi diam atau mogok bicara di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Undip Jl. Imam Bardjo. Pada aksi ini terdapat spanduk

---

<sup>167</sup>*Suara Merdeka*, Minggu 3 Mei 1998, hlm 10, “Para Pakar Didaulat Mahasiswa Ikut Demo”.

bertuliskan, “Aksi Diam Tolak Pelantikan Rektor Kami di Jakarta”; “Mendikbud Takut ke Undip”.<sup>168</sup>

Aksi demonstrasi oleh mahasiswa kembali terjadi di lingkungan Undip, kali ini mahasiswa mengambil momentum acara wisuda yang berlangsung di kampus Tembalang. Pada saat rektor Undip Prof Muladi SH menyampaikan sambutan dihadapan wisudawan, dari arah gedung Politeknik datang ratusan mahasiswa dengan membawa poster menuju tempat berlangsungnya prosesi wisuda.

Melihat aksi para mahasiswa yang berdemonstrasi itu, Prof. Muladi berkata:

“ini adalah wisuda yang khas dan unik karena diwarnai demo mahasiswa, selain itu juga upacara wisuda ini adalah yang terakhir bagi saya, nanti saya akan turun kesana.”<sup>169</sup>

Demonstrasi di tempat lain yang dilakukan mahasiswa di IAIN Walisongo berlangsung dengan bentrok dengan aparat, pada bentrokan ini seorang mahasiswa bernama Achmad Syafruddin tertusuk belati aparat di bagian perut sebelah kiri, lalu lima orang mahasiswa lain terluka di bagian kepala karena pentungan dari aparat

---

<sup>168</sup>Mendikbud pada Kabinet Pembangunan VII adalah Wiranto Arismunandar yang dikenal dulu ketika memecat mahasiswa ITB tahun 1978 akibatnya ketika ia ditunjuk oleh Soeharto menjadi Mendikbud banyak suara minor menolaknya. Wiranto Arismunandar lahir di Semarang tahun 1934 kemudian menyelesaikan SD-SMA di Jawa Timur, mengambil kuliah di Fakultas Teknik Mesin di UI lalu mengambil gelar Master of Science in Mechanical Engineering di Universitas Purdue-AS. Lalu mengambil pendidikan post-graduate pada Departement of Mechanical Engineering di Universitas Stanford-AS. Majalah *D&R*, 28 Maret 1998, hlm 46-47, “Aksi Mahasiswa = Aksi Amatiran?”; Pada pelantikan Rektor Undip yang baru, mahasiswa Undip menghendaki Mendikbud datang sendiri ke Semarang bukan sebaliknya Rektor terpilih yang datang ke Jakarta. *Suara Merdeka*, Sabtu 9 Mei 1998, hlm. 2, “Mahasiswa Unjuk Rasa dari Pos Polisi”.

<sup>169</sup>*Suara Merdeka*, Minggu 10 Mei 1998, hlm. 1, “Muladi dan Guru Besar Ikut Demo”.

keamanan. Bentrokan ini terjadi ketika aksi mahasiswa digelar ditengah Jalan Ngaliyan-Boja, dari situ mahasiswa berjalan sejauh dua ratus meter dari kampus III rombongan ini bermaksud ke gedung DPRD Jateng namun sudah dihadang aparat. Para mahasiswa lalu bernegosiasi agar diijinkan lewat namun ditolak petugas sehingga pecahlah bentrok. Para demonstran melempari aparat dengan batu sedangkan aparat membalas dengan gas air mata sambil mengayunkan pentungan kearah mahasiswa. Para mahasiswa berhamburan menyelamatkan diri kearah kampus atau kearah kampung disekitar kampus III IAIN. Setelah situasi agak reda para demonstran itu kembali kejalan sambil membakar ban-ban bekas serta melempari mobil plat merah yang melintas di sekitar tempat itu.<sup>170</sup>

Demonstrasi massa mahasiswa dengan jumlah besar kembali terjadi, kali ini para demonstran dapat menduduki Gedung Dewan dan Wisma Perdamaian. Rute para demonstran ini adalah berangkat dari Jalan Imam Bardjo lalu melewati Simpanglima kemudian menyusuri Jalan Pandanaran hingga ke rumah dinas Gubernur Jateng, Wisma Perdamaian.

---

<sup>170</sup>*Suara Merdeka*, Rabu 13 Mei 1998, hlm 1, “Hujan Batu di IAIN, 6 Luka Parah”.

**Gambar 8.** Aksi mahasiswa menduduki Wisma Perdamaian



Sumber: *Suara Merdeka*, Kamis 14 Mei 1998

Aksi dimulai pukul 10 dari Auditorium Undip, beberapa guru besar tampak disini diantaranya Prof. Sri Redjeki Hartono, Prof. Soehardjo, lalu menyusuri *boulevard* Undip namun dihadang aparat disekitar Patung Diponegoro. Disini para aparat melakukan kekerasan dengan alat pentungan kepada para demonstran. Lalu aksi terpecah menjadi dua, satu kubu berhasil menembus barikade aparat dan berhasil menyeberang ke Gedung Dewan, sementara kubu yang lain melanjutkan aksi ke arah Wisma Perdamaian. Kelompok yang menduduki Gedung Dewan hanya bertahan sepuluh menit lalu bergerak kembali menggabungkan diri dengan kelompok lain yang menuju rumah dinas Gubernur. Pada saat itu seluruh toko yang tersebar di kawasan bisnis Simpanglima dan sepanjang jalan Pandanaran tutup karena mereka khawatir aksi ini akan berlanjut ke tindak kerusuhan. Para demonstran ini ketika sampai di Wisma Perdamaian membentangkan spanduk bertuliskan, “Laksanakan Sidang Istimewa MPR dan Bubarkan Pemilu.” Dan bendera merah putih yang

berkibar satu tiang penuh di halaman Wisma Perdamaian diturunkan menjadi setengah tiang.<sup>171</sup>

Di Semarang, ribuan mahasiswa Semarang menduduki kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan diawali dengan *long march* dari kampus masing-masing yaitu dari arah Tembalang, Bendan Duwur, Pleburan. Beberapa perguruan tinggi yang turut pada aksi ini antara lain dari Undip, Unika Soegijapranata, Unissula, IAIN Walisongo, Stikubank (Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan), STMIK (Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer), USM (Universitas Semarang) dan beberapa akademi lain. Disepanjang jalan yang dilewati, massa demonstran meminta kantor atau instansi mengibarkan bendera setengah tiang sebagai ungkapan belasungkawa atas gugurnya mahasiswa pada Peristiwa Semanggi. Rombongan mahasiswa dari Undip-Tembalang, Politeknik, Unika Soegijapranata, melakukan *long march* bersama dari kawasan Semarang-atas.

Pada saat rombongan melewati Akademi Polisi di Jalan Sultan Agung terjadi keributan kecil karena massa menuntut untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang semula petugas yang ada di Akpol ini menolak namun melihat jumlah massa yang besar akhirnya mereka mengibarkan bendera setengah tiang juga. Di lain

---

<sup>171</sup>*Suara Merdeka*, Kamis 14 Mei 1998, hlm. 2, “Ribuan Mahasiswa Menduduki Wisma Perdamaian”.

tempat, para mahasiswa dari kawasan Semarang-bawah telah berkumpul di Simpanglima dan sekitar Jalan Pahlawan.<sup>172</sup>

Para mahasiswa yang telah berkumpul di Simpanglima ini melihat arak-arakan demonstran lain yang datang dari kawasan Semarang-atas, yang telah tampak turun disekitar Hotel Siranda, segera menyambut dengan nyanyian atau teriakan hangat seperti saudara lama berpisah. Kedua massa mahasiswa ini bertemu di sepanjang Jalan Pahlawan sambil saling memberi salam. Lalu rombongan besar mahasiswa ini bergerak bersama kearah Simpanglima dan berhenti sementara di Masjid Baiturrahman untuk berorasi menggunakan pengeras suara milik masjid.

Pada arak-arakan ini juga diusung keranda dan beberapa mahasiswa melakukan tabur bunga disepanjang jalan. Setelah mengitari Simpanglima para demonstran berhenti di bundaran air mancur Jalan Pahlawan sambil menyanyikan lagu Gugur Bunga. Dari sini massa demonstran bergerak menuju Gedung DPRD lalu mereka merusak baliho bergambar Presiden dan Wakil dan membakarnya. Aksi ini dihadiri oleh walikota Semarang Soetrisno Soeharto, Ketua DPRD Jateng H. Alip Pandoyo, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan H. Thoyfoer MC, Ketua Fraksi

---

<sup>172</sup>Para pemilik pertokoan di kawasan ini memilih menutup toko untuk menghindari jika terjadi kerusuhan, hal ini digunakan oleh para pramuniaga untuk “beristirahat” duduk di tepi jalan sambil melihat aksi demonstrasi yang digalang mahasiswa. Beberapa bank di sekitar Jalan Pandanaran, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pemuda tidak berani melakukan pelayanan seperti biasa, untuk pelayanan nasabah mereka menggunakan pintu belakang. *Suara Merdeka*, Jumat 15 Mei 1998, hlm. 2, “Toko di Simpanglima Tutup”.

Karya Pembangunan H. Moch Hasbi dan Dekan FISIP Undip Drs. Novel Ali.<sup>173</sup>  
Menjelang pukul 14.30 ribuan mahasiswa ini bergerak kembali menuju Gedung RRI (Radio Republik Indonesia) di Jalan Ahmad Yani dan mendudukinya, beberapa mahasiswa naik ke lantai II untuk bertemu dengan kepala stasiun RRI Bagus Giarto BSc yang disaksikan Kapoltabes Semarang Kol. Pol. Drs. Soenarko DA.

**Gambar 9.** Aksi mahasiswa menduduki Stasiun RRI



Sumber: *Suara Merdeka*, Jumat 15 Mei 1998

Para mahasiswa ini ingin menyiarkan pernyataan sikap yang berbunyi:

“Semarang, 14 Mei 1998 pukul 14.50  
Pernyataan sikap mahasiswa se- Jateng  
Melihat kondisi sosial, politik dan ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, maka kami mewakili mahasiswa seluruh Jawa Tengah menuntut penyelenggara negara ini untuk segera mengadakan Sidang Istimewa MPR sekaligus agar Presiden Soeharto mengundurkan diri, segera melaksanakan reformasi, menurunkan harga-harga dan menghentikan kekeasan terhadap mahasiswa dan masyarakat.  
Ttd mahasiswa Jateng

---

<sup>173</sup>*Suara Merdeka*, Jumat 15 Mei 1998, hlm 2, “Mahasiswa Duduki Gubernurnuran, Copot Baliho Presiden dan Wapres”.

Salam Reformasi.”<sup>174</sup>

Pihak RRI menyetujuinya dan mengudarakan pernyataan mahasiswa ini dua kali yaitu pukul 15.00, lalu 15.15 dan pukul 15.30.

Hari kedua aksi solidaritas mahasiswa masih berlangsung di kantor gubernur Jalan Pahlawan dan dari segi peserta lebih heterogen diantaranya dari aktivis LSM, forum studi, Solidaritas Perempuan Semarang untuk Reformasi, biarawati-biarawan Keuskupan Agung Semarang, aktivis PDI Pro Mega, para anggota Akademi Maritim Nasional Indonesia (AMNI) serta para mahasiswa yang telah berdemo hari sebelumnya. Para orator bergantian menyampaikan orasi, diantaranya adalah fungsionaris PDI pro Mega Mardijo, Rektor Unika Soegijapranata Dr. A.L Purwa Hadiwardaya MSF, biarawan Keuskupan Agung Semarang, Kyai Arifin dari pondok pesantren Nuriyah Saka Tunggal dan Prof. DR. Sri Redjeki Hartono SH dari Solidaritas Perempuan Semarang untuk Reformasi. Hingga pukul 16.30 para demonstran tidak beranjak meskipun berada dibawah hujan deras.

Para mahasiswa tetap menduduki kantor Gubernur hingga semalaman untuk meneruskan aksi. Ditempat lain, di auditorium Undip Pleburan, setelah salat Jumat juga berlangsung aksi yang dihadiri beberapa guru besar antara lain Prof. Ir. Eko Budihardjo, Prof. Dr. Suharyo Hadisaputra, Drs. Darmanto Jatman, dr. Tjenol Puger, Prof. Hartono Kasmadi, Prof. Barda Nawawi SH, Drs. Novel Ali, Prof. Dr. Sri

---

<sup>174</sup>*Suara Merdeka*, Jumat 15 Mei 1998, hlm. 2, “Rebut RRI Minta Tuntutan Disiarkan Tiga Kali”.

Redjeki Hartono, Ir. Nuniek Sriyuningsih, Kartini Soejendro dan mantan Gubernur Jateng HM. Ismail.<sup>175</sup>

Aksi-aksi di Semarang sempat berhenti tiga hari karena ada isu mengenai datangnya perusuh yang dikirim untuk membuat rusuh di Semarang. Dikalangan mahasiswa sendiri “liburnya” demonstrasi karena beberapa faktor:

1. Ada pihak lain dalam intern mahasiswa yang mulai main setting sendiri sehingga mengurangi kekompakan;
2. Ada isu mengenai datangnya perusuh dari luar kota; dan
3. Pembentukan konsep dan strategi demonstrasi.

Pada “liburan” demonstrasi ini, sekelompok wanita dengan nama Solidaritas Perempuan Semarang untuk Reformasi menyerahkan pernyataan bersama kepada Walikota Sutrisno Soeharto yang isinya berhubungan dengan kondisi sosial, politik dan ekonomi yang terjadi Indonesia.<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup>*Suara Merdeka*, Sabtu 16 Mei 1998, hlm. 2, “Ratusan Ribu Massa Bertahan di Tengah Hujan”.

<sup>176</sup>Para anggota SPSuR antara lain: Prof.Dr. Sri Redjeki Hartono; DR. AM Djulianti Soerojo; Dra. Herniwati RH, MS; Paramitha P SH LLM; Ir. Nunik Sriyuningsih MS; Dra. Indriyastuti MS; Dra. Frieda NRH MS; Dra. Ari Pradhanawati MS; Dra. Niken Rahayu MS; Dra. Oerip Lestari MS; Dra. Wuryanti MM; Dra. Tatik Harahap; Widanti SH; Nyonya Satjipto Rahardjo dan Dra. Tutut Hendrastuti MBA. *Suara Merdeka*, Minggu 17 Mei 1998, hlm. 2, “Ada Isu Kedatangan Perusuh, Aksi Ditunda”.

**Gambar 10.** Solidaritas Perempuan Semarang untuk Reformasi



Sumber: *Suara Merdeka*, Kamis 14 Mei 1998

Aksi mahasiswa di Semarang kembali terjadi setelah tiga hari libur, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Semarang menggelar orasi dan mimbar bebas didepan kantor gubernur. Para demonstran ini menuntut dilakukan reformasi total dan menuntut MPR menggelar Sidang Istimewa dan membersihkan jajaran legislatif dari anggota yang tersangkut korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>177</sup> Aksi-aksi yang terjadi di Semarang semakin heterogen karena ada koordinasi antara mahasiswa dan rakyat yang padu dan tuntutan mereka semakin mengerucut pada pencabutan mandat oleh MPR kepada Soeharto.

Pada hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998, peringatan dalam bentuk aksi digelar di halaman kantor gubernur. Aksi ini merupakan akbar oleh segenap lapisan masyarakat Semarang, jumlah demonstran sangat banyak hingga meluber hingga Simpanglima.

---

<sup>177</sup>*Suara Merdeka*, 19 Mei 1998, hlm. 2, “Kami Tidak Butuh Reshuffle Kabinet”.

**Gambar 11.** Aksi mahasiswa menduduki Gedung Berlian



Sumber: *Suara Merdeka*, Kamis 21 Mei 1998

Dugaan akan terjadi kerusuhan pada hari itu ternyata tidak terjadi, aksi berjalan tertib.

Gelombang demonstrasi mahasiswa yang didukung berbagai elemen masyarakat akhirnya dapat memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatan yang telah ia pegang selama 32 tahun, pada 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB di Istana Merdeka, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya:

“...saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan kabinet Pembangunan VII, namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut...Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi...Dengan memperhatikan keadaan diatas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada didalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai

Presiden RI, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.”<sup>178</sup>

**Gambar 12.** Mahasiswa di Patung Diponegoro sujud atas *lengser-nya* Soeharto



Sumber: *Suara Merdeka*, Jumat 22 Mei 1998

Pidato pengunduran diri Soeharto sebagai presiden segera disambut dengan sukacita oleh seluruh mahasiswa dan rakyat yang telah sejak empat bulan terakhir melakukan unjuk menentang Soeharto. Di Semarang, aksi “kemenangan” mahasiswa dilakukan dengan berbagai cara seperti berkeliling kota, sujud syukur, memotong rambut.

---

<sup>178</sup>Muridan S. Widjojo, “Turunkan Harga Atau Kami Turunkan Kamu...”, *op.cit.*, hlm. 175-176.

## **2. Dukungan rakyat Semarang atas aksi-aksi mahasiswa selama kurun waktu Februari-Mei 1998**

Aksi keprihatinan di kampus-kampus, di kota Semarang, yang telah muncul sejak Februari 1998 mulai mendapat dukungan dari segenap staf pengajar dan pimpinan perguruan tinggi. Gejala ini merupakan tanda hubungan baru antara mahasiswa dan warga kampus (*civitas academica*). Keterlibatan para pimpinan perguruan tinggi, staf pengajar dan guru besar dalam mimbar-mimbar bebas yang digelar mahasiswa telah mengakhiri suatu ketegangan antara birokrat kampus dengan mahasiswa yang selama era Orde Baru selalu dipertahankan.<sup>179</sup>

Bentuk aliansi mahasiswa dengan *civitas academica* ini pertama kali dilakukan di Universitas Indonesia pada 25 Maret 1998, lalu “merembet” ke berbagai kampus di seluruh Indonesia. Di Semarang sendiri, bentuk aliansi ini muncul pertama kali di Fakultas Sastra Undip yang pada saat itu dihadiri oleh Dekan Fakultas Sastra Drs. Anhari Basuki dan Pembantu Dekan III Drs. Djuhar Noor, SU. Lalu disusul Universitas Islam Sultan Agung yang dihadiri pula oleh Pembantu Rektor III Drs. A. Arif Cholil, SH sementara di Universitas Katolik Soegijapranata dihadiri pula oleh Purek III Ir. D. Budi Setijadi, MT.<sup>180</sup> Pada kurun waktu bulan Maret hingga Mei, di Semarang, setidaknya terdapat 7 kali aksi-aksi mahasiswa ini yang melibatkan pihak rektorat, pihak dekanat, dosen dan para guru besar. Dukungan dari pihak birokrat

---

<sup>179</sup> *Ibid.*, hlm. 160-161.

<sup>180</sup> Lihat bab IV skripsi ini dengan judul sub-subbab Aksi-aksi Unjuk Rasa oleh Mahasiswa di Semarang sepanjang bulan Februari hingga Mei 1998.

kampus terhadap aksi-aksi mahasiswa ini semakin memudahkan dalam mobilisasi massa mahasiswa sehingga menambah kekuatan massa aksi.

Dukungan terhadap aksi-aksi menuntut reformasi juga muncul dari kalangan seniman dan budayawan Semarang, setidaknya 31 seniman dan budayawan Semarang berkumpul di kediaman Drs. Darmanto Jatman SU untuk membuat Deklarasi Kebudayaan Orde Reformasi.

Bunyi Deklarasi Kebudayaan Orde Reformasi adalah sebagai berikut:

“Pada dasarnya kebudayaan merupakan perjuangan manusia untuk menegakkan harkat dan martabat hidupnya yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan jaman. Karena itu perlu upaya reformasi kebudayaan yang memberdayakan keberadaan manusia. Kini, langit kebudayaan makin kelam, kita harus melakukan perubahan untuk mencapai tataran nilai kemanusiaan yang utuh. Maka kita perlu kunci pembuka pintu fajar peradaban Orde Reformasi melalui:

1. penolakan terhadap formalisme konstitusi
2. pengembalian wacana rakyat kepada rakyat
3. pemberdayaan akal budi
4. pemulihan kemerdekaan kreatif
5. penghargaan terhadap kemajemukan nilai-nilai kebenaran semoga Tuhan meridhai perjuangan kita.”<sup>181</sup>

Dukungan lain juga muncul dari kalangan organisasi profesi, diantaranya adalah dari Masyarakat Sejarawan Indonesia cabang Jawa Tengah yang diketuai oleh DR. A.M.

---

<sup>181</sup>*Suara Merdeka*, Sabtu 16 Mei 1998 hlm 1, “Budayawan Semarang Tuntut Pemberdayaan Akal Budi”. Ke-31 penandatanganan deklarasi ini adalah: Triyanto Triwikromo, Joko J. Prihatmoko, Nugroho, Darmanto Jatman, Agus Erma Surya, Yudiono KS, Tjetjep Rohendi Rohidi, Trisnadi Waskito, Jabir al faruqi, Shodiq Abdullah, Trias Yusuf PUT, Baihaqi, Abdullah Salim, Ani, Nurdin H Kistanto, Yehma KR, Totok Rusmanto, Pudak Sumirat, Warih Wisatsama, Timur Sinar Suprabana, Pong, Anggoro Suprapti, Prie GS, Hasan Aoni Aziz, Djawahir Muhammad, Gunoto Sapparie, Nana Swarasama, Hendro Basuki, Gunawan Budi Susanto dan Budi Maryono.

Djuliati Soerojo (sejarawan dari Undip) yang terungkap dari pernyataannya sebagai berikut:

“berdasarkan perjalanan historis, mahasiswa Indonesia merupakan pelopor pembaharuan. Mahasiswa memegang peranan penting dalam perjuangan bangsa tahun 1908, 1928, 1945 dan 1966. Karena itu kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mendukung secara aktif reformasi total yang diperjuangkan mahasiswa sampai berhasil.”<sup>182</sup>

Para rohaniwan di Semarang juga membantu lewat dukungan spiritual kepada para mahasiswa, hal ini tampak ketika para rohaniwan Katholik melakukan misa arwah di SMU Don Bosko yang dihadiri 700 orang terdiri dari mahasiswa katolik, pelajar, para suster dan frater. Misa arwah ini dipimpin oleh Romo Pramudyarhari SJ dan misa ini ditujukan kepada para arwah mahasiswa yang menjadi korban penembakan oleh aparat keamanan pada Tragedi Trisakti. Pada saat berlangsung salat jum'at di pelataran Gedung Berlian juga disampaikan khotbah dengan judul “Reformasi” yang dibacakan oleh Zakaria “jack” Al Anshari.<sup>183</sup>

### **3. Kontrol aparat terhadap aksi-aksi mahasiswa pada kurun waktu bulan Februari hingga Mei 1998 di Semarang**

Kontrol ketat aparat negara, baik aparat sipil maupun aparat keamanan, terhadap aksi-aksi mahasiswa dalam menuntut reformasi telah mulai nampak sejak bulan Februari 1998 atau beberapa saat menjelang Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat

---

<sup>182</sup> *Suara Merdeka*, Kamis 14 Mei 1998, hlm. 1.

<sup>183</sup> *Suara Merdeka*, Sabtu 16 Mei 1998, hlm 2, “Ratusan Ribu Massa Bertahan di Tengah Hujan”.

pada bulan Maret 1998. Kontrol aparat sipil di Semarang terhadap mahasiswa menjelang SU MPR misalnya adalah munculnya surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah kepada pihak Undip yang isinya adalah membantu pemerintah dalam melancarkan jalannya SU MPR di Jakarta. Maka untuk menjaga stabilitas negara, pihak rektorat Undip terpaksa memulangkan secara dini ke-1.440 mahasiswanya yang sedang melakukan KKN di 3 kabupaten yaitu Pekalongan, Batang dan Jepara.<sup>184</sup>

Situasi nasional paska SU MPR 1998 semakin tidak menentu karena krisis ekonomi tidak kunjung mereda dan maraknya aksi-aksi keprihatinan di kampus-kampus, melihat keadaan ini Panglima ABRI Jendral TNI Wiranto mengeluarkan pernyataan keras bahwa jika aksi-aksi keprihatinan yang dilakukan mahasiswa menimbulkan kerawanan maka mereka akan berhadapan dengan aparat keamanan.<sup>185</sup> Setelah keluar pernyataan ini, dalam setiap aksi mahasiswa di kampus-kampus, di Semarang, selalu mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Kehadiran aparat keamanan di kampus mendapat kritikan keras dari mahasiswa dan civitas academica seperti yang tampak dalam sebuah mimbar bebas yang digelar di Unika Soegijapranata. Pada mimbar bebas di Unika ini para mahasiswa dan civitas

---

<sup>184</sup> Lihat bab IV skripsi ini dengan judul subbab Kristalisasi gerakan reformasi oleh mahasiswa di Semarang.

<sup>185</sup> *Suara Merdeka*, Jum'at 13 Maret 1998, hlm. 1, "Pangab: Asal Tetap di Kampus".

academica secara tegas menolak kehadiran aparat keamanan di kampus karena hal ini melanggar otonomi kampus.<sup>186</sup>

Kontrol dari aparat birokrat pemerintah juga beragam misalnya ajakan berdialog kepada mahasiswa dari Panglima ABRI Jendral Wiranto. Ajakan berdialog ini disebarkan melalui undangan kepada unuversitas-univesitas di seluruh Indonesia namun justru mendapatkan respon negatif dari kalangan aktivis intra universitas karena yang bertanda tangan dalam undangan itu bukan dari pemerintah melainkan dari Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKBLA). Respon negatif dari kalangan mahasiswa Semarang terhadap undangan ini misalnya terlihat dari pernyataan ketua Senat mahasiswa Undip, Tafrikan sebagai berikut:

“selama pengundang bukan dari pemerintah, tidak ada niat dari kami untuk datang, itu berarti pemerintah tidak punya keinginan untuk berdialog.”<sup>187</sup>

Dalam susunan Kabinet Pembangunan VII terlihat komposisi nepotisme yang mencolok, selain itu terdapat beberapa nama menteri yang tidak populer di kalangan mahasiswa antara lain menteri pendidikan nasional (Mendiknas) Wiranto Arismunandar. Mendiknas memandang mahasiswa yang melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut reformasi adalah politisi amatiran kontan saja reaksi ini

---

<sup>186</sup> *Suara Merdeka*, Sabtu 14 Maret 1998, hlm. 2, “Kehadiran Aparat Dipertanyakan”.

<sup>187</sup> *Suara Merdeka*, Kamis 2 April 2008, hlm. 2, “Muladi Diminta untuk Susun Materi Dialog”.

mendapat respon keras baik dari kalangan mahasiswa maupun dari kalangan civitas academica.<sup>188</sup>

Kontrol lain, yang lebih represif, ditunjukkan oleh aparat keamanan dalam mengatasi maraknya demonstrasi oleh mahasiswa. Aparat keamanan berusaha keras menjaga supaya aksi mahasiswa hanya berada dalam lokasi kampus karena akan memudahkan dalam pengontrolan (biasanya aparat berjaga di depan gerbang kampus atau batas kampus dengan jalan). Pada sebuah aksi di Unika Soegijapranata, dibawah hujan deras para mahasiswa berusaha keluar ke jalan namun telah dihadang aparat keamanan di depan terowongan Jatingaleh lalu terjadi negoisasi antara mahasiswa dengan aparat keamanan yang waktu itu dipimpin langsung Dandim 0733/BS Semarang Letkol. Art. Supriyatno. Pada negoisasi ini akhirnya dicapai kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa mahasiswa boleh keluar kampus namun tidak boleh melewati terowongan.<sup>189</sup>

Memasuki bulan Mei aksi-aksi mahasiswa semakin berani dengan membuka ruang bentrok dengan aparat keamanan. Pada sebuah aksi di Jalan Pahlawan, para mahasiswa berusaha menembus barikade aparat untuk menuju gedung DPRD I JAteng, usaha menembus barikade ini berhasil dilakukan meskipun beberapa mahasiswa mendapat luka memar akibat pentungan dari aparat keamanan. Paska Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 di Jakarta, aksi-aksi mahasiswa semakin massif dan

---

<sup>188</sup> *D&R*, 28 Maret 1998, “Aksi Mahasiswa = Politik Amatiran”.

<sup>189</sup> *Suara Merdeka*, Sabtu 4 April 1998, “Aksi di UGM Berubah Menjadi Kerusuhan”.

radikal, hampir setiap aksi demonstrasi selalu jatuh korban baik luka maupun harus meregang nyawa. Pada sebuah aksi yang dilakukan mahasiswa IAIN Walisanga berakhir bentrok hebat diwarnai aksi lempar batu dengan aparat keamanan, hasilnya seorang mahasiswa bernama Ahmad Syafruddin mendapat luka di bagian perut akibat sabetan belati aparat serta 5 mahasiswa IAIN yang lain mendapat luka di bagian kepala akibat pentungan dari aparat.<sup>190</sup>

Panglima Daerah Militer (Pangdam) IV Mayjend. Tyasno Sudharto sempat mengeluarkan pernyataan tembak ditempat bagi perusuh di Semarang namun kekhawatiran terjadinya kerusuhan di tengah demonstrasi mahasiswa di Semarang tidak terbukti.<sup>191</sup> Aksi demonstrasi mahasiswa di Semarang tidak menimbulkan kerusuhan seperti daerah lain karena isu datangnya perusuh dari luar kota adalah isapan jempol yang mungkin ditujukan untuk mengendurkan semangat mahasiswa dan rakyat dalam menuntut reformasi.<sup>192</sup>

### **C. Corak khas Gerakan Mahasiswa di Semarang 1990-1998**

Gerakan mahasiswa di Semarang memiliki sifat-sifat khas yang tidak dimiliki oleh gerakan-gerakan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia. Sejak kurun waktu awal dekade 90-an hingga peristiwa reformasi 98, di Semarang, gerakan mahasiswa yang

---

<sup>190</sup> *Suara Merdeka*, Rabu 13 Mei 1998, "Hujan Batu di IAIN, 6 Luka Parah".

<sup>191</sup> *Suara Merdeka*, Selasa 19 Mei 1998, "Pangdam: Perusuh Ditembak di Tempat".

<sup>192</sup> *Suara Merdeka*, Minggu 17 Mei 1998, hlm. 2, "Ada Isu Kedatangan Perusuh, Aksi Ditunda".

berkembang telah memberikan kontribusi bagi gerakan mahasiswa secara nasional. Berikut ini akan penulis kemukakan mengenai corak khas gerakan antara 1990 hingga masa reformasi 1998, disini penulis membagi corak khas GM di Semarang menjadi dua yaitu periode 1990 hingga menjelang Reformasi 1998 dan periode Reformasi 1998. Alasan penulis membaginya karena antar dua periode waktu ini ada beberapa hal yang membedakannya antara lain: isu / wacana yang diusung, metode aksi, dukungan dari masyarakat, peserta aksi.

### **1. Corak khas Gerakan mahasiswa di Semarang 1990-menjelang Reformasi 1998.**

Pada tahun 1990 jerat korporatisme NKK / BKK telah berakhir dengan diberlakukannya organisasi mahasiswa Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi melalui PP. No. 30 / 1990 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. Meski demikian para aktivis gerakan mahasiswa masih skeptis dengan keberadaan SMPT ini maka kemudian mereka mencari alternatif baru. Pada periode ini pengorganisasian massa aksi dalam jumlah besar masih diikat dengan isu yang diusung misalnya kasus-kasus tanah, aksi moral menentang SDSB (Sumbangan Dana Sukarela Berhadiah) serta isu-isu yang mengusung tema solidaritas terhadap korban represifitas rezim Orde Baru.<sup>193</sup>

---

<sup>193</sup> Kasus tanah misalnya kasus pembangunan waduk kedung ombo; aksi moral menentang SDSB misalnya Pawai Alegoris Menolak SDSB yang dilakukan FMS; isu solidaritas korban represifitas rezim misalnya aksi menentang penahanan Poltak dan Lukas dalam Peristiwa Golput '92 dan aksi menentang pembredelan pers mahasiswa. Lihat bab III skripsi ini dengan judul Mulai Bergerak: Persemaian Ide Dan Pembentukan Jaringan Antar Elemen Mahasiswa (1990-1997).

Metode aksi yang dipakai dalam gerakan mahasiswa periode ini masih berada dibawah bayang-bayang gerakan mahasiswa tahun 1980-an yaitu metode aksi massa dan metode penyadaran kultural dalam bentuk penyadaran sosial politik. Namun, para aktivis GM di Semarang tidak memperdebatkan mengenai masalah ini karena mereka memandang kedua metode itu dapat digunakan secara beriringan tanpa terjebak dalam usaha saling menuduh dan saling membenarkan. Corak khas dari GM tahun 1990 ini adalah dimulainya *networking* GM antarkota yang memungkinkan membentuk organisasi yang lebih kuat. Para aktivis di Semarang telah memulainya dengan pembentukan KSKPKO (untuk kasus Kedungombo), FORKOMM (untuk kasus Golput '92), pembentukan SMID, Formasal (dalam FPPI) dan terbentuknya KAMMI. *Networking* dalam skala nasional ini dapat memudahkan dalam menyeragamkan aksi serta mengolah isu bersama, selain itu dalam beberapa kasus seperti SMID telah menjalin jaringan internasional.

Pada periode ini, GM di Semarang masih belum mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat karena belum adanya sebuah peristiwa sosial yang menjadi integrator dalam sebuah gerakan. Masyarakat masih cenderung melihat gerakan mahasiswa adalah sebuah aksi dari golongan menengah yang merasa terpinggirkan sehingga muncul anggapan bahwa gerakan mahasiswa belum mewakili kepentingan seluruh rakyat.

Perkembangan politik di Indonesia pada kurun waktu ini sangat fluktuatif, berbagai masalah sosial politik mulai muncul sehingga membuat pemerintah lebih represif dalam menyelesaikannya. Salah satu titik balik menjelang kejatuhan rezim

Orba adalah peristiwa 27 Juli 1996 (kudatuli), paska peristiwa ini pemerintah mulai melakukan penangkapan terhadap semua gerakan kerakyatan tanpa kecuali kelompok-kelompok mahasiswa.

## **2. Corak khas Gerakan Mahasiswa di Semarang pada masa Reformasi 1998**

Gerakan mahasiswa pada periode 1998 merupakan sebuah catatan tersendiri dalam sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia, mereka mampu menumbangkan sebuah kekuasaan yang telah meng-hegemoni selama 32 tahun. Usaha menumbangkan kekuasaan Orde Baru oleh mahasiswa tidak dilakukan dalam jangka waktu pendek, namun pergulatan ide dan berkali-kali demonstrasi dalam sewindu akhir (1990-1998) pada akhirnya memetik hasilnya juga meskipun jatuh korban yang tidak sedikit baik dari kalangan mahasiswa maupun rakyat. Pada peristiwa reformasi ini hampir seluruh kampus-kampus yang ada turun ke jalan menuntut reformasi, berikut ini akan penulis kemukakan beberapa corak khas gerakan mahasiswa di Semarang pada peristiwa Reformasi 98.

### **a. Tanpa kerusuhan ditengah aksi mahasiswa**

Mobilisasi dan aksi massa oleh mahasiswa di Semarang, pada masa demonstrasi bulan Februari hingga Mei 1998, menorehkan kesan damai dibanding yang terjadi di Solo maupun Jakarta. Kesan damai ini terlihat selama bulan Februari hingga *lengser*-nya Soeharto pada bulan Mei, pada saat gelombang aksi tersebut, di Semarang tidak terjadi peristiwa kerusuhan seperti perusakan fasilitas publik dan pertokoan seperti halnya yang terjadi di

Jakarta atau Solo. Sikap oportunisme kalangan birokrat dan legislatif dengan ikut turun dalam aksi mahasiswa justru bisa dikatakan dapat meredam agresifitas massa aksi.

**b. Krisis moneter sebagai penyatu gerakan**

gerakan mahasiswa dengan metode demonstrasi semakin marak terutama memasuki tahun 1998. Maraknya aksi keprihatinan dan turun ke jalan menjadi pilihan dalam menyuarakan aspirasi mereka karena segala himbauan moral sudah tidak didengarkan oleh pemerintah. Aksi turun ke jalan semakin masif sejak bulan Februari dan terus berlanjut hingga bulan Mei 1998. Krisis moneter yang dialami semua lapisan masyarakat telah menjadi landasan bagi mahasiswa untuk bergerak.

Respon mahasiswa Semarang dalam menyikapi krisis juga bermacam-macam dari sekedar menggelar aksi hingga dalam tindakan meringankan beban sesama dengan menggelar pasar murah bagi rakyat. Dalam hal ini keadaan krisis ekonomi telah mampu menjadi penyatu gerakan mahasiswa terutama di Semarang.

**c. Tidak ada perguruan tinggi yang dominan**

aksi-aksi demonstrasi oleh mahasiswa bulan Februari hingga Mei di Semarang tampak tidak ada sebuah perguruan tinggi yang dominan, beberapa PT di Semarang antara lain UNDIP, IKIP Semarang dan IKIP PGRI, UNIKA Soegijapranata, UNISSULA, UNTAG dan IAIN Walisanga masing-masing memberi kontribusi yang besar dalam setiap aksi. Gerakan mahasiswa periode

ini menolak adanya penokohan karena sangat rentan dalam sebuah gerakan terutama bila tokoh tersebut tertangkap aparat maka gerakan yang ada akan cepat mundur.

Semua perguruan tinggi yang ada di Semarang merasa dalam sebuah “penyatuan” dalam setiap aksi karena mereka juga berkeinginan menunjukkan eksistensi mereka dihadapan perguruan tinggi yang lain.

**d. Kesamaan isu**

beberapa isu yang diangkat dalam setiap aksi di Semarang antara lain turunkan harga; tolak pertanggungjawaban presiden; reformasi total dan turunkan Soeharto. Pada awalnya isu ekonomi masih mendominasi dalam setiap demonstrasi namun memasuki bulan Mei tuntutan mahasiswa semakin mengerucut yaitu reformasi total dan turunkan Soeharto.

**e. Pemanfaatan simbol-simbol kenegaraan**

gerakan mahasiswa pada periode 1998 telah melakukan *trend* dalam melakukan aksi yaitu memanfaatkan atau menguasai simbol-simbol kenegaraan seperti Gedung Berlian (DPRD Tk I Jateng), Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur serta stasiun RRI. Usaha ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan *pressure* yang lebih besar terhadap aparat pemerintah.

**f. Dukungan penuh dari segenap elemen masyarakat**

dukungan dari masyarakat Semarang telah menguatkan tekad dari para mahasiswa untuk meneruskan perjuangan menuntaskan reformasi. Dukungan

ini mengalir dari kalangan *civitas academica* (guru besar; staf pengajar), rohaniwan, kalangan profesi serta seniman.

**g. Bentrok sebagai sebuah pilihan**

salah ciri khas dari gerakan mahasiswa 1998 adalah tidak adanya dukungan dari militer maka dalam setiap aksinya terjadi bentrok antara mahasiswa dan aparat adalah sebuah keharusan. Beberapa kelompok mahasiswa memang mengharapkan bentrok itu terjadi karena ini akan menambah semangat juang bagi kawan-kawan yang lain apalagi jika jatuh korban.

Bentrok paling parah yang terjadi selama kurun waktu reformasi 98 di Semarang adalah di IAIN Walisanga dimana jatuh korban seorang mahasiswa akibat sabetan belati aparat.

## **BAB V**

### **SIMPULAN**

Situasi nasional yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu sewindu (1990-1998) telah mengstimulan mahasiswa untuk melakukan sebuah aksi atau gerakan. Kondisi politik, ekonomi dan sosial Indonesia pada waktu itu bergerak kearah dekadensi yang berujung pada krisis multidimensi. Kondisi politik pada era 1990-1998 menunjukkan dinamika yang hangat, isu suksesi nasional yang bergulir pada Siudang Umum 1993 dan berulang pada tahun 1998 gagal diwujudkan, hegemoni militer dan birokrasi dibawah Orde Baru semakin kuat meskipun Presiden Soeharto mulai terlihat meninggalkan militer dan merangkul kekuatan Islam (ICMI) untuk membendung kekuatan opoisi baru seperti Megawati. Namun disamping itu gerakan mahasiswa secara umum memiliki angin segar setelah dibekukannya NKK/BKK yaitu dengan berlakunya PP No 30/90 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.

Kondisi ekonomi Indonesia turut memberikan andil dalam kemunculan gerakan mahasiswa. Konglomerasi muncul seiring dengan perkembangan ekonomi nasional, dengan jumlah hanya 5 % dari total penduduk Indonesia namun dapat menguasai 70 % ekonomi nasional. Dinasti ekonomi keluarga presiden Soeharto (keluarga Cendana) mulai menguasai berbagai bisnis strategis. Kondisi ekonomi yang tidak sehat ini berujung pada krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak 1997 dan berakibat jatuhnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan. Kondisi sosial Indonesia pun ikut melatarbelakangi gerakan mahasiswa khususnya di Semarang.

Pembangunan fisik yang dibangun Orde Baru ternyata kurang memihak rakyat. Kasus-kasus penggusuran tanah rakyat pada tahun 1990 (misalnya Kedung Ombo) membuat mahasiswa untuk turut bergerak dalam hal advokasi. Selain itu unsur KKN telah menjadi penyakit sosial yang parah. Menjelang kejatuhan Soeharto terjadi peristiwa *chaotic* yaitu kerusuhan 27 Juli 1996, akibatnya militer dan pemerintah mulai bersikap represif terhadap segala gerakan pro demokrasi oleh mahasiswa.

Sikap mahasiswa melihat gejala instabilitas serta dekadensi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial segera melakukan tindakan nyata diantaranya menggiatkan jurnalistik, diskusi dan aksi. Mahasiswa di Semarang melakukan kritik pertama kali pada tahun 1992 dalam wujud perhelatan kesenian dengan tajuk Apel Siaga Kebangkitan Nasional di Fakultas Sastra Undip. Keberanian mahasiswa Semarang ini membuat para aktivisnya terkena cekal dengan tuduhan subversif. Namun demikian, sikap represif dari negara tersebut tidak menyurutkan nyali mahasiswa Semarang untuk tetap bersikap kritis. Mereka mencoba membuat bentuk lain dari gerakan yaitu membuat jaringan antar kota dengan enclave gerakan mahasiswa di berbagai kota. Alhasil mulai muncul organisasi mahasiswa ekstra universitas pro demokrasi seperti SMID (1994), Formasal (1992) dan KAMMI (1998). Selain kemunculan organisasi mahasiswa pro demokrasi, pers mahasiswa di Semarang juga menunjukkan eksistensinya hingga beberapa persma (VOKAL dan OPINI) dilarang terbit karena pemberitaannya yang mengkritisi kebijakan negara. Organisasi intra universitas yang ada di semua PT di Semarang juga turut aktif

memberi warna gerakan mahasiswa meskipun seringkali banyak terjadi intrik dan konflik di dalam BEM atau Senat. Intrik dalam BEM ini seringkali terjadi karena campur tangan organ mahasiswa ekstra seperti HMI, GMNI, PMII karena organ-organ ini yang memiliki basis massa di beberapa fakultas dan PT di Semarang. Biasanya konflik dalam BEM dan Senat terjadi seputar pemilihan pimpinan BEM atau Senat. Namun demikian hal tersebut menjadikan bentuk kekhasan gerakan mahasiswa di Semarang.

Gerakan mahasiswa mulai mendapat tantangan berat paska pecah peristiwa kudatuli (kerusuhan 27 Juli 1996), semua organ mahasiswa mulai berhadapan dengan represifitas aparat keamanan. Momentum utama kebangkitan mahasiswa adalah terjadinya krisis moneter yang memicu berbagai aksi demonstrasi di beberapa kota di Indonesia termasuk Semarang, kemudian peristiwa dramatik yaitu penembakan mahasiswa Trisakti oleh aparat.

Di Semarang, aksi demonstrasi dimulai sejak bulan Februari hingga bulan Mei 1998. Dalam aksi demonstrasi pada tahun 1998 ini justru kalangan BEM dan Senat yang memiliki peran dalam menggerakkan aksi karena mereka adalah organ legal formal dalam setiap PT. Awalnya isu yang diangkat dalam setiap aksi adalah tuntutan penurunan harga kebutuhan pokok yang memberatkan rakyat, memasuki bulan Mei tuntutan mahasiswa bertambah yaitu meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya. Mahasiswa Semarang tidak terjebak dengan isu-isu nasional namun juga

isu lokal seperti pencalonan kembali Soewardi sebagai gubernur Jawa Tengah pun ikut ditentang.

Corak khas lain adalah tidak ada perguruan tinggi yang dominan dalam setiap aksi, lalu penggunaan simbol-simbol negara seperti Gedung Berlian, Wisma Perdamaian dan gedung RRI sebagai lokasi demonstrasi. Dukungan dari segenap civitas akademika, seniman, budayawan dan masyarakat membuat mahasiswa semakin yakin bahwa perjuangan menumbangkan Soeharto akan berhasil. Akhirnya memang pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan hal ini disambut mahasiswa dengan sukacita (sujud syukur, memotong rambut, pawai keliling kota).

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

Siaran Pers atas Pengadilan Aktifis PRD

### Buku dan Artikel

- Abdulgani, Roeslan, *Dr. Soetomo Yang Saya Kenal*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1976).
- Abdullah, Taufik, Abdurahman Surjomihardjo (eds), *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*, (Jakarta: Gramedia, 1985).
- Arfani, Riza Noer, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1996).
- Anderson, Ben, *Revoloesi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944 – 1946*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988).
- Aspinal, Edward, (eds), *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*, (Yogyakarta: LKiS, 2000).
- Britton, Peter, *Profesionalisme Dan Ideologi Militer Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1985).
- Crouch, Harold, *Militer dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).
- Edwin, Donni, dkk. 1996-1997: Tahun Gejolak Politik, dalam *Seri Penerbitan Studi Politik*. (Jakarta: Fisip UI, 1997).
- Eriyanto, *Kekuasaan Otoriter: Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni. Studi Atas Pidato-Pidato Politik Soeharto*. (Yogyakarta: Insist Press, 2000).
- Gie, Kwik Kian, *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*. (Jakarta: Gramedia., 1998).

- Goldberg, Robert A, *Grassroots Resistance: Sosial Movement in Twentieth Century America*, (USA: Wadsworth Inc).
- Hoffer, Eric, *Gerakan Massa*, pent: Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Holloway, Richard, (ed.), *Mencuri dari Rakyat, 16 Pelajaran mengenai Korupsi di Indonesia* (Yayasan Aksara: Januari 2002).
- Ismawan, Indra, *Dimensi Krisis Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1998)
- Irwan, Alexander, *Jejak-Jejak Krisis di Asia* (Yogyakarta: Kanisius, 1999).
- Jatman, Darmanto, (eds), *Menyingkap Misteri Sabtu Kelabu 27 Juli 1996* (Semarang: Lubuk Raya, 2001).
- Junaedie, Kurniawan, *Ensiklopedi Pers Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1991).
- Karim, M. Rusli, *HMI-MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1997).
- Kartodirdjo, Sartono, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1982).
- \_\_\_\_\_, *Elite Dalam Perspektif Sejarah*. (Jakarta: LP3ES, 1983).
- \_\_\_\_\_, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992).
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Kasiyanto, M.J, *Mengapa Orde Baru Gagal ?* (Jakarta: Cakra Media. 1999).
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, ( Jakarta: Gramedia, 1989).
- KontraS, *Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia* (Jakarta: KontraS, 2005). Bentuk PDF File
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Waca, 1994).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: BEntang, 1995).

- Krisnawan, Y, *Pers Memihak Golkar? Suara Merdeka Dalam Pemilu 1992*. (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1997).
- Lab. Ilmu Politik FISIP UI, *Evaluasi Pemilu Orde Baru*. (Jakarta: Mizan, 1997). hlm. 46.
- Legge, John D, *Sukarno, Biografi Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).
- Leirissa, R.Z, *Sejarah Perekonomian Indonesia*. (Jakarta: Depdikbud, 1996).
- Liddle, William R, *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1992).
- \_\_\_\_\_, *Leadership and Culture in Indonesian Politic* (Allen and Unwin, 1996).
- Liotohe, Wimanjaya K, *Primadosa*. (Jakarta: Yayasan Eka Fakta Kata, tanpa tahun).
- Magenda, Burhan D, (eds), *Sikap Politik Tiga Kontestan*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Martha, Ahmaddani G, dkk, *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Bahagia, 1989).
- Mas' oed, Mochtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Mas' oed, Mochtar, dan Collin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*. (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1990).
- McDonald, Hamish, *Suharto's Indonesia*, (Australia: Fortune Books, 1980).
- O'Donnel, Guillermo, dkk (eds). *Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Eropa Selatan* (Jakarta: LP3ES, 1992).
- Onghokham, *Rakyat dan Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991).
- Pringgodigdo, A.K, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Rakjat, 1964).
- Raillon, Francois, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974* (Jakarta: LP3ES, 1985).

- Saidi, Zaim, *Soeharto Menjaring Matahari*. (Bandung: Mizan, 1998).
- Salim, Hairus dan Angger Jati Wijaya (eds), *Demokrasi Dalam Pasungan*. (Yogyakarta: Forum LSM DIY, 1996).
- Sanit, Arbi, *Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, (Yogyakarta: Insist Press, 1999).
- Setiawan, Hersri, *Kamus Gestok*, (Yogyakarta: Galang Press, 2003).
- Smelser, Neil J, *Theory of Colective Behavior* (New York: A Free Press Paperback, 1971).
- Soemardjan, Selo, (eds), *Kisah Perjuangan Reformasi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999).
- Soesilo, *Monopoli Bisnis Keluarga Cendana*. (Depok: Permata, 1998).
- Suharsih dan Mahendra, Ign, *Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia* (Yogyakarta: Resist book, 2007).
- Supriyanto, Didik, *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK-BKK*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998).
- Tim Lapera, *Prinsip-prinsip Reforma Agraria* (Jogjakarta: Lapera Utama Pustaka, 2001).
- Widjojo, Muridan S, et al, *Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999).

### **Artikel**

- Allan Wood dan Ted Grant, *Indonesia: Revolusi di Asia Telah Dimulai*. [Http://www.geocities.com/frontnasiona/marxisme\\_dan\\_perjuangan\\_melanwan.htm](http://www.geocities.com/frontnasiona/marxisme_dan_perjuangan_melanwan.htm) (dikunjungi pada 7 Desember 2007)
- Anton Lucas,, Land Disputes in Indonesia. dalam *Indonesia* edisi April no 23 tahun 1992.
- Bonnie Triyana,, Gerakan Pemuda dan Pembaharuan di Indonesia. Makalah dalam *International Workshop on Youth in the Age of Development* yang

diselenggarakan pada 20 – 22 Juni 2004 oleh Centro de Estudos Afro-Orientalis Federal University of Bahia, Brazil. Tidak dipublikasikan.

Daniel S Lev, “ ABRI dan Politik: Politik dan ABRI,” dalam *Diponegoro 74*, Jurnal HAM dan Demokrasi, No.7/III/April 1999, YLBHI.

Eep Saefullah Fattah, Unjuk Rasa, Gerakan Massa dan Demokratisasi, dalam *Prisma* no 4 tahun 1994

E. Gumbira Sa'id dan A. Harizt Intan, Reorientasi Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era Reformasi : Peranan Sektor Agribisnis dan Agroindustri. *USAHAWAN* No. 10 tahun XXVII Oktober 1998.

Jun Honna, Military Ideology In Response to Democratic Pressure During The Late Suharto Era: Political and Institution. dalam *Indonesia* edisi April 1999.

Mubyarto, "Siklus Tujuh Tahunan Ekonomi Indonesia (1931-1966-2001-2036)", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16 No. 3, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 2000.

### **Surat Kabar**

*Suara Merdeka*, 13 Mei 1992

\_\_\_\_\_, 19 Mei 1992

\_\_\_\_\_, Kamis 5 Februari 1998 hlm 2, “Mahasiswa Beralih ke Kertas Buram”

\_\_\_\_\_, Sabtu 21 Februari 1998 hlm 2, “Senat Undip Jual Kertas Murah”

\_\_\_\_\_, Jumat 6 Maret 1998 hlm 2, “Mahasiswa Kos Sasaran Pahe”

\_\_\_\_\_, Kamis 1 Agustus 1996 hlm 15, “ Pemimpin PRD Mungkin Akan Dicekal”

\_\_\_\_\_, Sabtu 14 Februari 1998 hlm 2, “Baru Mulai, 1.440 Mahasiswa Undip Segera Ditarik”

\_\_\_\_\_, Minggu 15 Februari 1998 hlm 2, “Mahasiswa Menangis di Depan Dewan”

- \_\_\_\_\_ , Rabu 4 Maret 1998, hlm 2, “Mahasiswa IAIN Gelar Aksi”
- \_\_\_\_\_ , Sabtu 7 Maret 1998, hlm 2, “Mahasiswa dan Dosen Sastra Menggelar Aksi Keprihatinan”
- \_\_\_\_\_ , Selasa 10 Maret 1998, hlm 2, “Meski Terlambat Aksi di Undip Tidak Meniru”
- \_\_\_\_\_ , Rabu 11 Maret 1998, hlm 2, “Giliran Unissula Gelar Aksi Keprihatinan”
- \_\_\_\_\_ , Jumat 13 Maret 1998, hlm 2, “Bakar Keranda Warnai Demo di Unissula”
- \_\_\_\_\_ , Rabu 18 Maret 1998, hlm 2, “Pentas Seni dan “Gantung diri” Warnai Aksi”
- \_\_\_\_\_ , 23 Maret 1998, hlm 9, “Peduli Negeri di IKIP”
- \_\_\_\_\_ , Sabtu 4 April 1998 hlm 2, “Aksi di UGM Berubah Menjadi Kerusuhan”
- \_\_\_\_\_ , Rabu 15 April 1998 hlm 2, “Mahasiswa Terpecah Menjadi Dua, Mudrick Jadi Rebutan”
- \_\_\_\_\_ , Kamis 16 April 1998 hlm 12, “Hujan Batu Warnai Demo di UNS”
- \_\_\_\_\_ , Sabtu 18 April 1998, hlm 1, “Mahasiswa Undip Gagal Temui Ketua DPRD”
- \_\_\_\_\_ , Jumat 24 April 1998, hlm 12, “Mahasiswa Tuntut Sidang Istimewa”
- \_\_\_\_\_ , Minggu 19 April 1998, hlm 12, “Unjuk Rasa di IAIN Walisongo Diwarnai Pembakaran Boneka”
- \_\_\_\_\_ , Jumat 1 Mei 1998, hlm 12, “Mahasiswa Duduki Patung Diponegoro”
- \_\_\_\_\_ , Sabtu 2 Mei 1998, hlm 12, “Ratusan Pekerja Bergabung di UNS”
- \_\_\_\_\_ , Minggu 3 Mei 1998, hlm 10, “Para Pakar Didaulat Mahasiswa Ikut Demo”
- \_\_\_\_\_ , Sabtu 9 Mei 1998, hlm 2, “Mahasiswa Unjuk Rasa dari Pos Polisi”

- \_\_\_\_\_ , Minggu 10 Mei 1998, hlm 1, “Muladi dan Guru Besar Ikut Demo.”
- \_\_\_\_\_ , Rabu 13 Mei 1998, hlm 1, “Hujan Batu di IAIN, 6 Luka Parah.”
- \_\_\_\_\_ , Kamis 14 Mei 1998, hlm 2, “Ribuan Mahasiswa Menduduki Wisma Perdamaian.”
- \_\_\_\_\_ , Jumat 15 Mei 1998, hlm 2, “Toko di Simpanglima Tutup”
- \_\_\_\_\_ , Jumat 15 Mei 1998, hlm 2, “Mahasiswa Duduki Gubernurnuran, Copot Baliho Presiden dan Wapres”
- \_\_\_\_\_ , Jumat 15 Mei 1998, hlm 2, “Rebut RRI Minta Tuntutan Disiarkan Tiga Kali”
- \_\_\_\_\_ , Sabtu 16 Mei 1998, hlm 2, “Ratusan Ribu Massa Bertahan di Tengah Hujan”
- \_\_\_\_\_ , Minggu 17 Mei 1998 hlm 2, “Ada Isu Kedatangan Perusuh, Aksi Ditunda”
- \_\_\_\_\_ , Sabtu 16 Mei 1998 hlm 1
- \_\_\_\_\_ , Sabtu 16 Mei 1998, hlm 2, “Ratusan Ribu Massa Bertahan di Tengah Hujan”
- \_\_\_\_\_ , 19 Mei 1998 hlm 2, “Kami Tidak Butuh Reshuffle Kabinet”
- \_\_\_\_\_ , Jum’at 13 Maret 1998 hlm 1, “Pangab: Asal Tetap di Kampus”.
- \_\_\_\_\_ , Sabtu 14 Maret 1998 hlm 2, “Kehadiran Aparat Dipertanyakan”.
- \_\_\_\_\_ , Kamis 2 April 2008 hlm 2, “Muladi Diminta untuk Susun Materi Dialog”.
- \_\_\_\_\_ , Sabtu 4 April 1998, “Aksi di UGM Berubah Menjadi Kerusuhan”.
- \_\_\_\_\_ , Rabu 13 Mei 1998, “Hujan Batu di IAIN, 6 Luka Parah”.
- \_\_\_\_\_ , Selasa 19 Mei 1998, “Pangdam: Perusuh Ditembak di Tempat”.

\_\_\_\_\_ , Minggu 17 Mei 1998 hlm 2, “Ada Isu Kedatangan Perusuh, Aksi Ditunda“.

### **Majalah**

*Balairung*, No.25/Th.XII/1997

*D&R*, 28 Maret 1998

*Hayamwuruk*, No. 2 Th. VII/1992.

\_\_\_\_\_ , No 2/Th VIII/1993.

\_\_\_\_\_ , No 3 Th. VIII/1993.

**DAFTAR INFORMAN**

1. Nama : Aan Rusdiyanto  
Umur : 37 Tahun  
Pendidikan : pernah kuliah di Fakultas Sastra Undip  
Pekerjaan dulu : Aktivis Partai Rakyat Demokratik di Semarang.  
Pekerjaan Sekarang : Sekretaris PEC (*People Empowerment Concorcium*)  
Alamat : JL. Salemba I no 20 Jakarta Pusat.
2. Nama : Ferry  
Umur : 31 Tahun  
Pendidikan : S1 di Untag Semarang  
Pekerjaan dulu : Aktivis Partai Rakyat Demokratik di Semarang  
Pekerjaan Sekarang : wartawan freelance di Utan Kayu Jakarta.  
Alamat : Papua
3. Nama : Radjimo  
Umur : 35 Tahun  
Pendidikan : S1 di Fakultas Sastra Undip  
Pekerjaan dulu : Aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk  
Demokrasi di Semarang  
Pekerjaan Sekarang : Peneliti lepas  
Alamat : Brebes

4. Nama : Lukas Luwarso  
Umur : 41 Tahun  
Pendidikan : S1 di Fakultas Sastra Undip  
Pekerjaan dulu : Aktivis Forum Mahasiswa Semarang  
Pekerjaan Sekarang : wartawan  
Alamat : Jakarta
5. Nama : Bustanul Arifin  
Umur : 38 Tahun  
Pendidikan : pernah kuliah di Fakultas Sastra Undip  
Pekerjaan dulu : Aktivis Golput 1992 di Semarang  
Pekerjaan Sekarang : wartawan di Voice of Human Right  
Alamat : Brebes
6. Nama : Johan Susilo  
Umur : 36 Tahun  
Pendidikan : S1 di Fakultas Sastra Undip  
Pekerjaan dulu : Aktivis lingkungan hidup di Semarang  
Pekerjaan Sekarang : fotografer  
Alamat : Semarang

7. Nama : Satrio Seno Prakoso  
Umur : 41 Tahun  
Pendidikan : S1 di Fakultas Sastra Undip  
Pekerjaan dulu : Aktivis pers mahasiswa di Semarang  
Pekerjaan Sekarang : manajer program di lembaga kebudayaan Indonesia  
Belanda Widya Mitra  
Alamat : Semarang
8. Nama : Basa Basuki  
Umur : 41 Tahun  
Pendidikan : S1 di Fakultas Sastra Undip  
Pekerjaan dulu : Aktivis Golput 1992 di Semarang  
Pekerjaan Sekarang : penyair  
Alamat : Semarang
9. Nama : Tri Budiyanto  
Umur : 41 Tahun  
Pendidikan : S1 di Fakultas Sastra Undip  
Pekerjaan dulu : Aktivis Golput 1992 di Semarang  
Pekerjaan Sekarang : HRD Majalah Olga  
Alamat : Semarang

**Lampiran A**

KOMITE PIMPINAN PUSAT  
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPP-PRD)

SIARAN PERS  
ATAS PENGADILAN 14 AKTIFIS PRD

Upah 7000, Turunkan Harga, Partai Baru, Presiden Baru, Referendum Untuk  
Maubere!!

"pemburuan aktifis PRD, penangkapan Pengurus Pusat PRD,  
dan Persidangan yang akan berlangsung  
adalah sebuah "senam politik" yang akan menguji kita.  
Bila senam politik bisa kita lalui,  
maka PRD akan tampil lebih segar, lebih luwes dan lebih berotot,  
dengan stamina yang lebih kokoh, dengan kuda-kuda yang tidak gampang goyah"  
(Dikutip dari Surat Budiman Sudjatmiko, Ketua PRD, untuk para kader)

Hari ini, 12 Desember 1996, Rejim Orde Baru lewat pengadilan --sebagai alat politik dan pemukul kekuatan pro demokrasi-- menggelar persidangan terhadap 14 aktifis Partai Rakyat Demokratik yaitu 11 orang di Jakarta dan 3 Orang di Surabaya. Empat belas aktifis yang akan diadili oleh Rejim Orde baru itu adalah :

1. 1. Budiman Sudjatmiko (Ketua Partai Rakyat Demokratik)
2. Petrus Haryanto (Sekjend Partai Rakyat Demokratik)
3. I.G. Anom Swastika (Ketua. Dept. Pendidikan dan Propaganda Partai Rakyat Demokratik)
4. Jakobus Kurniawan (Ketua Dept. Organisasi Partai Rakyat Demokratik)
5. Dita Indah Sari (Ketua Umum Pusat Perjuangan Buruh Indonesia)
6. Ignatius Pranowo (Sekjend. Pusat Perjuangan Buruh Indonesia)
7. Wilson (Ketua Dept. Pendidikan dan Propaganda Pusat Perjuangan Buruh Indonesia merangkap Ketua Dept. Hubungan Internasional dan Ketua Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia Untuk Maubere).
8. Garda Sembiring (Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi Cabang Jabotabek)
9. Suroso (Sekretaris Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi Cabang Jabotabek)
10. Ken Budha Kusumandharu (Ketua Dep. Pendidikan dan Propaganda Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi Cabang Jabotabek)
11. Viktor da Costa (anggota Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi Cabang Jabotabek)
12. Ignatius Putut Ariantoko (anggota Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi cabang Purwokerto)

13. Muhammad Sholeh (Ketua Dept. Pendidikan dan Propaganda Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi Cabang Surabaya)
14. Coen Husein Pontoh (Ketua Dept. Pendidikan dan Propaganda Serikat Tani Nasional)

Keeempat belas aktifis PRD beserta Ketua SBSI Mochtar Pakpahan oleh rejim Orde Baru akan dikenakan tuduhan subversi lewat UU Subversi No. 11/PNPS/1963. Mereka dituntut dengan dakwaan berlapis.

Pertama, dakwaan primer: tentang memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan Pancasila.

Kedua, dakwaan subsider : tentang menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara.

Ketiga, dakwaan lebih subsider : tentang menyebarluaskan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, keguncangan atau kegelisahan di kalangan penduduk.

Keempat, dakwaan lebih subsider lagi tentang permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah.

Di pengadilan nanti, lewat UU subversi itu, aktifis PRD diancam dengan Pidana mati atau penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun untuk dakwaan pertama sampai ketiga, serta ancaman maksimal 7 tahun untuk dakwaan keempat.

Rejim Orde Baru menggunakan pasal-pasal subversi untuk menghantam dan menghukum kekuatan pro demokrasi yang menuntut perubahan. Undang-Undang Subversi itu sendiri sesungguhnya adalah produk dari demokrasi terpimpin di bawah Nasakom sebagai legitimasi untuk membunuh lawan Politiknya. Rejim Orde Baru mengambil UU yang menguntungkan ---dari jaman yang selalu dipropaganda hitamkan-- yaitu demokrasi terpimpin. Seperti juga pasal-pasal karet Hatzai Artikelen peninggalan kolonial yang juga masih digunakan untuk memukul kekuatan oposisi demokratik.

#### DARI DALANG SAMPAI SUBVERSI

Pengadilan yang digelar di Jakarta merupakan serangkaian respon reaksioner penguasa Orde Baru terhadap meletusnya perlawanan rakyat pada tanggal 27 Juli 1996, saat dimana rakyat menumpahkan kemarahannya dengan turun ke jalan secara massif, rakyat secara spontan mengaduk-aduk Jakarta, melempari dan membakar gedung pemerintahan, membakar bus, dan berkonfrontasi terbuka dengan militer -- tidak sedikitpun takut melawan militer, meskipun militer bersenjata lengkap--. Perlawanan itu bermula dari kudeta terhadap PDI Megawati lewat kongres Medan dan kemudian penyerbuan pagi buta oleh PDI faksi rejim pimpinan Soerjadi yang dibantu sepenuhnya oleh militer fasis Orde Baru.

Sementara pengadilan yang digelar di Surabaya terhadap 3 aktifis PRD yaitu Dita sari, Mohammad Soleh, dan Coen H. Pontoh berawal dari kepemimpinan mereka

dalam perlawanan buruh Tandes Surabaya yang melibatkan 20.000 buruh yang melawan ketertindasan. Setelah meletus 27 Juli, ketiga aktifis pembela buruh itu digeser tuduhannya sama seperti 11 aktifis PRD lainnya di Jakarta.

Lewat corongnya Jendral "jago fitnah" Syarwan Hamid dan Menko Polkam Susilo Sudarman, Rejim Soeharto secara prematur --dua hari setelah 27 Juli-- mengkambinghitamkan Partai Rakyat Demokratik sebagai dalang peristiwa itu sekaligus mempropagandakan kepada rakyat bahwa Partai Rakyat Demokratik merupakan partai yang berhaluan komunis. Berbagai upaya --dengan menghalalkan segala cara-- rejim memobilisasi rakyat untuk mengutuk PRD.

Pemimpin redaksi dikumpulkan untuk kemudian memaksa memvonis PRD, sejumlah intelektual dan ulama serta pemuda-pemuda karbitan dan preman dibayar dan diiming-imingi kekuasaan untuk kemudian digiring untuk mengutuk PRD. Upaya rejim untuk membangkitkan histeria massa tidak membuahkan hasil. Ummat Islam yang berupaya dijadikan sekutu untuk mengutuk PRD dan kekuatan pro demokrasi juga kandas. Hanya ormas-ormas Islam "berbaju kuning" yang aktif menjilat kekuasaan yang terus mengutuk. Sementara riil politik Islam yaitu NU dan Muhammadiyah gagal digiring oleh rejim. Bahkan sebaliknya, kedua ormas terbesar ini mengumandangkan sejumlah tuntutan dan "reserve" ekonomi politik dengan menunjukkan kebobrokan penguasa dan ketertindasan rakyat.

Mengapa massa rakyat tidak mudah tertipu atas dusta dan propaganda hitam Orde Baru yang menuduh PRD sebagai dalang 27 Juli ?

Secara kasat mata rakyat melihat ada fakta skenario rejim untuk menggulung Megawati sebagai simbol reformasi politik yang memberikan harapan perubahan nasib rakyat. Skenario itu berawal dari pembentukan PDI tandingan, kemudian memaksa kongres Medan dan mendudukkan antek-anteknya yaitu Soerjadi dan kawan-kawan untuk menggulingkan Megawati dari ketua yang syah. Adalah pilihan yang tepat dan rasional jika rakyat secara massal hampir di seluruh daerah bahu-membahu membela Megawati. Sejumlah mimbar-mimbar bebas dan aksi turun ke jalan muncul dimana-mana, mereka bersolidaritas kepada Megawati.

Solidaritas ini memuncak ketika rakyat menyaksikan secara barbar, ratusan preman bayaran yang mengaku anggota PDI pro kongres yang dibantu militer merebut kantor PDI Diponegoro, kemudian memukul, melempar dan membunuh puluhan kader PDI. Amuk massa tidak lagi terhindarkan. Bagaimana mungkin rakyat percaya jika tiba-tiba PRD menjadi "sang dalang" sementara faktanya justru perlawanan 27 juli disulut oleh kebiadaban Soerjadi dan anteknya yang disupport penuh oleh militer. Hasil temuan Komnas HAM yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 12 Oktober 1996 menunjukkan bahwa tidak ada satu kata pun yang menunjuk PRD sebagai biang keladi 27 Juli:

"Bahwa peristiwa pengambilalihan gedung sekretariat DPP-PDI di Jl. Diponegoro no. 58 Jakarta Pusat tanggal 27 Juli 1996 adalah tindakan yang disertai kekerasan oleh DPP PDI kongres Medan dan kelompok pendukungnya yang dilakukan bersama-sama aparat keamanan. Hal ini merupakan peristiwa lanjutan dari urutan kejadian sebelumnya yang bertahan dengan penciptaan konflik terbuka dalam tubuh PDI di dalam mana pemerintahan/aparatur telah melibatkan diri secara berlebihan dan berpihak serta di luar proporsinya sebagai pembina politik dan aparat keamanan. Bahwa peristiwa kerusuhan sosial yang kemudian pecah dan menjalar di sekitar jalan Diponegoro - Proklamasi - Salemba - Matraman - KramatRaya - Senen, terpengaruh oleh efek penggunaan kekerasan dari peristiwa pengambilalihan gedung sekretariat DPP PDI." (dikutip dari pernyataan Komnas HAM mengenai peristiwa 27 Juli 1996, halaman 3, paragraf pertama dan kedua)

Dalam proses penangkapan, pemeriksaan dan interogasi baik di kejaksaan dan terutama di lembaga-lembaga ekstra yudisial seperti Bakorstanas, keempat belas aktifis PRD diintimidasi secara fisik --disiksa, dipukul, disetrum-- untuk mengakui tuduhan dalang 27 Juli. Kader-kader terbaik PRD secara tegar dan jujur tetap konsisten untuk mengatakan kebenaran-kebenaran faktual. Karena fakta-fakta tidak cukup, tidak ada bukti-bukti empirik, membuat kejaksaan panik, sementara mereka sudah dititipi penguasa Orde Baru dengan jalan apa pun untuk menghukum aktifis PRD -- agar rejim Orde Baru tidak kehilangan muka dihadapan rakyat --. Menurut Petrus Haryanto, Sekjend PRD, seorang jaksa penyidik pernah mengatakan :

"Saya kagum kepada kalian, kami kesulitan menemukan bukti bahwa kalian ada di belakang kerusuhan peristiwa 27 Juli. Tetapi kami tidak akan kehilangan akal untuk tetap menghukum kalian." (dikutip dari Surat Petrus Haryanto, Sekjend PRD, untuk para kader)

Tidak adanya bukti-bukti yang meyakinkan yang dapat ditemukan kejaksaan di satu sisi, dan disisi lain mereka harus menjegal aktifis PRD, maka bidikan kemudian diarahkan tuduhan-tuduhan subversif yang sebagian besar berkisar pada dokumen alternatif Indonesia masa depan yang lebih baik yang didokumentasikan dalam Manifesto Politik dan keputusan kongres PRD lainnya -- yang disebarluaskan saat deklarasi 22 Juli 1996--. Rejim Orde Baru akan mengadili pikiran dan cita-cita PRD menuju Indonesia yang lebih baik, dan bukan tuduhan awal sebagai dalang yang menjadi alasan pengkapan dan penahanan sebelumnya.

Setidaknya ada 3 hal dari manifesto yang akan menjadi senjata rejim Orde Baru untuk secara paksa menjebloskan aktifis PRD ke penjara Orde Baru dengan tuduhan subversi --melakukan perbuatan yang ingin memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara.

Pertama, berhubungan dengan azas organisasi PRD yaitu sosial demokrasi kerakyatan. Dengan azas sosial demokrasi kerakyatan rejim menganggap PRD akan menggulingkan ideologi negara dan menggantikannya dengan ideologi komunis. Tuduhan pertama ini sangat tidak masuk akal, dan dibuat-buat. Di dalam manifesto, AD/ART dan program ideologi, politik, dan organisasi PRD, tidak ada satu kata pun yang menyebut PRD adalah berhaluan komunis. Azas sosial demokrasi kerakyatan yang menjadi landasan gerak PRD bermakna bahwa sebuah kekuasaan (demokrasi) harus mampu memberikan kesejahteraan (sosial) dimana kedaulatan rakyat (kerakyatan) yang akan menjadi penentu utamanya. Program ideologi, politik dan organisasi PRD yang merupakan turunan dari azas sosial demokrasi menawarkan kehidupan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat yang menawarkan jalan bagi rakyat untuk keluar dari problem kongret yang saat ini menimpa rakyat baik di bidang politik maupun ekonomi.

PRD menolak negara satu partai, PRD menawarkan sistem multi Partai, dimana seluruh kekuatan politik lewat pengorganisan di tingkat partai bebas dan berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. PRD juga menawarkan koalisi demokratik kerakyatan, agar pemerintahan tidak didominasi oleh kekuatan politik tunggal. PRD berulang kali menyatakan menentang pelarangan dan penindasan terhadap orang beragama, kebebasan beragama harus dihormati. Tetapi, PRD juga menolak jika agama dijadikan alat oleh kekuasaan untuk kepentingan politiknya. PRD tidak setuju jika semua industri secara total dinasionalisasikan. PRD menolak dengan tegas pengontrolan secara ketat terhadap pers. PRD menentang pelarangan atas kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan kebebasan organisasi. Jika kesemua itu dipayungi oleh azas sosial demokrasi dan dianggap oleh penguasa rejim Orde Baru sebagai komunis, maka Orde Baru melakukan penghianatan terbesar terhadap nilai-nilai dan hak dasar demokrasi yang universal dan diakui oleh dunia internasional.

Kedua, yang akan dijadikan dasar subversi adalah penolakan PRD terhadap paket 5 UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI. Manifesto dan Program politik PRD memang menuntut pencabutan 5 paket UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI. Mengapa PRD menuntut dicabut? Karena keduanya adalah penopang kediktatoran rejim Orde Baru - yang mematikan gerak rakyat untuk aktif berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.

Setiap upaya rakyat memperjuangkan hak-hak politik dan hak-hak ekonomi dipukul oleh rejim dengan legitimasi yang dibangun melalui 5 Paket UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI. Dengan alasan 5 Paket UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI, kebebasan rakyat berbeda pendapat, kebebasan rakyat berorganisasi, harus dibayar mahal dengan teror, penangkapan bahkan pembunuhan. PRD menuntut pencabutan kedua pilar kediktatoran itu dalam upaya mengembalikan kedaulatan rakyat yang selama hampir tigapuluh tahun ini dikekang oleh rejim Orde Baru. Sangat mengherankan dan

tidak beralasan jika suatu keinginan untuk menegakkan dan mengembalikan kedaulatan rakyat --kepada pemiliknya yang syah-- secara sewenang-wenang dituduhkan subversi.

Ketiga, penggalangan PRD dengan mengorganisir rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap rejim Orde Baru melalui metode aksi massa, pembentukan ormas-ormas onderbouw (SMID, PPBI, STN, JAKER, SRDJ dan SRS), dan beraliansi dalam KIPP dan MARI, juga dianggap rejim sebagai tindakan subversi. Dalam manifesto dan program politik PRD memang mencantumkan pengorganisasian rakyat untuk melakukan perlawanan yang dipimpin dan terorganisir dalam perjuangan damai. Perlawanan Rakyat ditujukan untuk perubahan sistem politik yang lebih demokratis dan lebih menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat. Perlawanan rakyat harus dipimpin dan terorganisir dalam sebuah partai politik yang akan memperjuangkannya lewat jalan parlementer. Karena itu memang PRD menuntut terwujudnya sistem politik multi partai. Dengan sistem politik multi partai maka PRD dan seluruh kekuatan politik lainnya berhak dipilih rakyat lewat pemilu yang jujur untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

PRD sadar bahwa perubahan-perubahan yang mendasar pada akhirnya haruslah menyertakan rakyat yang luas. Karena itu PRD memilih sebagai partai yang bercorak partai kader yang berbasis massa. PRD menciptakan struktur yang komprehensif untuk menjaring seluas-luasnya aspirasi rakyat dalam basis-basis pengorganisasian. Ormas-ormas onderbow PRD, yang terdiri dari ormas sektor buruh, mahasiswa, petani, miskin kota dan kebudayaan, adalah kantung-kantung yang akan menampung secara luas rakyat yang mendambakan perubahan. Ketika rakyat bergabung dalam ormas yang berafiliasi secara politik dan organisasi ke PRD, ketika itu pula terbuka peluang rakyat untuk terlibat dalam perubahan-perubahan mendasar di bidang ekonomi dan politik. Selama orde baru berkuasa, keterlibatan rakyat secara luas dipotong oleh depolitisasi deideologisasi dan floating mass. Akibatnya rakyat selalu terasing dari proses politik.

PRD tidak menolak tuduhan menggerakkan aksi-aksi massa baik di sektor buruh, mahasiswa, petani, miskin kota dan sebagainya. Berbagai aksi massa memang secara terbuka dipimpin oleh PRD, bersama buruh PRD aksi di pabrik, ke depnaker, dan beramai-ramai menduduki DPR. Begitu aksi PRD dengan sektor masyarakat lainnya. Metode perjuangan politik melalui aksi massa menjadi pilihan yang efektif bagi PRD untuk memperluas kesadaran politik rakyat. Apalagi di tengah kontrol penguasa Orde Baru terhadap pers begitu ketat, sehingga pers tidak dapat menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat. Bagaimana mungkin sebuah cita-cita luhur PRD untuk mengikutsertakan secara luas rakyat dalam proses politik dengan memperkuat basis-basis pengorganisasian di seluruh sektor masyarakat, melalui pilihan perjuangan massa -- yang efektif dan meluaskan kesadaran politik rakyat--- dituduh penguasa subversi. Ini menandakan penguasa Orde Baru tidak ingin memiliki

kesadaran politik rakyat untuk terlibat aktif dalam menentukan perubahan-perubahan politik.

### MENGAPA PRD MENJADI SASARAN TEMBAK

Ada tiga alasan mengapa PRD dijadikan sasaran tembak oleh Rejim Orde baru seperti yang telah dikemukakan oleh Ketua Partai Budiman Sudjatmiki. Ketiga hal itu adalah :

Pertama, terbukti, sebagaimana yang tercantum dalam manifesto PRD, mampu merekam, merasakan dan memahami persoalan yang timbul di kalangan rakyat dalam hal sosial, ekonomi, politik dan budaya sekaligus merumuskan dalam strataegi taktik. Inilah "potensi" kekuatan yang dilihat sebagai "hantu" oleh penguasa.

Kedua, PRD secara tulus telah menyatakan diri dengan perlawanan rakyat dan mengemukakan tuntutan ekonomi politik secara lantang dan konsekwen karena memang menjalankan amanat konstitusi. Ini berarti "membongkar rahasia dapur" ORBA di hadapan rakyat sendiri.

Ketiga, PRD telah merumuskan program-program yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat dan menegakkan kedaulatan rakyat. Rakyat sudah semakin kritis, mereka telah mampu membandingkan antara realitas mereka kini, dan cita-cita PRD, yang sebetulnya sudah dimungkinkan untuk kondisi sekarang.

Ketiganya adalah pembuka pintu bagi PRD kedalam arena sejarah masa depan.

### PENJARA TIDAK MEMBUAT JERA

Meskipun konstitusi menyebut bahwa negara republik Indonesia adalah negara hukum, namun dalam sejarah orde baru, pengadilan politik selalu dibangun dengan logika politik dan bukan dengan logika hukum.

Kalaupun ada maka logika hukum akan dibimbing oleh kepentingan politik penguasa Orde Baru. Vonis bebas terhadap aktifis PRD adalah sesuatu yang mustahil, meski tidak ditemui bukti-bukti yang menunjuk pada dakwaan. Bahkan, sebelum pengadilan dimulai keputusan untuk menjebloskan empat belas aktifis PRD ke penjara sudah ada di balik jubah hakim. Intelektual "bayaran" --sebagai saksi ahli-- pasti sudah disiapkan rejim untuk menghantam dengan keterangan-keterangan palsu yang memberatkan. Sejumlah preman juga pasti sudah disiapkan untuk mengutuk PRD di pengadilan seperti yang sudah dilakukan ketika kasus Sri Bintang Pamungkas.

Pimpinan dan kader PRD baik yang akan diadili maupun yang kini basih terus diburu, tidak akan meratap memohon belas kasih kepada rejim. Penangkapan, pengadilan dan Penjara adalah sebuah kosekuensi perjuangan yang akan pasti dilalui dalam

menghadapi rejim yang otoriter. Apa yang kini sedang menimpa PRD, belumlah sebanding dengan berbagai penderitaan yang dihadapi rakyat yang hidup dalam ketertindasan. Apa yang menimpa PRD masih lebih ringan dibanding teror dan pembunuhan yang dilakukan rejim di tahun 1965, yang dilakukan di Aceh, pembantaian di Timtim, Papua, Priok, Lampung dan yang terbunuh pada 27 Juli. Beban yang menimpa PRD masih lebih ringan di Banding Marsinah dan jutaan buruh yang dililit kemiskinan. Seluruh pimpinan dan kader PRD yang akan dipenjarakan tidak akan mundur. Penjara tidak akan membuat mereka jera. Bahkan sebaliknya semakin meneguhkan bahwa rejim ini harus dilawan. Perjuangan harus terus berlanjut, dan demokrasi harus terus direbut. Cepat atau lambat, dengan kekuatan rakyat tujuan-tujuan politik PRD akan terwujud. Dalam ruang penjara kami yang sempit dan terisolasi dari dunia luar, kami tetap yakin bahwa demokrasi dan kedaulatan rakyat adalah sebuah takdir sejarah yang tidak terhindarkan, cepat atau lambat semua akan terwujud. Karena umat manusia menginginkannya, karena dunia menciptakannya, karena sejarah pasti akan membuktikannya (Wilson, Ketua Dept. Pendidikan dan Propaganda PPBI, dan Koordinator SPRIM). Kami, kader-kader PRD yang saat ini berada di penjara besar Orde Baru --yang terus diburu, diteror dan diintimidasi--, akan meneruskan perlawanan. Tidak ada satu alasan pun bagi kami untuk mundur. Saat ini Ketua Partai telah memberikan mandat kepada Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) untuk melanjutkan perlawanan. Kami akan terus berjuang bersama rakyat di bawah azas sosial demokrasi kerakyatan sampai sistem demokrasi multi partai kerakyatan terwujud.

Satu Perlawanan, Satu Perubahan

Jakarta, 12 Desember 1996

Atas nama

Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik ( KPP - PRD )

MIRAH MAHARDHIKA.

Kirimkanlah E- mail ke alamat kami / Kembali ke Index bahasa Indonesia

## Lampiran B

You are currently viewing Gmail in basic HTML. [Switch to standard view](#)

[Account Options](#)

[satusejarah@gmail.com](#) | [Settings](#) | [Help](#) | [Sign out](#)

[Show search options](#)

[Compose Mail](#)

[Folders](#)

[Inbox \(39\)](#)

[Starred](#)

[Sent Mail](#)

[Drafts](#)

[All Mail](#)

[Spam \(7\)](#)

[Trash](#)

[Contacts](#)

[Labels](#)

[« Back to Inbox](#)

[< Newer 33 of 60 Older >](#)

[Expand all](#)

[Print](#)

[New window](#)

haluu mas lukas

[Inbox](#)

Sontong Trantana Mon, Feb 18, 2008 at 9:19 AM

Lukas Luwarso

[<masluki@cbn.net.id>](#) Tue, Feb 19, 2008 at 12:12 AM

To: Sontong Trantana [<satusejarah@gmail.com>](#)

[Reply](#) | [Reply to all](#) | [Forward](#) | [Print](#) | [Delete](#) | [Show original](#)

Hi Lontong...

Langsung saja kujawab ya sejauh yang bisa kuingat, sudah 17 tahun berlalu..

1. Forum Mahasiswa Semarang (FMS) muncul berbarengan dengan munculnya forum-forum mahasiswa serupa di berbagai kota (Yogya, Surabaya, Jakarta, Malang, dll) pada 1989. Seingat saya, nama FMS resmi digunakan saat saya memimpin aksi Pawai Alegoris Menolak SDSB, kalau tidak salah tahun 1990. Seingat saya FMS praktis tidak digunakan lagi setelah usai vonis sidang saya dan Poltak pada 1993 (entah, kalau generasi di bawah saya memakai FMS, karena setelah vonis dan lulus saya hijrah ke Jakarta).

2. Forum Demokrasi (Fordem) saya dirikan di PKM Undip pada tahun 1991,

menyusul Fordem yang didirikan Gus Dur dkk pd tahun yang sama. Saya melihat Fordem adalah gerakan kultural untuk membangun demokrasi yang penting, dan tidak ada salahnya membuka "cabang" di Semarang. Saya sempat disidang oleh Senat Undip, Dipimpin Rektor dan seluruh PR diancam dipecat, karena dianggap menyalahgunakan kampus untuk "politik praktis". Rektor Undip (Saat itu Moeliono Trastotenodjo) khawatir dengan pendirian Fordem Semarang, karena saya mengajak sejumlah guru besar untuk bergabung, dan bersedia hadir saat deklarasi di PKM Undip.

3. Fordem tidak banyak kiprahnya/kaitannya dalam kaitan dengan gerakan mahasiswa di Semarang. Saya gunakan bendera Fordem untuk kegiatan diskusi (bukan untuk aksi), Namun, bisa juga dikaitkan, mungkin forum-forum diskusi yang kami gelar melalui Fordem memberikan inspirasi bagi mahasiswa untuk aksi.

Demikian. kalau mau nambah silahkan kirim pertanyaan lagi

Lukas

- Show quoted text -

Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

Sontong Trantana Tue, Feb 19, 2008 at 9:18 AM

Lukas Luwarso

<masluki@cbn.net.id> Tue, Feb 19, 2008 at 12:33 PM

To: Sontong Trantana <satusjarah@gmail.com>

Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

1. Apel Siaga Kebangkitan Nasional diadakan untuk mengolok-olok (parodi) upacara yang resmi. Urut-urutan dan strukturnya sama seperti upacara resmi. Ada komandan Upacara, inspektur, peserta, pembacaan Pancasila, baca doa, Nyanyi, dsb, namun materinya semua dipelesetkan. Misalnya pembacaan Pancasila diganti Panca-Silap (lima kesalahan), Lagu Indonesia raya, diganti Mars Golput, pengibaran bendera putih (bukan merah putih), dst. Sambutan komandan upacara diganti dengan pembacaan Pernyataan FMS "Menolak Pemilu 1992" dan mengajak masyarakat memilih Golput. Setelah itu dilanjutkan dengan mimbar bebas, siapa saja boleh berpidato.

Pelaku apel siaga yang di panggung sekitar 30, selebihnya peserta dari berbagai kampus (Unisula, IAIN, Unika, Untag, dll), umumnya anak Undip, dan penonton masyarakat sekitar.

2. Anggota FMS tidak pernah terdaftar secara resmi, karena sifatnya forum, saya juga cuma tahu kordinator2 wakil dari berbagai universitas. FMS

adalah organisasi aksi, tidak ada struktur organisasi ketat, saya asal ditunjuk menjadi koordinator, tanpa pemilihan dsb, karena sering merancang aksi.

3. Di Semarang aktivis gerakan mahasiswa adalah juga juga jaringan aktivis pers mahasiswa. Saya, misalnya, saat itu, memimpin Koran Kampus Manunggal. Khususnya di Undip, KK Manunggal adalah motor gerakan mahasiswa di Semarang saat itu, bersama media kampus fakultas, seperti Hayamuruk (sastra), Opini (Fisip), juga Fak Hukum, dan ekonomi (saya lupa nama majalahnya); termasuk aktivis dari IAIN, Uniika, Untag dan unisula, juga umumnya dari pers kampus.

> maturnuwun mas lukas..ada beberapa lgi..

>

> 1. mas lukas masih ingat tentang urutan acara Apel Siaga

> KEbangkitan NAsional?apakah seperti tata upacara pada umumnya?siapa

> saja

> orangnya?berapa aktor yang dipanggung itu?

> 2. berapa anggota FMS waktu itu?apakah menggunakan struktur organisasi

> secara ketat?atau cair?

> 3. oiya mas, seberapa jauh peran pers mahasiswa dalam memberi warna GM

- Show quoted text -

Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

Sontong Trantana

<satusjarah@gmail.com> Sat, Feb 23, 2008 at 10:44 PM

To: Lukas Luwarso <masluki@cbn.net.id>

Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

wah maturnuwun mas Lukas. nggak pernah dolan semarang to?

- Show quoted text -

Quick Reply

To: Lukas Luwarso <masluki@cbn.net.id>

Include quoted text with reply

<< Back to Inbox

< Newer 33 of 60 Older >

Get new mail notifications. Download the Gmail Notifier. Learn more

You are currently using 10 MB (0%) of your 6483 MB

Gmail view: standard | basic HTML Learn more

©2007 Google - Terms - Gmail Blog - Google Home

## Lampiran C

dh,

beribu maaf atas tidak dapat membantu dengan baik.  
selain aku sudah menjadi pelupa. aku buka2 fileku ternyata sudah tidak ada lagi yang menjadi pengiatku.  
ini yang sedikit teringat.  
semoga masih berguna.

mungkin lebih asyik jika kita bicara langsung.

tentang SMID di Semarang :

### 1. Bagaimana cerita singkat kemunculan SMID secara nasional ?

Smid lahir dari mahasiswa yang peduli terhadap nasib bangsa. Pada awalnya mereka tergabung dalam solidaritas2 mahasiswa lokal. Misal di semarang: solidaritas mahasiswa semarang (sms), di jogjakarta: smy, dll. Saya lupa tepanya, sepertinya bulan juni 1994 para aktivis tersebut melebur menjadi smid. Ada semacam adart, saya punya tapi ngak tidak saya simpan di serang. Sewaktu di tingkat lokal, mereka mengadakan kritik terhadap rejim, dengan cara yang memungkinkan saat itu. Demo adalah kegiatan yang istimewa.

Boleh dikatakan smid adalah aktivis 90-an, kebangkitan di semarang dimulai saat upacara golput di fakultas sastra tahun 1992. Terjadi penangkapan beberapa mahasiswa: poltak ike wibowo, lukas luwarso, dan petrus hariyanto. Penolakan isu internal kampus nkk/bkk menjadi isu kampus yang sering dijadikan wacana.

### 2. Bagaimana platform gerakannya ?

Platformnya, kita diawali membaca buku2 kritis (perlawanan). Anti kapitalisme orde baru dan ketidaadilan sejarah.

### 3. Bagaimana perkembangan SMID hingga sampai ke daerah ? khususnya semarang?

Smid lahir dari daerah. Dari smid semarang adalah salah satu motor berdirinya smid pusat.

### 4. Kapan SMID di semarang mulai aktif ?

Smid semarang lahir dari sms, kalau ngak salah tahun 1993 mulai diformalkan.

### 5. Siapa tokohnya ?

Dari berbagai kampus: undip, usm, unisulla, dan ikip. Salah satu tokoh2nya: undip: petrus hariyanto, dll, Usm: rivani noor, Unisula: poltak, Ikip pgri: nurul qomariyyah

### 6. Dimana basisnya ?

Basis penggalangan masa di kampus, di undip di kampus sastra. Mereka ada di organisasi intra kampus

### 7. Kira-kira berapa orang anggotanya ?

Tahun 1994: saata awal pendaftaran: 50-an. Tahun 1995-1997: meningkat, kira2 dpt dihiutng satu orang membawa tiga orang pertahunnya.

### 8. Bagaimana model perekrutan anggota ?

Modelnya beragam, bisanya lewat organisasi intra kampus. Smid biasa mengintervensi organisasi intra kampus., yang sering dipakai diawal2 adalah pers kampus. Bahkan, ada kesamaan isue dalam penentuan tulisan ddi pers kampus. Hampir semua aktivis adalah bisa dibidangnya, jadi tak jarang mereka menjadi ketua atau pejabat penting di lembaga intra kampus. Tahun ajaran baru adalah perang antar lembaga ekstra kampus. Smid menjadikan momen in sangat istimewa. Kita mengajak mahasiswa untuk aktif di dalam lembaga intra kampus yang telah dikuasai. Dari keaktifan mreka terus kita lanjuti dengan diskusi2 politik. Namun secara umum, pola yang dipakai adalah mengajak para mahasisaw baru untuk berubah, dari siswa menjadi mahasiswa. Untuk itu, smid menyebarkan selebaran, diantaranya menolak opspek., menjelaskan permasalahan seputar kampus, masalah politik nasional, dll. Setelah terrekrut sekian (10-an) mahasiswa kemudian diajak untuk mengikuti kurpol (kurus politik) yang bertahap. Dan setelah itu mereka diajak untuk terjun langsung: aksi. Misalnya, demo atau live ini di lingkungan buruh/tani.

### 9. Bagaimana porsi aktivis perempuan dalam SMID ?

Posisinya tidak ada perbedaan dgn laki2. asal kompeten dapat menjadi ketua. Bahkan, disemarang tercatat dua kali periode yang menjadi ketua smid sermang adalah perempuan: nutul q, dan wirayanti.

### 10. Apasaja aktifitas anggota SMID ?

Selain sama dengan aktivitas mahasiswa biasa: belajar dan kuliah, aktivis smid tak luput dari diskusi, termasuk saat pacaran. Baca buku, nulis, mencari anggota, mencari duit untuk kelangsungan organisasi: menjual buku, dll.

11. Bagaimana kaitan antara SMID dengan PRD ?

Tahun 1997 budiman sujatmiko dan kawan2 datang ke beberapa smid lokal, mreka menawarkan prd (p masih persatuan). Saat itu, smid darah menerima, termasuk smis semarang.

12. Bagaimana aktifitas menjelang peristiwa reformasi 98 ?

Tahun 1998 situasi internal smid sudah berubah. Sejak peristiwa 27 juli 97, smid secara vacuum, karena para anggotanya dan pejabat smid pada ditangkapi. Smid kemudian berhenti dari aktivitas legal dan berganti menjadi Imnd. Tambahan, sejak menjadi Imnd saya tidak beggitu tao dan aktif, tapi saya mengikuti terus perkembangan.

13. Apakah SMID di semarang cukup besar ?

Ya smid semarang sebagai kelompok mahasiswa pejuang angkatan 90-an boleh dikatakan besar. Secara anggota mungkin tidak, tapi kontribusi smid semarang sangat terasa di tingkat nasional. Aksi hari buruh 1m ei dilakukan pertama sejak jaman orde baru adalah di semarang. Rumah saya di semarang jd saksi, sebagai tempat rapat.

14. Adakah corong kampanye ? misalnya bulletin ?

Ada ditingkat universitas masing2 punya ditungkat nasional juga punya: suara pembebasan

15. Apakah SMID di semarang gerakannya massif ?

Sangat masif dari tahun 1995-1997. tentu saja sangat fluktuatif.

16. Bagaimana kiprah SMID pada saat aksi reformasi 98 di semarang ?

Smdi sudah tidak ada, generasi selanjutnya (adik) nya yang berkiparah: Imnd. Setahu saya, kita bergaung dengan semua elemen mahasiswa, karena mengusung isu yang sama: reformasi, adili suharto.

17. Adakah symbol tertentu yang membedakan anggota SMID dengan elemen mahasiswa lain ?

Ada lah yauw... segi penampilan kita kelihatan lusuh, tak peduli degnan diri sendiri, tapi tak semua. Kita selalu membawa buku, minimal prisma (terbitan lp3es). Kebanyakan kita gondrong. Kepal tangan kiri.

18. Apakah SMID di Semarang membangun jaringan dengan elemen mahasiswa lain ? sebutkan ! bagaimana bentuk jaringan itu ?

Ya, setiap kegiatan kita selalu mengajak dan berjaringan. Misalnya gmni, hmi kadang kala. Sesuai isu saja.

**MARI JADIKAN INDONESIA LEBIH BAIK!**

radjimo Sastro Wijono

<http://radjimo.blogspot.com>

<http://gangraflasia.blogspot.com>

+6217 814 624

> Date: Tue, 23 Oct 2007 02:17:01 -0700

> From: mahapati\_randu@yahoo.co.id

> Subject: Halu mas

> To: radjimo@hotmail.com

>

> Asslm.. halo mas momo,iki arik semarang.Eh mas,skripsi q ttg gerakan mhswa di semarang taun 90-98.Kira2 njenengan iso kasih gambran ga?Ato q bs minta advice?Maturnuwun..Wasslm

>

>

>

> 

---

Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di di bidang Anda! Kunjungi Yahoo! Answers saat ini juga di <http://id.answers.yahoo.com/>

>

dh,

ada tulisan kenangan dari teman smid tetnang aksi hari buruh pertama masa ordebaru di semarang.

moga berguna

1 Message ----

From: Samsul Prihatmo <samsul\_p@yahoo.com>

To: aktivis\_bicara@yahoogroups.com

## DEMONSTRASI BURUH

### Aksi Satu Mei di Semarang

Buruh dan mahasiswa bergabung melakukan demo menyambut Hari Buruh Sedunia. Agitasi politik yang perlu diwaspadai.

SEKITAR 1.000 buruh dan 250 mahasiswa menggelar unjuk rasa menyambut Hari Buruh Sedunia, Senin, 1 Mei lalu. Mereka mengaku dari organisasi Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID).

Sembari membentangkan poster "Peringatan Hari Buruh Sedunia", para demonstran berkumpul di sepanjang Jalan Atmodiriono, masih dalam kawasan kampus Universitas Diponegoro (Undip), Semarang. Di bawah komando Kolap Yoko, dari SMID Surabaya, pengunjuk rasa berjajar menggunakan tali rafia dan beriringan menyusuri jalan menuju Simpang Lima, Semarang. Sambil menenteng poster "Bebaskan Buruh Berorganisasi", demonstran yang terdiri dari buruh dan mahasiswa itu menyanyikan lagu Halo-halo Bandung, sambil meneriakkan "hidup demokrasi".

Menurut laporan wartawan Gatra, di perempatan Simpang Lima para demonstran membagikan poster. Kolap Yoko, di persimpangan itu, menggelar mimbar bebas. Ia berbicara tentang keberadaan buruh. Petrus Hariyanto, Sekjen SMID, mengatakan bahwa buruh dan mahasiswa harus bekerja sama untuk kepentingan demokrasi.

Sementara aksi mimbar bebas berlangsung, seorang polisi lalu lintas dengan pengeras suara meminta demonstran agar tertib dan pindah ke lapangan rumput di sebelah. Tapi massa terus bergerak. Sembari berteriak menuntut kenaikan upah, para pengunjuk rasa melaju ke bunderan air mancur di hadapannya, yaitu di Jalan Pahlawan, sekitar 50 meter dari kantor gubernur.

Aparat keamanan pun bersiaga. Sepeda motor polisi mulai melakukan blokade, menghadang barisan. Kapoltabes Semarang Kolonel (Polisi) H.M. Adang Rismanto memimpin anak buahnya menghentikan laju demonstran. Sampai-sampai Adang Rismanto terdorong-dorong oleh massa. Akhirnya,

dengan menggunakan pentungan, polisi mulai beraksi.

Serombongan aparat keamanan berpakaian preman merangsek menyerobot poster dan spanduk. Tapi massa kelihatan marah dan melawan petugas. Lalu barisan keamanan menarik beberapa massa demonstran yang berada di barisan terdepan. Mereka segera dimasukkan ke mobil polisi untuk diamankan.

Massa demonstran pun bubar berlarian ketakutan. Mereka dihalau menuju kampus Undip. Tak kurang dari 15 demonstran mahasiswa dan buruh yang tak teridentifikasi mulai diperiksa polisi. Di antaranya, Petrus Hariyanto, Kolap Yoko, Bimo Petrus, Lukman dari Jakarta. Lalu Sutrisno, seorang buruh, dan seorang lagi buruh perempuan.

Mereka dipersalahkan mengganggu ketertiban umum, dan masih dalam proses penyidikan. Kepada Yudi Sutomo dari Gatra, Adang Rismanto menandakan bahwa tindakan petugas sudah sesuai dengan prosedur. Terjadinya insiden, katanya, karena demonstran sudah keterlaluan. "Awalnya kan kami sudah mengimbau agar mereka membubarkan diri," kata Adang. "Tapi mereka membangkang dan bahkan petugas dilawan." Para demonstran, yang terdiri dari mahasiswa dan buruh PT Surya Indah Garmindo, PT Kreasi Plastik Indotama, PT Queen Ceramic Setiabudi, dan juga PT Murti Plastindo, akan tetap diproses.

Aksi serupa dilakukan oleh puluhan buruh dari PPBI dan mahasiswa yang tergabung dalam SMID ke kantor menteri tenaga kerja di Jakarta. Aksi itu dibubarkan dan beberapa orang ditangkap, termasuk Ditasari, Sekjen PPBI.

Keesokan harinya, sekitar 60 anggota PPBI dan SMID berdelegasi ke Komnas HAM di Jakarta. Di hadapan Sekjen Komnas HAM Baharuddin Lopa, rombongan meminta agar temannya yang ditahan sehari sebelumnya di Jakarta dan Semarang segera dibebaskan. Pada saat yang bersamaan, 26 mahasiswa Undip yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lembaga Kemahasiswaan (FKLK) menemui E.Susilo, Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD Jawa Tengah. Dan akhirnya seluruh demonstran dibebaskan. Tapi Poltabes Semarang tetap melanjutkan pengusutan perkara.

Yang menarik, kehadiran FKLK mendapat reaksi dari Senat Mahasiswa (Sema) Undip. Menurut Nur Hidayat, Ketua Sema Undip, kehadiran rombongan mahasiswa ke DPRD itu di luar kontrol Senat Mahasiswa Undip. "Kami tandaskan, FKLK itu secara politis dan ideologis sama sekali tak mendukung aksi dari SMID dan buruh," katanya. "Kami juga merasa dilangkahi oleh tindakan FKLK." Dan lebih dari itu, perlu diketahui pula bahwa SMID di Undip berada di luar struktur.

SMID mengaku berdiri dari hasil kongres di Jakarta, 3 Agustus 1994. Embrionya bermula dari sekumpulan tokoh aksi solidaritas mahasiswa di berbagai kota di Indonesia. Mereka mempunyai program politik: progresif, radikal, demokratis, dan prodemokrasi.

Menurut Sekjen SMID, Petrus Hariyanto, SMID adalah organisasi tingkat nasional. "Program politik SMID, mewujudkan kebebasan berorganisasi," katanya. Termasuk ikut berperan dalam hal kerakyatan. "Kami tak cuma memperjuangkan kaum buruh, juga mereka yang tertindas," kata Petrus kepada Gatra. Karena itu pula, untuk menyambut Hari Buruh Sedunia, SMID bergandeng tangan dengan PPBI menggelar aksi demo memperjuangkan kepentingan buruh.

PPBI adalah sebuah organisasi serikat buruh yang bebas. Berdiri pada tanggal 23 Oktober tahun lalu, dan mengaku sebagai hasil kongres luar biasa para buruh dari Semarang, Solo, Surabaya, Bogor, Jakarta, Bekasi, dan Medan, di kota sejuk Ambarawa, Jawa Tengah. Organisasi ini katanya berjuang untuk kepentingan buruh di mana saja. Misalnya memperjuangkan upah minimum nasional (UMN), yang menurut perhitungan PPBI adalah Rp 7.000 sehari. Lebih besar dari upah minimum (UMR) yang ditentukan pemerintah.

Tak cuma memperjuangkan soal upah minum, mereka juga menuntut kebebasan berserikat. Petrus pun tak lupa mengungkapkan keinginannya membuat partai baru.

Menurut Bomer Pasaribu, Sekjen SPSI, pada hakikatnya yang namanya demonstrasi itu sah dan patut didukung. Sebab salah satu yang diperjuangkan SPSI selama ini adalah kebebasan buruh berdemo. Cuma unjuk rasa dilakukan, katanya, terutama terhadap majikan atau perusahaan yang bandel dan tak menaati peraturan. Tapi kalau demonstrasi digerakkan oleh PPBI dengan menggunakan 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia, katanya, itu jelas sudah tak benar.

Kenapa? Menurut Bomer, 1 Mei itu Hari Buruh zaman Orde Lama. Dan sudah diganti dengan Hari Pekerja Nasional, 20 Februari, sejak tahun 1973. "Itu deklarasi Persatuan Buruh Indonesia yang oleh Pak Harto dikukuhkan menjadi Keppres Nomor 9 Tahun 1991," kata Bomer. Menurut Bomer, aksi demo dengan memakai pola komunis dan memiliki sifat agitasi propaganda ala 1 Mei itu menjadikan pekerja sebagai komoditas politik. Dan itu, katanya, sudah harus ditinggalkan. Kepada Gatra, Menaker Abdul Latif memang sudah mensinyalir bahwa unjuk rasa itu ditunggangi pihak ketiga.

MARI JADIKAN INDONESIA LEBIH BAIK!

radjimo Sastro Wijono

<http://radjimo.blogspot.com>

<http://gangraflesia.blogspot.com>

+6217 814 624

> Date: Tue, 23 Oct 2007 02:17:01 -0700

> From: mahapati\_randu@yahoo.co.id

> Subject: Halu mas

> To: radjimo@hotmail.com

>

> Asslm.. halo mas momo,iki arik semarang.Eh mas,skripsi q ttg gerakan mhswa di  
semarang taun 90-98.Kira2 njenengan iso kasih gambran ga?Ato q bs minta  
advice?Maturnuwun..Wasslm

>

>

>

> 

---

  
> Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di di bidang Anda! Kunjungi  
Yahoo! Answers saat ini juga di <http://id.answers.yahoo.com/>

>

Get your free suite of Windows Live services! Windows Live